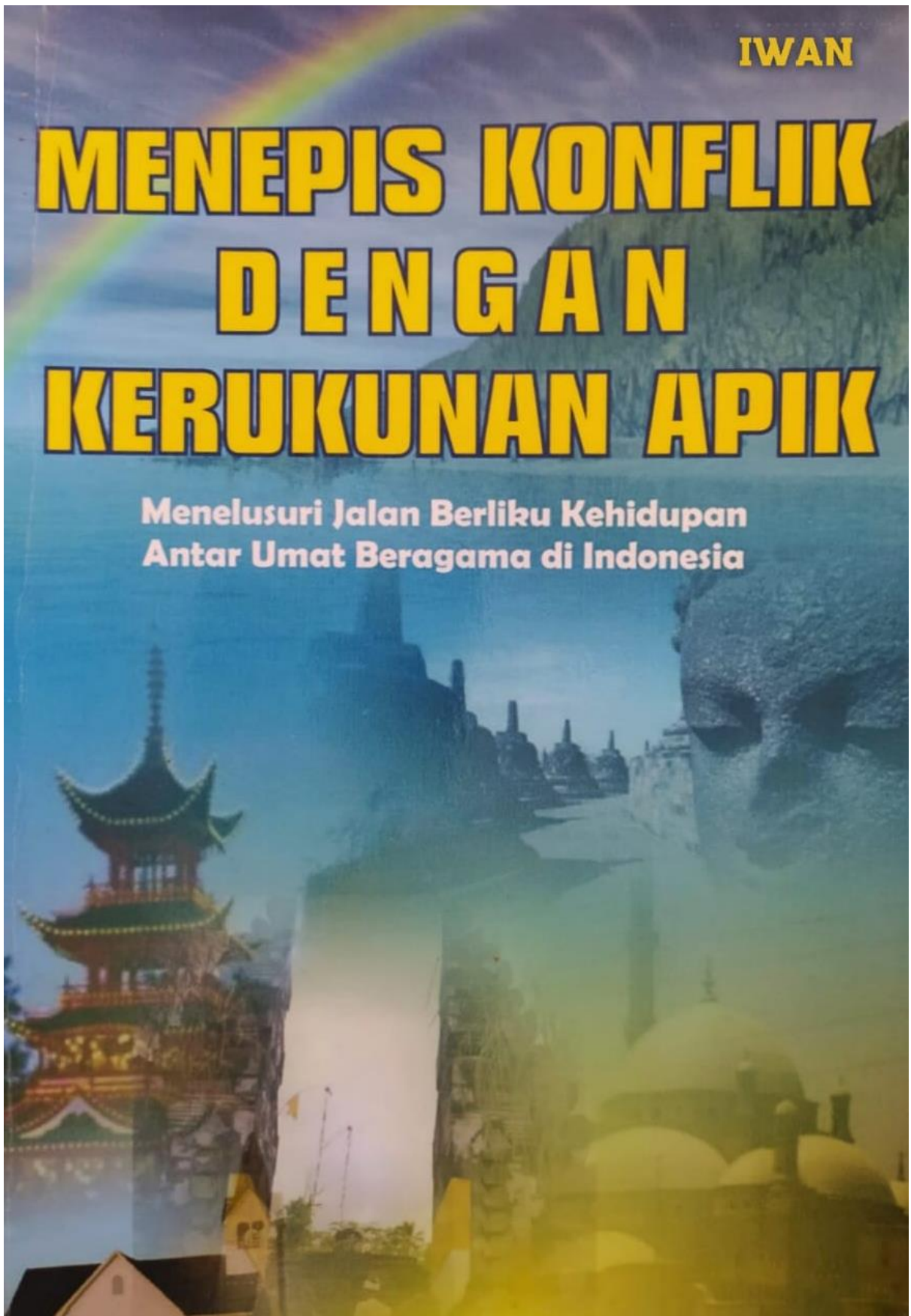


**IWAN**

# **MENEPIS KONFLIK DENGAN KERUKUNAN APIK**

**Menelusuri Jalan Berliku Kehidupan  
Antar Umat Beragama di Indonesia**



**MENEPIS KONFLIK DENGAN KERUKUNAN APIK;  
Menelusuri Jalan Berliku Kehidupan Antar Umat Beragama di Indonesia**

**Oleh :**

**I W A N, M. Ag.**

Penerbit : CV. Elsi Pro

**MENEPIS KONFLIK  
DENGAN KERUKUNAN APIK;  
Menelusuri Jalan Berliku Kehidupan  
Antar Umat Beragama di Indonesia**

Penulis : **I W A N, M. Ag.**

Diterbitkan oleh :  
CV. ELSI PRO  
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713

Penyunting : Marfuah Jamil, S.Ag  
Desain cover & layout : Irma Latifatuzakiah, S.Fil.I  
Percetakan : PUSTAKA ELSI  
Cetakan Pertama : Januari 2015

ISBN : 978-602-1091-20-3

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## SEKAPUR SIRIH

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT yang dengan kebaikannya menghantarkan penulis untuk menggoreskan pena dalam menelusuri salah satu pemikiran yang berkaitan dengan penelaahan agama, toleransi dan kerukunannya. Shalawat dan salam tak lupa ditujukan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang menjadi inspirator untuk menempuh kehidupan dan memaknai pengalaman beragama dengan siraman nilai yang toleran, rukun dan bervisi jauh dalam membangun sisi baik dinamika kemanusiaan dan keagamaan.

Kehadiran tulisan ini dilatari oleh sebuah fenomena kehidupan keagamaan yang menuntut sikap dan laku pemeluknya kearah yang humanis. Hidup beragama adalah pengalaman agama dalam hidup dan kehidupan umat manusia baik selaku individu maupun unsur sosial yang taat dan saleh serta berbudi luhur. Pengalaman tersebut tersebut tercermin baik secara pribadi maupun di dalam golongan maupun antar-golongan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian kerukunan hidup umat beragama umat beragama dapat diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang harmonis dan dalam pengalaman ajaran agama. Kerukunan akan mudah diwujudkan apabila ada persamaan dan kesamaan latar belakang sejarah, penderitaan, cita-cita dan keserasian dalam banyak hal. Sehubungan dengan itu sebagai agama yang menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta, Islam datang membawa ajaran toleransi yang sangat tinggi, menganjurkan mencari persamaan dan keserasian dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam Islam ada dua sumber pokok yang selalu dijadikan referensi utama oleh pemeluk agama Islam, jika mereka hendak memecahkan masalah kehidupan, baik yang menyangkut persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya lingkungan maupun menyangkut persoalan agama pada umumnya. Sumber rujukan tersebut tiada lain adalah al-Qur'an dan sejarah kehidupan Nabi yang diformulasikan dengan al-Hadits. Ada hubungan organik dan tarik menarik yang kuat antara kedua sumber tersebut, sehingga membentuk dinamika kehidupan beragama yang kokoh tetapi juga lentur. Selain dua sumber pokok dalam Islam tersebut, pada dataran praktek keagamaan umat Islam memiliki figur pertama Islam yang telah dengan santun memberikan praktek keagamaan yang konsekwen dan mencirikan seorang kepribadian yang luhur. Figur tersebut

tidak lain adalah adalah Muhammad, yang pada kondisi praktek keagamaan bersentuhan dengan masalah antar agama yang selalu menyikapinya dengan bijaksana dan meskipun disebut sebagai agama untuk seluruh alam, tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam secara paksa.

Untuk membumikan nilai kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin secara historis, maka konsep dan dinamika pemikiran seharusnya masuk melalui media pendidikan, baik secara formal-institusioanl atau berdimensi kehidupan sosial. Arah untuk menguatkan kerukunan antar umat beragama adalah dengan menambatkan dan mengencangkan nilai-nilai toleransi yang akan melingkupi berbagai kepentingan orang yang berbeda keyakinan dan kepentingan. Untuk itu maka pendidikan yang menenkan pada penanaman nilai toleransi bisa dimulai pada anak yang masih duduk dibangku tuntutan ilmu. Semoga sekilas tulisan ini bisa menjadi salah satu kerikil berharga dari sekian kerikil yang terbentang dalam sebuah hamparan gurun pasir, tak lupa saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis nantikan dari para pembaca yang budiman....

**Kuningan, Medio Januari 2015**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>SEKAPUR SIRIH</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>PROLOG</b> .....	vii
<b>BAB 1 BINGKAI HISTORIS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERGAMA DI INDONESIA</b> .....	<b>1</b>
A. Faktor Pendukung dan Kondisi Keberagamaan Masyarakat Indonesia.....	4
B. Hambatan Realisasi dan Jalan Berkelok Menyandingkan Sikap Rukun dan Toleran.....	15
C. Tinjauan Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Komunitas Pluralistik.....	23
<b>BAB 2 DESAIN DINAMIS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA</b> .....	<b>27</b>
A. Kebijakan dan Strategi Membina Kerukunan dalam Meneguhkan Berbangsa dan Bernegara.....	27
B. Mengunduh Asa dan Cita untuk Mewujudkan Nilai Kerukunan yang Humanis.....	35
C. Bergandengan Tangan Menuju Masyarakat Rukun dan Bersikap Tenggang Rasa.....	40
<b>BAB 3 POTRET KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA DALAM MENEMBUS ARUS PERUBAHAN SOSIAL</b> .....	<b>49</b>
A. Intensifikasi Media Dialog Antar Umat Beragama .....	49
B. Arah Baru yang Transformatif dari Formula Toleransi ke <i>Kooperasi</i> .....	65
C. Menelisik Sikap Toleransi Siswa yang di Belajarkan di Sekolah.....	75

<b>EPILOG.....</b>	<b>89</b>
<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>91</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>99</b>

## PROLOG

Ketika manusia berinteraksi dan beranggapan tentang segala aspek kosmologinya, maka tak akan lepas dari dimensi agama, baik manusia berdiri sebagai individu atau merupakan salah satu instrumen sosial. Sebagai sifat dasar manusia yang condong akan kehidupan kolektif ternyata agama sudah memberikan concern yang urgen dalam kehidupan tersebut. Apabila agama telah melahirkan banyak unsur yang esensial dalam masyarakat, maka tidak berlebihan kalau Durkheim menganggap agama sebagai roh masyarakat.<sup>1</sup> Dengan perubahan daya pikir dan khazanah intelektual manusia serta diiringi dengan perubahan secara ekologis dan kultural, agama dalam prakteknya berubah dari masa ke masa dan dari satu tempat ke tempat lain oleh semangat zaman dan warna lokal.<sup>2</sup>

Salah satu isu krusial sealur dengan mainstream modernitas dalam konteks keagamaan adalah perbedaan pemahaman keagamaan yang akan diwujudkan dengan sikap saling menyapa dalam keagamaan yang secara tidak langsung akan menemui arti kehidupan dalam plurarisme agama.<sup>3</sup> Dalam kehidupan modern, masalah plurarisme dapat dikatakan sebagai agenda kemanusiaan dan dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menimbulkan

---

<sup>1</sup>Emile Durkheim tentang “Dasar-Dasar Sosial Agama” dalam Roland Robertson (ed), *Sociology of Religion*, terj. Achmad Fedyani dan Saiffudin (Jakarta : Rajawali Press, 1988), h. 48. Relasi dominan yang kuat antara peran agama dan masyarakat tercermin juga dalam perspektif Durkheim yang mengungkapkan bahwa “the idea of society is the soul of the religion”, lebih lanjut baca Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religion Life* (New York : Macmillan Company, 1915), h. 419. Bandingkan juga : Emile Durkheim, “Society as Sacred” dalam Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (New York : Oxford University Press, 1996), h. 112.

<sup>2</sup>Spirit yang diemban oleh transformasi agama adalah progresifitas kehidupan, dengan kata lain bahwa manusia tidak bisa menampik ‘evolusi agama’ dan hal itu dikarenakan terjadi proses evolusi –sebagaimana dalam bidang lain – berupa, *pertama*; perubahan mendasar (mutasi) : wahyu baru, dogma baru. *Kedua*; Seleksi: mati, berkembang cepat atau lambat. *Ketiga*; kontak dan difusi (arus); migrasi, penaklukan dan alihan. *Keempat*; proses kebetulan yang terjadi dalam populasi kecil. Untuk selanjutnya baca: T. Jacob Tobing. “beberapa pikiran tentang agama pada abad XXI”, dalam tulisan Djam’annuri et.al (ed). *Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), h. 159-161.

<sup>3</sup>Pada konteks kekinian setidaknya fenomena pluralisme membawa tiga tema dan prinsip umum (1) pluralisme keagamaan dapat dipahami dengan paling baik dalam kaitan dengan sebuah logika yang melihat Satu (Tuhan) yang berwujud banyak – realitas transenden yang menggejala dalam bermacam-macam agama. (2) ada suatu pengakuan bersama mengenai kualitas pengalaman agama partikular sebagai alat, dan (3) Spiritualitas dikenal dan diabsahkan melalui pengenalan kriteria sendiri pada agama-agama lain. Harold Coward, *Pluralisme; Tantangan bagi Agama-agama*, terj. Kanisius (Yogyakarta : Kanisius, 1989), h. 169



konflik-konflik sosial.<sup>4</sup> Pencegahan implikasi negatif plurarisme adalah pengembangan adanya sikap arif dalam menerima plurarisme, kemudian mengembangkannya menjadi kekuatan sinergis dalam kehidupan masyarakat masa depan.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, plurarisme telah ada sejak dahulu dan hal ini buktikan dengan aneka agama yang ada di Indonesia, seperti Hindu, Budha dan berbagai kepercayaan rakyat yang biasanya disebut *animisme* dan *dinamisme*. Para ahli agama sering menggambarkan bahwa kraton-kraton kepulauan Indonesia pembicaraan mengenai berbagai agama oleh para tokoh agama merupakan *common sense* dalam kehidupan sehari-hari. Orang agak toleran terhadap agama masing-masing dan dapat saling membicarakannya tanpa prasangka dan ikatan emosional, namun sebagai *intellectual bounding* (Ikatan Intelektual).<sup>5</sup>

Hadirnya kekuatan dagang asing kemudian datang juga koloni dari Barat. Khususnya VOC (Vareenigde oost-Indiche compagnie/Perserikatan Maskapai Hindia Timur) membuat hubungan antar agama lebih kompleks.<sup>6</sup> Karena prinsip-prinsip yang mempengaruhinya di Eropa sedikit banyak tentu terbawa ke Indonesia. Dalam pluraritas agama sejak permulaan abad ke-19 sebagai akibat revolusi Perancis yang prinsip-prinsipnya secara politis

---

<sup>4</sup>Tabroni dan Syamsul Arifin, Islam, *Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan* (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), H. 34.

<sup>5</sup>Dalam dampak yang negatif bahwa sikap-sikap “inklusif” tersebut sering mengarah kepada fenomena sinkritisme, hal ini disebabkan oleh relasi komunikasi pada zaman lampau yang kurang lancar, baik karena sebab-sebab fisik maupun politis, seperti hadirnya kekuasaan Barat dan sebagainya. Hal itu juga disebabkan selalu terlihatnya- termasuk di kraton-kraton Jawa- adanya usaha-usaha dari para ulama atau agamawan lain untuk mengkoreksi sinkritisme dan menata kembali ke dalam kerangka ortodoksi masing-masing agama. Selanjutnya baca : Onghokham tentang “pluralisme agama dalam perspektif sejarah”, terangkum dalam kumpulan tulisan, Sumartana, dialog; Kritik dan identitas Agama (Yogyakarta: Interfidei, 1993), h. 174. Selanjutnya disebut Sumartana, Dialog; Kritik 1...

<sup>6</sup>Pada saat VOC menguasai pulau-pulau di Nusantara, sebagian fokus kepentingan VOC tertuju untuk mencari keuntungan komersial, sehingga penumbuhan agama Kristen tidak luar biasa. Tidak banyak perhatian yang sungguh-sungguh diberikan kepada orang-orang Kristen atau perluasan wilayah pengaruh Gereja Katolik di Indonesia. Pekerjaan VOC terutama adalah memimpin kebaktian dikalangan pemimpin yang memperkerjakan mereka atau di rumah para pedagang Eropa. Mereka lebih memperdulikan keamanan keuntungan komersial yang diraih daripada mengkonversikan orang-orang di Indonesia. Lebih lanjut baca : Alwi Shihab, *Membendung Arus; Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, terj. Ihsan Ali-Fauzi (Bandung : Mizan, 1998), h. 33.

menyebarkan ke Belanda, maka di koloni Belanda terdapat kemajemukan agama Kristen yaitu Protestan dan Katolik bahkan Yahudi pun diakui.<sup>7</sup>

Peranan kemajemukan agama pascakoloni, lebih banyak pada muatan-muatan politis. Sebuah kompromi politik dicapai pada tahun 1945 yang tercermin ketika M. Yamin dan Soekarno menawarkan lima prinsip yang disebut Pancasila dan di atas landasan tersebut negara didirikan.<sup>8</sup> Yang menjadi pokok dari pesan Pancasila bahwa negara didasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa yang setiap warga negara harus percaya dan mentaatinya. Prinsip-prinsip ini terutama tertuang dalam agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

Berpangkal dari plurarisme agama yang sarat diwarnai oleh ketegangan dalam masyarakat Indonesia, pemerintah merasa sangat penting untuk mengurangi ketegangan antar agama-agama. Gagasan tersebut untuk menumbuhkan kerukunan antar umat beragama yang harus diwujudkan oleh setiap agama, membina sikap *koeksistensi* dan *modus vivendi* serta saling menghargai antar umat beragama. Bentuk-bentuk kerukunan<sup>9</sup> beragama dapat dilaksanakan dengan media dialog, yang melibatkan antara kedua belah pihak atau agama-agama yang mempunyai kepentingan namun berbeda pandangan.<sup>10</sup>

Pada tahun 1967 pemerintah mendirikan Wadah Musyawarah Antar Agama<sup>11</sup>. Dengan institusi ini tercapai sebuah pertemuan penting pada tahun

---

<sup>7</sup>Sumartana, *Dialog; Kritik...* h. 178.

<sup>8</sup>Olaf Schumman, "Christian-Muslim Encounter in Indonesia", dalam kumpulan tulisan yang diedit oleh Yvone Haddad dan Wadi Z. Haddad, *Christian-Muslim Encounters* (Florida University Press, 1985), h. 289

<sup>9</sup>Kata kerukunan merupakan derivasi dari kata *rukun* dalam Arab, *rukun* (rukun), jamaknya *arkan* yang berarti : asas atau dasar. Kata rukun bisa bermakna dalam dua form, pertama; rukun (n-nomina) : 1) Sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya sesuatu pekerjaan. 2). Asas, berarti : dasar, sendi. *Kedua*; rukun (a-ajektiva): 1) Baik dan damai, tidak bertentangan. 2) bersatu hati, bersepakat. Merukunkan berarti 1) mendamaikan; 2) Menjadikan bersatu hati. Kerukunan : 1) perihal hidup rukun, 2) rasa rukun, kesepakatan : Kerukunan hidup bersama, Kata rukun (n) berarti perkumpulan yang berdasar tolong menolong dan persahabatan. Lebih lanjut baca : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h. 850.

<sup>10</sup>Burhanudin Daya, "Dialog Antar Agama", makalah yang disampaikan dalam Stadium General Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: 1997), h. 2.

<sup>11</sup>Paralelitas gerakan hubungan antar agama dunia telah pula memberikan inspirasi signifikan terhadap terkonstruksinya. Wadah Musyawarah Antar Agama ini. Hanya sebagai lintasan bahwa pada saat pra dan pasca kemerdekaan telah terbentuk juga lembaga atau badan hubungan antar agama dunia diantaranya *pertama*; the Internasional Association for Religious Freedom. *Kedua*; the World Congress of Faith yang diinspirasi oleh Sir Francis Younghusband dan didirikan pada tahun 1936. *Ketiga*; Temple of Understanding disponsori

1970 yang kemudian pada masa-masa berikutnya keputusan Menteri Agama nomor 77 dan nomor 78 tahun 1978 tentang petunjuk kegiatan penyebaran agama-agama. Untuk menambah keharmonisan antar umat beragama, pemerintah juga membentuk majelis agama-agama,<sup>12</sup> yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI-Protestan). Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI-Katolik), Parisadha Hindu Dharma Indonesia dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI).<sup>13</sup> Dalam dataran praktis agama-agama di Indonesia harus bisa mengembangkan trilogi kerukunan umat beragama yang berupa; kerukunan pemeluk inter agama, kerukunan pemeluk antar agama dan kerukunan pemeluk agama-agama dengan pemerintah.

Pada titik determinasi agama-agama, ternyata kerukunan antar umat beragama akan berhadapan dengan laju perubahan sosial di Indonesia.<sup>14</sup>

---

oleh Judith Hollistar, didirikan tahun 1960. Judo 1936. *Ketiga*; Temple of Understanding disponsori oleh Judith Hollistar, didirikan tahun 1960. Judo Purwowidagdo, "Indonesia : Living Together in a Majority Muslim Population" (Inggris : Concillium, 1994), no. 3, h. 25-6.

<sup>12</sup>Dalam upaya untuk membentuk hubungan yang baik dan bersahabat antar umat beragama-khususnya antara Islam dan Kristen- maka pemerintah mengusulkan dialog yang dilaksanakan untuk membentuk Majelis Konsultasi Antar Agama. Dalam majelis ini para pemimpin kelompok-kelompok agama akan bekerjasama dan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik agama-agama. Untuk sampai pada pembentukan Majelis Konsultasi Antar Agama ini, Menteri Agama telah membentuk Komite Antar Agama di Departemen Agama. Komite ini terdiri dari Inspektur Jenderal sebagai Ketua dan Direktur Jenderal dari kelima Agama tersebut sebagai anggotanya. Lebih lanjut baca : Saiful Muzani (ed), *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr Harum Basution* (Bandung : Mizan, 1996), h. 264.

<sup>13</sup>Esensi dari Keputusan Menteri tersebut mengandung beberapa poin yang signifikan dan strategis, *pertama*; aktifitas dakwah dan misi tidak boleh ditujukan kepada orang yang telah memeluk satu agama. *Kedua*; aktifitas dakwah dan misi tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak fair dan terselubung seperti dengan memanfaatkan 'jasa' makanan, pakaian, medis dan sebagainya untuk memberikan suport kepada seseorang agar konversi dari agamanya. *Ketiga*; aktivitas dakwah dan misi tidak boleh dilaksanakan melalui door to door. *Keempat*; dana yang berasal dari luar negeri, fasilitas dan sumberdaya manusia tidak harus didistribusikan untuk penggalangan invansi agama tanpa ada persetujuan pemerintah. Tarmidzi Taher, *Aspiring for the Middle Path Religious Harmony in Indonesia* (Jakarta: CENSIS, 1997), H. 41.

<sup>14</sup>Kompleksitas arus informasi dan era perpolitikan di belahan dunia lain yang semakin transparan begitu deras mengalir lewat media cetak dan eletronik berimbas terhadap persoalan antar agama. Belum lagi diskursus keagamaan yang mewarnai beberapa kawasan (India, Filipina, Bosnia, Irlandia, Mesir, Israil, bekas negara Uni Sovyet dan berbagai kawasan yang lain) cepat menyebar di tanah air dan dengan cepat pula merubah image hubungan antar pemeluk agama-agama di Indonesia. Arus informasi yang masuk lewat berbagai media cetak dan elektronik tersebut dengan bermacam pengaruhnya- khususnya yang menyangkut kerukunan hidup antar umat beragama- sebenarnya jauh dari kemampuan pemerintah untuk menanganinya. Kapasitas pemahaman individu dan kelompok yang lebih matang sangat dibutuhkan dalam merealisasi solusinya. M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.8.

Secara kultural masyarakat Indonesia-sebagaimana yang dipetakan oleh Nottingham-terbagi kepada tiga pola masyarakat.<sup>15</sup> *Pertama*; masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakralnya. *Kedua*; masyarakat pra industri yang sedang berkembang. *Ketiga*; masyarakat industri sekuler.

Masyarakat Indonesia termasuk dalam pola masyarakat pra industri dan sedang berkembang. Juga dengan faktor-faktor pendukung internal dan eksternal masyarakat Indonesia di lain pihak sedang mengalami fase transisional dari masyarakat pra industri memasuki masyarakat industri global modern.<sup>16</sup>

Dengan perpindahan gelombang satu kelainnya tersebut akan berakibat kepada spektrum tingkat perkembangan sosio-kultural Indonesia berupa krisis sosial dan itu juga mempengaruhi terhadap usaha-usaha dalam menggalang kerukunan antar umat beragama. Salah satu tawaran dari dialog kerukunan antar umat beragama dimasa depan-sebagaimana yang di alternasikan oleh Amin Abdullah- dengan meninjau ulang terhadap ideologi kerukunan.<sup>17</sup> Hal ini juga mengingat cara para penganut agama era agraris dan era industrial sangat berbeda kualitas sensitifitasi dan kuantitas tuntutannya.

Konsep-konsep kerukunan antar umat beragama pada saat sekarang lebih cenderung dengan cakupan struktural. Alternasi lain yaitu dengan

---

<sup>15</sup>Pada pola masyarakat terbelakang beranggapan bahwa agama memasukkan pengaruhnya yang sakral ke dalam sistem nilai masyarakat secara mutlak. Nilai-nilai keagamaan sering meningkatkan konservatisme dan menghalang-halangi perubahan, ini merupakan sebab yang penting sehingga kekuasaan tradisi sangat kuat dalam masyarakat ini. Dalam masyarakat pra-industri memungkinkan akan timbulnya ketegangan antara sistem nilai-nilai keagamaan dengan masyarakat secara keseluruhan, meskipun kecenderungan bagi agama untuk tenggelam dalam tradisi tetap ada. Dalam masyarakat ini agama bisa merupakan fokus potensial bagi munculnya pembaharuan yang kreatif dan juga chaos sosial. Sedangkan dalam pola masyarakat industri-sekuler pengaruh IPTEK terhadap agama mempunyai konsekwensi signifikan bagi agama, yaitu timbulnya sekularisme yang mempersempit ruang gerak kepercayaan-kepercayaan dan pengalaman-pengamalan keagamaan terbatas pada aspek-aspek yang lebih kecil dan bersifat khusus dalam kehidupan masyarakat dan anggota-anggotanya. Dengan aspek ini fungsi agama menjadi lemah sebagai pemersatu dan bahkan kekuatannya sebagai faktor disintegrasipun agak berkurang. Toleransi terhadap diferensiasi agama antara lain merupakan akibat dari ketidakacuhan dalam menghadapi pengaruh sistem nilai sekuler yang semakin berkembang. Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi*, terj. Machun Husein (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 51-59.

<sup>16</sup>Nurcholish Madjid, "Dorongan dan hambatan kultural bagi kerukunan beragama di Indonesia", tulisan ini diambil dari makalah yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Cendekiawan Antar Agama (Yogyakarta, 1996), h. 1.

<sup>17</sup>M. Amin Abdullah, "Anatomi kerukunan umat beragama tinjauan historis-ideologis", tulisan ini berupa makalah yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Cendekiawan Antar Agama (Yogyakarta, 1996), h. 4.

mengedepankan sebuah agenda keagamaan yang bercorak populis, sehingga gagasan kerukunan antar umat beragama merupakan nurani dan nuansa pemeluk agamanya masing-masing tanpa ada rekayasa dan paksaan dari pihak-pihak tertentu. Kerukunan kultural kiranya akan sangat bisa memberikan warna terhadap sensitifitas keberagaman dengan kebebasan pemeluk agama-agama yang merupakan ekspresi dari *religious experiencse*-nya. Disamping itu kerukunan sosial akan sangat berguna tatkala plurarisme agama berhadapan dengan perubahan masyarakat, yang disatu pihak akan menegasikan terhadap makna agama yang telah ada.

Buku ini mengkaji konsep antar umat beragama di Indonesia dengan diindikasikan berupa pluralisme agama, yang dari itu bisa ditarik beberapa konsep tentang kerukunan. Konsep kerukunan ini juga sebagai karakteristik khusus tentang kehidupan keagamaan di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara yang mempunyai kondisi yang hamper serupa. Periodisasi akademik pembahasan ini akan memfokuskan pada era pasca kemerdekaan, sampai masuk era pembangunan nasional atau orde baru serta tidak melepaskan unsure-unsur historitas tentang dialektika kerukunan sejak zaman colonial. Pembahasan tentang konsep kerukunan antar umat beragama akan dikhususkan dengan menggunakan tinjauan dan pendekatan sosiologis dan historis.

Buku ini akan mengungkapkan konsep-konsep kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang ternyata kita hanya bisa mengamati ternyata kita hanya bisa mengamati dalam bentuk kerukunannya saja, kurang bisa menangkap konsep yang utuh tentang yang utuh tentang hal dimaksud. Hal lain juga berkeinginan untuk mengkritisi tentang konsep kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang secara ontologis akan berpengaruh terhadap praktek keberagaman yang dilakukan oleh para pemeluk agama-agama di Indonesia. Kemudian untuk merespon perubahan dan kondisi sosial, maka dipandang perlu mencari alternatif konsep kerukunan antar umat beragama di Indonesia seiring dengan kondisi masyarakat yang dihadapkan pada era modern dan industri global.

Dengan membaca buku ini diharapkan pada dataran akademis ingin memberikan pengayaan wacana dan diskursus keilmuan dalam kajian hubungan antar agama, sedangkan pada dataran sosial buku ini mengetengahkan, *pertama*; ingin mendeskripsikan tentang kontribusi dari sebuah konsep kerukunan antar umat beragama khususnya kepada para elit agama dan umumnya kepada masyarakat Indonesia, sehingga akan menambah wawasan tentang kerukunan

antar umat beragama dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan beragama. *Kedua*; menjawab sebuah tantangan zaman dalam masyarakat Indonesia, melalui konsep kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang disesuaikan dengan kerukunan dan kebutuhan perubahan sosial. *Ketiga*; mencari kerukunan alternatif sesuai dengan perubahan sosial diakibatkan oleh adanya pergeseran masyarakat dari masyarakat agraris-primitif menuju masyarakat industri-modern.

Dalam membahas tentang konsep kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini, dengan menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam penelitian **sosial-budaya**, yakni gagasan, ide atau pemikiran yang dicanangkan oleh manusia baik secara individual atau komunal dikaji dan dikritisi. Setelah ada interaksi melalui skema verifikasi terhadap gagasan manusia itu maka akan tampak ide atau gagasan tersebut menjadi sebuah perbincangan interaktif dalam masyarakat.

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam pembahasan ini adalah *historis kritis* dan *sosiologis*. Beranjak bahwa dalam penelitian sejarah mempunyai lima tahap yaitu<sup>18</sup>, *pertama*; penelitian topik. Secara subyektif bahwa topik yang dibahas karena berdekatan secara emosional dengan lingkungan dan keinginan peneliti. Namun secara obyektif hal ini bisa diwujudkan dengan kapasitas peneliti untuk membedah penelitiannya. Konsep kerukunan antar umat beragama diupayakan dengan mengadakan penelaahan intensif sesuai dengan kapasitas sofiscated yang harus menyoroiti konsep kerukunan. *Kedua*; pengumpulan sumber. Dalam penelitian ini akan mengakumulasi data tentang berbagai konsep kerukunan antar umat beragama dari berbagai kalangan. Konsep kerukunan yang mencirikan kultural misalnya, direkam dari opini publik atau masyarakat pada umumnya, atau dalam dimensi struktural dapat diambil dari opini pemerintah. *Ketiga*; verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber). Konsep kerukunan antar umat beragama akan dikaji ulang sesuai dengan perkembangan sosial yang terus menerus berjalan. Pengkajian secara kritis terhadap munculnya sebuah konsep, aplikasi konsep dalam dataran praktis kemasyarakatan dan relevansinya dengan kondisi sosio-kultural pada saat sekarang adalah merupakan sebuah upaya kritik sejarah dan sekaligus menilai terhadap keabsahan terutama yang menyangkut konsep-konsep

---

<sup>18</sup>Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, cet.II. (Yogyakarta: Bentang, 1997), h. 39. Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer Suatu Pengalaman* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), h. 36-43.

kerukunan antar umat beragama dalam periode-periode tertentu. *Keempat*; interpretasi, merupakan tahap untuk memahami secara benar terhadap fakta, data dan gejala konsep kerukunan antar umat beragama,<sup>19</sup> baik dalam dataran teoritis atau pada dataran praktis dengan memperhatikan dan menganalisa bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. *Kelima*: penulisan atau penyajian. Sebagai tahap dokumentasi otentik maka dipandang penting dengan menjabarkan penelitian historis melalui bentuk-bentuk yang dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya yang diwujudkan dengan penulisan atau media lainnya.

Dalam pendekatan sosiologis, penelitian ini menyoroti sebuah pola interaksi sosial pemeluk agama-agama. Pengamatan terhadap interaksi sosial tersebut dapat berupa, mempelajari pola-pola perilaku penganut agama-agama di kota dan desa, pola hubungan antar umat beragama, perilaku penganut agama-agama dalam organisasi ekonomi, perilaku toleransi beragama penganut agama-agama yang terdidik, hubungan perilaku toleransi beragama dan perilaku kebangsaan, hubungan perilaku keagamaan dengan etos ilmu pengetahuan, hubungan solidaritas keagamaan dengan solidaritas nasional dan lainnya.

Untuk mengadakan polarisasi kerukunan antar umat beragama, maka diadakan metode *tipologi*<sup>20</sup>, dengan mengadakan klasifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerukunan sehingga akan dapat dilihat beberapa pola kerukunan antar umat beragama dengan kecenderungannya masing-masing.<sup>21</sup> Sejalan dengan polarisasi kerukunan tersebut akan ditinjau juga perbandingan pola-pola kerukunan, sehingga metoda komparasi akan sangat membantu dalam penelitian ini.<sup>22</sup> Disamping itu akan membandingkan juga konsep-konsep

---

<sup>19</sup>Lebih lanjut mengenai pengertian fakta, data dan gejala baca: CA. Van Persen, *Susunan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 96.

<sup>20</sup>Tipologi adalah metode yang oleh banyak ahli sosiologi dianggap obyektif berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, lalu dibandingkan dengan topik dan tema yang mempunyai tipe yang sama. Pendekatan ini digunakan oleh sarjana-sarjana Barat untuk memahami ilmu-ilmu manusia. lebih lanjut baca: A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), h.37.

<sup>21</sup>A. Mukti Ali, "metodologi penelitian agama" dalam kumpulan tulisan : Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), h.51.

<sup>22</sup>Metode komparatif akan melakukan eksplorasi atau menganalisis terhadap datum atau kategori yang muncul selalu dilakukan dengan cara membandingkan satu sama lain. Dengan analisis komparatif tidak perlu dibayangkan bahwa lokasi penelitian harus luas dan berserak-serak karena analisis komparatif dapat digunakan segala ukuran unit sosial. Prinsip kerja analisis komparatif berupa : pertama; membandingkan setiap datum untuk memunculkan berbagai kategori. Kedua; memperbandingkan dan mengintegrasikan kategori-kategori dan

kerukunan yang datang dari berbagai kalangan atau aspek yang menunjang lahirnya konsep tersebut.

---

sifat-sifat untuk memunculkan hipotesis dan memberi batasan teori. M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 52. Bandingkan dengan tulisan Anton Baker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 50.



# **BAB 1**

## **BINGKAI HISTORIS**

### **KERUKUNAN ANTAR UMAT BERGAMA DI INDONESIA**

Literatur-literatur tentang pembahasan serupa yang menyangkut tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia, baik itu dalam wacana gagasan atau bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat, telah banyak para ahli agama yang mem bahas nya. Diantara literatur yang mendekati terhadap pembahasan ini misalnya tentang tulisan Alwi Shihab. *Membendung Arus; Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998. Tulisan ini merupakan disertasi Alwi Shihab ketika menyelesaikan proses akhir studinya di Universitas Temple, Amerika Serikat. Pembahasan yang dikedepankan berupa kupasan dan ulasan secara integral tentang gerakan misionarisme yang dilakukan oleh umat Kristen. Penetrasi misi Kristen tersebut kemudian direspon oleh gerakan-gerakan Muhammadiyah dengan aktifitas-aktifitas yang sebelumnya boleh dikatakan, belum ada dalam gerakan-gerakan organisasi Islam lainnya. Ragam respon itu misalnya, dalam bidang pendidikan dipergunakan secara klasikal dengan memasukan pelajaran umum serta sistem belajar mengajar yang terprogram. Dibidang pemeliharaan kesehatan dengan memperkenalkan cara-cara pemeliharaan kesehatan secara modern, mendirikan rumah sakit dan poliklinik, dan sebagainya. Tulisan ini sangat memfokuskan terhadap dominasi peran dan gerakan Muhammadiyah dan itu memang diakui sebagai kontribusi besar untuk membendung arus misionarisme dalam masyarakat Islam Indonesia.

Yang belum tersentuh dalam wacana ini adalah gerakan-gerakan Muhammadiyah seharusnya bukan hanya menanggulangi terhadap gerakan-gerakan negatif agama lain, namun lebih dari itu seharusnya diberikan ulasan-ulasan tentang hidup dalam kerukunan dan kedamaian, serta mengedepankan kebutuhan aspek sosial dan budaya sehingga Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang mampu mengembangkan sikap toleransi dan bisa merajut kooperasi dengan agama lain yang berbeda.

Literatur yang juga bisa dijadikan pijakan dalam penelitian ini bisa dilihat dalam Mustoha et. al (peny.) *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1997. Tulisan ini merupakan kegiatan komplikasi teologi atau ajaran agama yang ada di

Indonesia, dengan memfokuskan kepada pedoman umat masing-masing agama mengenai kerukunan hidup penduduk Indonesia yang majemuk dalam adat istiadat, kultur dan agama. Lebih jauh bahwa tulisan ini merupakan upaya kompilasi rumusan teologi/ajaran agama masing-masing oleh Majelis-majelis agama di Indonesia dengan fokus pada pedoman mengenai kerukunan komunitas-komunitas keagamaan dalam kehidupan mereka sebagai penduduk dan warga negara Republik Indonesia. Jadi sama sekali bukan merumuskan teologi baru/ajaran baru agama karena hal itu sudah ada prosedurnya dalam masing-masing agama. Pemikiran dan pandangan yang berkenaan dengan kerukunan yang ditampilkan dalam wacana ini sangat bersifat teologis, sehingga belum ada sebuah formula yang bisa dijadikan sebagai parameter dalam bentuk kerukunan yang bisa membina kerjasama dan mengadakan dialog sosial antar agama di Indonesia.

Literatur lainnya adalah Greg Berton. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo Modernisme, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta : Paramadina, 1999. Greg Berton mencoba memaparkan segenap analisisnya tentang tokoh-tokoh Islam yang berpikir secara liberal, diantara pemikir yang banyak memberikan visi konstruktif dalam dialog agama-agama adalah Djohan Effendi yang menekankan terwujudnya teologi kerukunan yang dimaksudkan sebagai suatu pandangan keagamaan yang tidak bersifat memonopoli kebenaran dan keselamatan, suatu pandangan keagamaan yang didasarkan atas kesadaran bahwa agama sebagai ajaran kebenaran tidak pernah tertangkap dan terungkap oleh manusia secara penuh dan utuh dan bahwa keagamaan seseorang pada umumnya lebih merupakan produk atau setidaknya pengaruh lingkungan. Berkenaan dengan skala peran pihak mayoritas dan minoritas, Djohan Effendi memandang penting adanya revitalisasi dialog antar umat beragama.

Pemikiran yang diusung oleh Djohan Effendi ini belum mencoba untuk mengadakan sebuah wacana prediktif dalam kerjasama antar umat beragama dalam arus perubahan sosial, sehingga langkah dan tantangan kerukunan beragama pada saat berikutnya akan menemui sebuah nuansa yang bisa berperan dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial. Tampaknya dialog yang diusulkannya juga hanya bersifat struktural dan intelektual, hal itu karena kerukunan akan bisa seimbang kalau diperankan oleh lembaga struktural misalnya Departemen Agama Maka hal ini tidak bisa

menjangkau umat agama di tingkat awam dan jauh pengalaman keagamaan yang lebih intelek dan informatif.

Elga Sarapung et.al. *Pengalaman, Kesaksian dan Refleksi Kehidupan Mahasiswa di Yogyakarta: Hasil Penelitian Tentang Hubungan Antaretnis dan Antariman di Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta*. Yogyakarta : Interfidei, 1999. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan tentang penelusuran kehidupan keagamaan secara geografis dan yang dijadikan obyek penelitian tulisan ini adalah daerah Yogyakarta. Hubungan antar etnis dan antar agama di daerah ini memunculkan citra bahwa Yogyakarta dan plurarisme bisa memungkinkan wacana baru bagi hubungan keduanya. Setiap orang harus hidup bersama di masyarakat yang sama, yang tidak mungkin untuk mengisolasi kelompok lain yang juga memiliki hak untuk hidup. Satu-satunya jalan untuk bisa meneruskan kehidupan adalah dengan cara tidak memaksakan wacananya sendiri terhadap orang lain. Dalam hasil akhir penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa di daerah Yogyakarta tidak terdapat petunjuk ekstrim ke arah konflik sosial, begitu pula tidak ada indikasi yang sangat besar untuk mengharapkan Yogyakarta bisa menjadi kekuatan pembaruan dalam dialog antar agama dan antar etnis.

Karena penelitian ini mengambil sebagian besar obyek penelitiannya adalah mahasiswa yang notabene adalah kaum intelektual, maka penelitian ini sarat dengan muatan akademik, sehingga belum dijadikan patokan bahwa pengalaman keagamaan yang akan berimplikasi dalam plurarisme agama dan etnis akan berlaku juga pada masyarakat yang kurang terpelajar dan berada dalam stratifikasi sosial yang rendah. Kemudian penelitian ini terlalu diukurkan pada skala geografis tertentu, sehingga keadaan pada daerah yang dianggap aman –Yogyakarta- dari konflik belum tentu berlaku untuk daerah lain.

Olaf Schumman, *Dialog Antar Umat Beragama; Di Manakah Kita Berada Kini?* Jakarta : LPS Dewan Gereja- gereja di Indonesia, 1980. Kilasan yang diberikan oleh Olaf Schumman ini beranjak dari kehidupan keagamaan yang berada di wilayah Asia Tenggara. Urgensi Tinjauannya dalam kerukunan antar umat beragama telah menyoroti dalam berbagai aspek seperti sosial, politik dan ideologi. Fokus kajiannya ditujukan kepada dua agama besar yaitu Islam dan Kristen yang dianggap bisa mewakili dalam memberikan bentuk kerukunan dalam kehidupan keagamaan. Dalam kerjasama antar umat beragama di Indonesia, telah dibentuk Interreligious Cooperation for Community Organization (ICCO), yang merupakan organisasi setempat yang

diselenggarakan oleh orang-orang Protestan, Katolik dan Muslim. Motivasinya adalah untuk menangani secara langsung kebutuhan-kebutuhan manusiawi.

Bentuk kerjasama yang dijalin oleh kedua agama ini sangat konstruktif dan menguntungkan, namun adanya niat baik tersebut belum dibarengi dengan pensosialisasian ke wilayah-wilayah lain di Nusantara terutama daerah-daerah yang jauh dari informasi tentang kehidupan kerukunan beragama. Sebagaimana diketahui bahwa kerjasama yang dijalin baru merambah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan lainnya. Imbas dari itu akan menampakkan sebuah pemahaman yang berbeda antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam memahami arti kerukunan dan lebih jauh dari itu tentang kerjasama antar umat beragama.

Diantara poin penting yang belum terjamah dalam literatur-literatur tersebut yaitu sebuah upaya untuk mengklasifikasikan konsep kerukunan yang ada di Indonesia. Lebih dari itu belum ada pemikiran yang riil tentang konsep kerukunan antar umat beragama yang dapat diimplementasikan sebagai respon terhadap perubahan pola dan interaksi masyarakat yang semakin pudar dari sendi-sendi agama. Pada pembahasan ini akan mengungkap sebuah alternatif kerukunan antar umat beragama dari yang berpola agraris ke dalam pola masyarakat industri modern.

## **A. Faktor Pendukung dan Kondisi Keberagamaan Masyarakat Indonesia**

Manusia pada konteks kekinian mempunyai kekuatan untuk membentuk masa depan mereka dibanding sebelumnya. asalkan mereka memelihara masa depan mereka lewat komitmen bersama dalam tanggungjawab dan usaha yang dilakukan dalam spirit kolektif-konstruktif. Hal ini yang baru sekarang adalah kesalingbergantungan bangsa-bangsa yang semakin lebar dan dalam<sup>1</sup> kesalingbergantungan ini bukan saja dalam kerangka hubungan bangsa-bangsa dan ekonomi yang tidak bisa dilepaskan, namun juga masyarakatnya, tradisi, agama dan budaya.

Dalam lingkup kepercayaan agama, orang-orang dari tradisi agama yang berbeda tidak lagi hidup terpisah, namun selalu berinteraksi. Oleh karena itu timbullah kebutuhan untuk membuat hubungan tersebut *meaningfull* dan konstruktif. Problematika kita sekarang tidak hanya pemahaman kita tentang kebenaran, tetapi juga hubungan kita satu sama lainnya. Kerjasama antar agama

---

<sup>1</sup>Alwi Sihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung : Mizan 1997), h. 346. Selanjutnya akan disebut Alwi Shihab, *Islam Inklusif ...*

telah mendapat sambutan baik, tetapi kekerasan antar agama masih menguntit di belakang kita.

Tradisi-tradisi keagamaan dunia masih dapat menyediakan bahan untuk mengobarkan perselisihan di seluruh dunia.

Meski tensi dan konflik tersebut tidak sepenuhnya berasal dari agama, agama menjadikannya lebih rumit lewat penggunaan bahasa religius yang ekstensif. Dengan demikian relasi yang konfrontatif antar orang-orang yang berbeda-beda agama di dunia sekarang ini merupakan salah satu fakta yang paling patut disayangkan. Salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah membangun fondasi yang kukuh bagi “*take and give dialogue*” satu sama lain yang didasarkan pada menghargai perbedaan.

Karena itu kita diberi sebuah beban dan menanggung tugas suci bagi komunitas beragama untuk menyatukan orang-orang dari berbagai agama dan untuk membicarakan kepentingan orang banyak daripada membicarakan mimpi sebagian kecilnya. Termasuk dalam agama-agama besar – Islam, Kristen dan Yahudi- teraktualisasi sebuah tugas yang mulia yaitu sebagai *mediator* atau “penengah” antara berbagai kelompok manusia dan diharapkan untuk menjadi saksi yang adil dan jujur dalam hubungan antar kelompok tersebut<sup>2</sup>. Hanya jika kita membantu menarik masyarakat yang berbeda tradisi agama lebih dekat satu sama lain dan menggantikan ketidakacuan dan perselisihan (baca : permusuhan) dengan persahabatan dan persaudaraan sejati, maka kita akan berhasil mengurangi tingkat kesengsaraan manusia yang ada di dunia kita sekarang ini.

Indonesia sebagai negara keempat dalam jumlah penduduk dan keenam dalam luas wilayah, disifati oleh tradisi plurarisme yang luar biasa dan tidak dapat dipungkiri lagi, sehingga agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen hidup dengan harmonis. Dengan adanya karakter mosaik latar belakang kultur Indonesia, rakyat Indonesia hidup dengan takaran kerukunan dan harmonisasi yang hangat<sup>3</sup>. Dengan kerangka konseptual seperti ini maka komunitas agama yang ada di Indonesia diidealisasikan untuk menjunjung dan menciptakan komunitas religius (beriman).

Dalam menggalang harmonisasi antar insan yang berbeda iman, komunitas beriman harus bisa memberikan pandangan yang apresiatif terhadap hal-hal yang sensitifitasnya yang tinggi dalam persentuhannya dengan agama.

---

<sup>2</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta : Paramadina, 1992), h. 190.

<sup>3</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*, h. 348.

Dengan ini maka komunitas beriman dapat melihat bahwa pembatasan relatif terhadap penyebaran satu agama tidak pernah menyulitkan orang-orang yang beriman, namun soal ini jelas tidak muncul pada masa-masa ketika citra manusia tentang dunia tidak terbatas dan ketika pencegahan usaha penyebaran itu belum pernah dialami.

Dan jika sikap orang yang beriman tidak berubah sesudahnya, ketika pencegahan ini tampak jelas, ini membuktikan secara positif bahwa agama-agama ortodoks menawarkan nilai-nilai intrinsik yang tidak dapat dibatalkan oleh kemungkinan duniawi manapun dan secara negatif bahwa pendapat yang telah ditetapkan dan kurangnya imajinasi membentuk sebagian dari sifat manusia<sup>4</sup>. Beralih dari menganut satu agama ke agama lain bukan hanya mengubah konsep-konsep dan sarana-sarana ruhaniah, melainkan juga mengubah sekumpulan perasaan yang lain. Dengan adanya perasaan muncullah pembatasan-pembatasan, batas perasaan yang melingkupi setiap agama dalam sejarah membuktikan dengan caranya sendiri batasan-batasan dari seluruh eksoterisme dan akibatnya batasan-batasan dari statemen-statemen eksotik<sup>5</sup>.

Dalam konteks ke-Indonesia-an pluralitas agama-agama menyiratkan sebagai keberhasilan yang tertopang oleh ideologi negara yaitu Pancasila. Indonesia bukan negara teokrasi, bukan pula negara sekuler.<sup>6</sup> Hal ini karena

---

<sup>4</sup>Frithjof Schuon (Muhammad Isa Nuruddin), *Islam dan Filsafat Perennial*, terj. Rahmani Astuti (Bandung : Mizan, 1993), h. 27. Bandingkan dengan Komaruddin Hidayat dan Muhammad W. Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Parennial* (Jakarta : Paramadina, 1995), h. 6.

<sup>5</sup>Esoteris (*Esoteric*); hal-hal yang hanya boleh diketahui dan dilakukan beberapa orang saja dari suatu kelompok penganut paham tertentu. Esoteris (*exoteric*) hal-hal yang boleh diketahui dan dilakukan oleh semua anggota kelompok penganut paham tertentu. Schuon memberikan deskripsi tentang eksoterisme ini yang langsung berhubungan dengan eksistensi faktor “dalam” dan “luar” agama. Relasi antara keduanya dibatasi oleh garis pemisah, sehingga kita akan segera merasakan bahwa kita berada dalam suasana yang lain. Perbedaan dasar bukanlah antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dapat dikatakan, garis bersatu bersatu ditingkat tertinggi sedangkan di tingkat bawahnya berbagai agama itu terpecah-pecah. Frithjof Schuon (Muhammad Isa Nuruddin), *Mencari Titik Temu Agama-agama*, terj. Saifroedin Bahar (Jakarta : Yayasan Obor 1996), hx. Bandingkan juga tentang tulisan Frithjof Schuon: “Unity Among Religions and Temperamental Casts”, dalam Walter H. Carps, *Religious Studies The Making of a Discipline* (Minneapolis : Fortress Press, 1995), h. 304.

<sup>6</sup>Gagasan yang menawan dengan disertai sebuah kajian intelektualistik yang berhadapan dengan relasi antara nilai filosofis dasar negara –Pancasila-- dengan hubungan antar agama dikupas tuntas oleh Djohan Effendi. Argumentasi yang dilontarkan karena Pancasila merupakan pilihan tepat untuk iklim Indonesia. Dalam mencari ideologi negara, bangsa Indonesia dapat berjalan dalam dua arah, negara dan agama atau sepenuhnya sekuler. Secara jelas, salah satu nilai kebaikan Pancasila yaitu mampu melakukan pemilihan perangkat-perangkat agama dan negara. Kebaikan ini dapat digambarkan sebagai hal yang preventif;

Pancasila mengandung nilai-nilai spiritual berbagai agama di Indonesia, begitu juga demokrasi dan kemanusiaan. Indonesia dengan Pancasila menetapkan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya itu.

Mengingat realitas bahwa Islam adalah agama mayoritas, tidak perlu dikatakan lagi bahwa nilai universalitas dan pandangan pluralistis telah banyak mengkontribusi terhadap pembentukan falsafah hidup Indonesia *vis a vis* agama-agama lainnya. Kesantunan budaya muslim Indonesia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari ajaran Al-Qur'an yang memerintahkan orang beriman untuk saling menerima satu sama lain atas dasar kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa<sup>7</sup>. Toleransi dan pemahaman muslim Indonesia juga diilhami oleh Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Meski ada semacam impresi positif tentang kebebasan dalam mengapresiasi pluralitas agama-agama, namun kaum muslim tidak diberikan posisi untuk mendiskusikan keragaman dalam bidang *ushul al-din*, karena masalahnya sudah sedemikian jelas dan pasti.<sup>9</sup> Kebebasan hanya diberikan

---

menawarkan jalan keluar dan mencegah untuk memilih antara dua hal yang buruk. Kemudian Pancasila mampu memberi sesuatu yang positif dengan cara memberikan struktur jati-diri Indonesia yang non-sektarian, di mana hal ini memberi deskripsi terbaik dari variasi tradisi, Greg Berton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq (Jakarta : Paramadina, 1999), h. 237. Selanjutnya disebut Greg Berton, *Gagasan Islam Liberal ...*

<sup>7</sup>Katakanlah : “Hal ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak persekutuan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka : “Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (kepada Allah)”, ayat 3 : 64. *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1988), h. 86. Selanjutnya akan disebut al Qur'an dan terjemahannya...

<sup>8</sup>“Untukmu agamamu dan untukku agamaku”, ayat 109 : 6. *Al Qur'an dan Terjemahannya...*

<sup>9</sup>Bila masalah yang dicakup itu dalam bidang *ijma'* yang bukan merupakan bagian dari *ushl al-din*, walaupun penolakannya tidak mengakibatkan kekufuran, namun kedudukannya tidak jauh berbeda dengan kedudukan *ushul*. Di sini umat berkewajiban melakukan usaha dan langkah-langkah kongkret guna membentengi diri dan membendung tersebar luasnya paham-paham tersebut. Di sini kebebasan beragama tidak dapat dijadikan dalih, karena disamping arti “kebebasan” ini tidak mencakup juga karena berkewajiban pemeliharaan kemurnian agama mempunyai kedudukan yang melebihi bahkan bertentangan dengan kilah kebebasan tersebut. Bahkan dalam rangka pemeliharaan agama serta stabilitas sosial, yang merupakan tumpuan harapan agama dan masyarakat, agaknya tidak berlebihan apabila satu masyarakat yang telah menganut satu paham, yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip agama-agama, mengambil langkah-langkah tertentu guna membendung tersebar luasnya paham-paham yang tidak sejalan dengan paham masyarakat tersebut. Ini tentunya dilakukan

dalam bidang-bidang *'furu*, karena argumentasinya bersifat *zhanny*. Kebebasan ini dibenarkan karena kesalahan yang mungkin saja dilakukan oleh seseorang yang berwenang untuk itu, masih : dibenarkan” oleh agama, bahkan diberi pahala oleh Allah.

Al-Qur'an juga mengesahkan adanya masyarakat pluralistik yang di dalamnya masyarakat yang berbeda-beda agama bisa hidup berdampingan, dalam sikap saling menerima dan kreatif jauh melebihi toleransi semata. Yang tak kalah menariknya adalah statemen eksklusivisme yang tidak sesuai dengan wawasan khazanah dunia Islam.<sup>10</sup> Sesuai dengan penyangkalan yang tegas terhadap eksklusivisme, Al-Qur'an secara berulang kali mengakui adanya manusia-manusia yang saleh di dalam kaum-kaum tersebut – Yahudi, Kristen dan Sabi'in-seperti pengakuannya terhadap adanya manusia-manusia yang beriman dalam Islam.<sup>11</sup>

Sudah pasti logika dari pengakuan kebajikan universal ini dengan kepercayaan kepada Allah dan Hari Kiamat sebagai persyaratannya agar kaum muslimin diakui sebagai salah satu dari kaum-kaum lainnya.<sup>12</sup> Di sini agaknya Al-Qur'an memberikan sebuah jawaban yang final sehubungan dengan masalah-masalah dunia yang terdiri dari multi kaum. Atas dasar ini maka kitab suci umat Islam mengakui realitas tentang banyaknya jalan yang dapat

---

tanpa mengeluarkan kelompok yang tidak sepaham itu dari komunitas muslim selama mereka menganut *ushul al-din* M. Quraih Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1992), h. 368.

<sup>10</sup>Berkenaan dengan ini al Qur'an menyatakan : “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang”, ayat 5 : 48. *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 168.

<sup>11</sup>Orang-orang yang beriman (orang-orang muslim), orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dan orang-orang Sabi'in- yang percaya kepada Allah dan Hari Kiamat serta melakukan amal kebajikan dan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka, tidak ada sesuatu pun yang harus mereka kuatirkan dan mereka akan berduka”, ayat 5 : 69. *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 172.

<sup>12</sup>Mayoritas komentator-komentator muslim dengan sia-sia telah berusaha untuk tidak menerima maksud yang jelas sekali dinyatakan dari ayat tersebut; bahwa orang-orang – dari kaum yang mana pun juga- yang mempercayai Allah dan Hari Kiamat serta melakukan amal kebajikan akan memperoleh keselamatan. Komentator-komantator tersebut mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan orang-orang Yahudi, Kristen dan Sabi'in di dalam ayat-ayat tersebut adalah orang-orang Yahudi, Kristen dan Sabi'in yang telah masuk Islam. Interpretasi ini jelas menyalahi karena seperti yang telah tersebut di dalam ayat tersebut; orang-orang muslim adalah yang pertama diantara empat kelompok. Lebih lanjut baca : Fazlur Rahman, *Tema Pokok al Qur'an* , terj. Anas Mahyudin (Bandung : Pustaka 1996), h. 239



ditempuh umat manusia.<sup>13</sup> Mereka diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan<sup>14</sup>, kesemuanya demi terciptanya fondasi kedamaian<sup>15</sup> dan kerukunan.

Dengan demikian manfaat positif dari keanekaan agama-agama dan kaum-kaum ini adalah agar mereka saling berlomba di dalam kebajikan dimana setelah menyatakan perubahan kiblat dari Yerusalem ke Mekkah, Al-Qur'an menandakan bahwa kiblat itu sendiri sebenarnya tidak penting, namun yang lebih penting itu adalah kesalehan dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Kepada kaum Muslim sendiri walaupun mereka dimuliakan sebagai "kaum Penengah"<sup>16</sup> dan "Sebaik-baiknya kaum yang diciptakan untuk umat manusia"<sup>17</sup> tidak diberikan jaminan bahwa mereka adalah kaum yang dikasihi Allah kecuali jika memperoleh kekuasaan di atas dunia mereka menegakkan shalat, berusaha meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin, menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan<sup>18</sup> dan sebagainya.

Perdamaian dan kerukunan yang didambakan Islam bukanlah yang bersifat semua, tetapi yang memberi rasa aman pada jiwa setiap insan. Karena itu langkah pertama yang dilakukannya adalah merwujudkannya dalam jiwa setiap pribadi. Setelah itu melangkah kepada unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Dari sini ia beralih ke masyarakat luas, seterusnya kepada

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudnu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1997), h. 380.

<sup>14</sup>"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat) kebajikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu", ayat 2 : 148. *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 38.

<sup>15</sup>"Allah memberikan petunjuk melalui wahyu-Nya siapa yang mengikuti keridhaan-Nya dengan menelusuri jalan-jalan kedamaian", ayat 5 : 16. *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 161.

<sup>16</sup>"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rosul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menjadikan kiblat kamu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rosul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindaha kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia", ayat 2 : 143. *Al Qur'an dan terjemahannya...*, h. 36.

<sup>17</sup>"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik", ayat 3 : 110. *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 94.

<sup>18</sup>"Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, 'Ad dan Tsamud", 22 : 4. *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 511.

seluruh bangsa di permukaan bumi ini dan dengan demikian dapat tercipta perdamaian dunia dan dapat terwujud hubungan harmonis serta toleransi dengan semua pihak.

Dukungan secara teologis tersebut sangat memberikan corak tersendiri bagi umat Islam dalam mendinamisasi kerukunan antar agama di Indonesia sehingga timbul sebuah wahana harmonisasi hubungan antar umat beragama begitu juga terbangun sebuah relasi kuat antar agama dengan pemerintah. Hal ini bisa dilihat ketika *rule of game* kerukunan ditelurkan oleh pemerintah pada tahun 1979 nomor I lewat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada lembaga Keagamaan di Indonesia.<sup>19</sup>

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama ini, maka Pelaksanaan Pedoman Penyiaran Agama menjadi tanggungjawab dan tugas baik Departemen Agama maupun aparat Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,<sup>20</sup> serta merupakan pedoman bagi seluruh aparat pemerintah/negara yang dalam pelaksanaan tugasnya berhubungan dengan masalah keagamaan.<sup>21</sup>

Secara teologis dan kultural ternyata pandangan-pandangan dari agama-agama lain (selain Islam), juga banyak memberikan warna dinamis, terlebih kalau kita berpikir secara hirarkis-kuantitatif, dimana mayoritas pada level kedua masyarakat Indonesia menganut agama Kristen. Garansi teologis dari Kristen Protestan memberikan sebuah pola kerukunan yang integratif

---

<sup>19</sup>Karel Steenbrink, "Muslim-Christian Relations in the Pancasila State of Indonesia", USA : The Muslim Word, Vol. LXXXVIII, No. 3-4 (July-October 1998), h. 332.

<sup>20</sup>Mustoha, et.al. (penyt.), *Bingkai Teologi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1997), 42. Selanjutnya akan disebut : Mustoha, *Bingkai...*

<sup>21</sup>Dalam SKB tersebut antara lain disebutkan bahwa : *pertama*; Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama antar umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya. *Kedua*; penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok yang telah memeluk /menganut agama antara lain dengan cara : 1). Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain berpindah memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut. 2). Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain. 3) Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain. Lebih lanjut telaah : Sudjangi (penyt.), *Pembinaan Kerukunan Antar Hidup Umat Beragama 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1996), h. 22. Selanjutnya akan disebut : Sudjangi, pembinaan kerukunan ...

dalam mewujudkan media kerukunan, bahwa kerukunan baru mengandung semangat kolektifitas dan kekeluargaan yang sangat menghargai diferensiasi, namun tanpa pembeda-bedaan (*diskriminasi*), tanpa pemilah-milahan (*segregasi*) dan tanpa pemisah-misahan (*apartheid*)<sup>22</sup>.

Lebih jauh bahwa kerukunan harus tidak menisbiskan perbedaan-bedaan yang ada dan dilain pihak tidak mengabsolutkan perbedaan-bedaan yang ada sehingga akan mengancam dan menutup gerbang hubungan. Kerukunan yang kondusif keagamaannya bisa dirasakan membawa kebangkitan iman penganutnya seharusnya bukan sekedar perhitungan untung-rugi yang bersifat sosiologis-pragmatis, namun ia harus lahir sebagai ekspresi iman, sebagai tindakan iman. Hal ini berarti mempunyai makna ganda : *pertama*, ketaatan iman kepada Tuhan harus dinyatakan melalui sikap yang tulus dan terbuka dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang beragama dan kepercayaan lain. *Kedua*, hubungan dengan yang “beriman” lain hanya bisa dilakukan dengan ketaatan iman kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kerukunan beragama yang otentik yaitu semangat kerukunan yang lahir dari iman dan keyakinan agamawi seseorang.

Spirit kerukunan tidak sedikit pun mengurangi semangat misioner, seperti halnya kerukunan beragama tidak harus dipertentangkan dengan kebebasan dan amanat Tuhan untuk mengasihimu,<sup>23</sup> yang biasa dikenal sebagai perintah agung tidak perlu dipertentangkan dengan amanat Tuhan yang sama untuk bersaksi dan memberitahukan Injil.<sup>24</sup> Secara simplistis dapat dikatakan bahwa kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kerukunan hidup beragama dan begitu juga sebaliknya.

Dalam pandangan Kristen Katolik bahwa semangat kerukunan lebih memberikan suatu pesan historis-teologis yang bertopang dari Konsili Vatikan II mengenai hidup religius saudara-saudari beriman lain.<sup>25</sup> Statemen tersebut terkompilasi dalam dokumen-dokumen seperti dalam *Lumen Gentium (LG)*, konstitusi dramatis mengenai Gereja<sup>26</sup>; dalam *Ad Gentes (AG)*, dekret tentang

---

<sup>22</sup>Mustoha, *Bingkai...* h. 82.

<sup>23</sup>*Mathius*, 22 : 37-40.

<sup>24</sup>*Mathius*, 28 : 19-20

<sup>25</sup>FX. E. Armanda Riyanto, CM, *Dialog Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), h. 33. Selanjutnya disebut Armanda Riyanto, *Dialog Agama...*

<sup>26</sup>Istilah Gereja berasal dari kata Portugis “greye” yang melalui kata Yunani “Ecclesia” artinya ke luar. Maksudnya jemaat yang dipanggil ke luar dari dunia untuk menjadi milik Tuhan. Banyak ungkapan yang dibuat oleh para teolog Kristen untuk menjelaskan pengertian gereja. Bible sendiri tidak mengenal istilah gereja, sementara para teolog membuat

kegiatan misioner Gereja; dalam *Dignitaris Humance (DH)*, pernyataan tentang kebebasan beragama; dalam *Nostra Aetate (NA)*, pernyataan mengenai hubungan Gereja dengan saudara-saudari bukan Kristiani dan dalam *Gaudium et Spes (GS)*, konstitusi pastoral mengenai Gereja dalam dunia modern. Sejak rumusan Konsili Vatikan II ini secara lebih nyata panggilan untuk berdialog semakin menjadi penting dalam hidup beragama.

Dalam agama Hindu ada sebuah pandangan teologis yang berasal dari Regveda yang berbunyi : *Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti*, yang berarti “Disebut dengan ribuan nama yang berbeda, namun satu adanya”. Sejak zaman Regveda sudah ditekankan bahwa nama dan cara mencapai ketuhanan bisa berbeda namun yang dituju adalah *Satu*. Dengan dasar teologis ini maka kita mengelaborasi sketsa kehidupan sosiologis -- di mana kalau di Indonesia yang merupakan “negeri” umat Hindu yaitu Bali -- dapat memberikan penilaian yang positif terhadap bentuk kerukunan yang terjalin. Hal itu disebabkan adanya pertautan yang mutualistik antara berbagai agama yang berbasis dari pandangan teologisnya. Umat dari berbagai agama dapat hidup berdampingan di satu desa, malah di beberapa desa tertentu mereka betul-betul membaur satu sama lainnya<sup>27</sup>. Karena baiknya kekerabatan antar umat beragama di Bali, tidak jarang umat Islam bersedia ikut bergotong-royong membantu tetangganya beragama Hindu dalam membuat tempat persembahyangan dan demikian sebaliknya.

Beranjak dari teologi kerukunan yang dikumandangkan oleh pemerintah – trilogi Kerukunan – dengan mengusung peningkatan moral, etik dan akhlak maka kita senantiasa mempunyai pengharapan yang positif terhadap peranan nilai-nilai kerukunan. Moral, etik dan akhlak dalam Budha disebut *Sila* yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Manifestasi dalam merealisasi kerukunan beragama dalam Budha diwarnai oleh pengamalan sifat-

---

rumusan yang didasarkan pada ungkapan surat-surat Paulus. Dokumen tertua yang menyebut istilah *eclessia* adalah naskah pengakuan (kredo) “*Symbolum Apostilicum*” yang diduga berasal dari sekitar abad kedua Masehi. Dalam naskah itu kata gereja diletakkan sesudah pengakuan terhadap roh kudus. Naskah latin menyebutkan “*et in spiritusactno, sanctam eclessiam*”. Naskah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus” menurut versi Protestan, sedang terjemahan versi Katolik berbunyi “gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus”. Achmad Mubarok, *Perbandingan Agama Islam dan Kristen; Studi Tentang Sakramen Gereja* (Bandung : Pustaka, 1985), h. 1.

<sup>27</sup>I Ketut Nehen, “Kerukunan Umat Beragama di daerah Bali”, dalam antropologi makalah dari Seminar Nasional Cendekiawan Antaragama, yang mengambil tema “Anatomi Kerukunan Umat Beragama”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama, Yogyakarta, tanggal 16 Januari 1996, h. 5.

sifat “**Paramita**”, yaitu sifat-sifat luhur Paramita merupakan faktor yang sangat penting bagi umat Budha untuk mencapai kesucian.<sup>28</sup> Dengan tercapainya kesucian bathin menjadi jaminan bagi umat Budha untuk mewujudkan kebahagiaan umat beragama yang rukun.

Sebagai pra syarat dalam mendukung kerukunan ini, juga harus mengedepankan saling menghormati dalam hidup bersama.<sup>29</sup> Dengan demikian bukan mustahil apabila pada saat seseorang mengikuti suatu agama tertentu kemudian ia pun memberikan kepada guru agama lain, ibarat seorang anak yang pasti akan menghormati orangtuanya sendiri, tidaklah salah kiranya apabila ia menghormati pula orang tua temannya. Penghormatan itu bukanlah sama sekali membuat anak itu menjadi anak orangtua temannya atau anak itu tidak lagi mengakui orangtua kandungnya.

Agama Budha mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bagi kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menurut Sang Budha berkembangnya perpecahan dan hancurnya kerukunan, persatuan dan kesatuan mengakibatkan pertentangan dan pertengkaran karena orang tidak menyadari

---

<sup>28</sup>Sifat-sifat luhur (Paramita) yaitu : *Pertama, Dana Paramita* yaitu sifat-sifat luhur yang ada di dalam hati nurani setiap manusia yaitu dorongan untuk beramal, berkorban, membantu orang lain dan sikap sosial lainnya. *Kedua, Sila Paramita* yaitu sifat-sifat luhur yang senantiasa mendorong setiap manusia untuk selalu berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang bermoral. *Ketiga, Nekhma Paramita* yaitu sifat-sifat luhur yang senantiasa memberikan dorongan kepada manusia untuk menghindarkan diri dari nafsu-nafsu indera yang rendah. *Keempat, Panna Paramita* yaitu sifat-sifat luhur yang senantiasa memberikan dorongan kepada manusia untuk selalu bersikap bijaksana baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan. *Kelima, Viriya Paramita* yaitu sifat-sifat yang luhur yang senantiasa memberikan dorongan kepada manusia untuk senantiasa bekerja giat, aktif, kreatif dan inovatif menghadapi tantangan zaman modern yang penuh dengan pergeseran nilai. *Keenam, Khanti Paramita* yaitu sifat-sifat luhur yang senantiasa memberikan dorongan kepada manusia supaya memiliki ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. *Ketujuh, Sacca Paramita* yaitu sifat-sifat luhur yang senantiasa memberikan dorongan kepada manusia untuk selalu mengembangkan kebenaran baik dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. *Kedelapan, Adhitthana* yaitu sifat-sifat luhur yang berupa tekad yang mantap untuk memutuskan sesuatu dengan tepat dan pada waktunya. *Kesembilan, Metta Paramita*, yaitu sifat-sifat luhur cinta kasih tanpa keinginan untuk memiliki. *Kesepuluh, Upekkha Paramita* yaitu sifat-sifat luhur yang memberikan dorongan kepada manusia agar memiliki batin yang tidak tergoyahkan oleh rangsangan nafsu. Lebih rinci baca : Mustoha, *Bingkai...*, h. 152.

<sup>29</sup>Bikhu Jotidhammo, “Kerukunan Umat Beragama Tinjauan Historis Ideologis Agama Budha”, dalam antologi makalah dari Seminar Nasional Cendekiawan Antaragama, yang mengambil tema “Anatomi Kerukunan Umat Beragama”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama, Yogyakarta, tanggal 16 Januari 1996, h. 3.

akibatnya. Jika orang menyadari bahwa akibat dari pertentangan atau pertikaian itu adalah kemusnahan maka mestinya mereka berdamai kembali.

Sehubungan dengan ini maka pada masa pembangunan, umat Budha Indonesia hendaknya selalu menjadikan ajaran-ajaran Sang Budha sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>30</sup>; guna mewujudkan kerukunan hidup beragama Sang Budha selalu mengajarkan agar melaksanakan asas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, sehingga perkembangan dan kelestarian hidup suatu bangsa dapat terwujud dalam suasana kerukunan dan damai.

Untuk menciptakan sebuah kerangka koseptual dan praktikal hembusan kerukunan beragama, maka kita seharusnya secara jeli mengamati beberapa aspek atau faktor yang dapat memungkinkan terlaksananya media kerukunan beragama tersebut. Dengan faktor ini kita akan berupaya untuk bisa mensketsa progresifitas dan kualitas kerukunan.<sup>31</sup>

Faktor yang bisa mengkondusifkan aktualisasi kerukunan diantaranya:

- i. Pada prinsipnya semua agama ingin mensejahterakan para pemeluknya, secara universal agama ingin menolong orang-orang miskin dan teraniaya. Persamaan pandangan tersebut memungkinkan berbagai agama dapat bekerjasama untuk melaksanakan aktifitas dalam rangka penanggulangan kemiskinan atau kegiatan.
- ii. Agama-agama di Indonesia bersedia mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif, mau menerima dan menghargai kehadiran golongan agama-agama lain di luar dirinya.
- iii. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat Indonesia meredam pertentangan antar agama yang berbeda.
- iv. Dalam masyarakat secara tradisional ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terinstitusionalisasikan untuk memelihara ketertiban masyarakat walaupun berbeda agama.
- v. Berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat didukung oleh semua pemuka agama.
- vi. Adanya dampak positif dari globalisasi, informasi dan ekonomi, wawasan keberagaman masyarakat semakin meningkatkan dan luas, juga adanya

---

<sup>30</sup>Mustoha, *Bingkai...*, h. 156.

<sup>31</sup>Sudjangi, *Pembinaan Kerukunan...*, h. 25.

kemudahan bagi pemeluk agama untuk mendapatkan pengetahuan dari media informasi yang beraneka.

## **B. Hambatan Realisasi dan Jalan Berkelok Menyandingkan Sikap Rukun dan Toleran**

Untuk menemukan sebuah figura kemanusiaan dalam mengembangkan koseptualisasi kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang sarat dengan berbagai perubahan, memang diakui sangat tidak mudah. Apalagi bila apa yang ditawarkan itu sesuatu yang menurut sebagian orang terasa asing. Dari kilasan sejarah dan peristiwa hubungan antar agama-agama di Indonesia, realita melontarkan sebuah fakta bahwa untuk mengkontruksikan sebuah bentuk kerukunan yang bisa diterima oleh banyak komunitas beragama tidaklah seperti kita membalikkan telapak tangan kadar kemudahannya. Sehingga langkah-langkah konflik dan konfrontasi antar agama tak ayal menjadi fenomena sejarah yang tidak bisa dihapus dalam setiap benak pemeluk agama yang terlibat.

Kita dapat menyaksikan bahwa ketika Indonesia mencapai gerbang kemerdekaan, suasana saling tidak percaya belum semuanya berhasil dibersihkan. Sebagai sebuah gerakan keagamaan yang tidak terlepas dari akar teologinya, maka yang paling mewarnai dari beberapa konflik yang ada lebih tertuju kepada dua agama yang sama-sama punya kewajiban untuk tersiarnya agama mereka.<sup>32</sup> Islam dan Kristen mempunyai karakter untuk tetap mengeksiskan orientasi religiusitasnya dengan menjalankan *dakwah* (Islam) dan *misi* (Kristen), sedangkan dengan agama yang *non-mission* (Hindu dan Budha) kekerapan terjadinya tensi agama agaknya hanya merupakan letupan-letupan kecil dan segera bisa dicarikan solusinya.

Tak pelak lagi kalau kita menelaah tentag harmonisasi dan ketegangan antara umat beragama agaknya kedua agama ini bisa dijadikan sebagai parameternya. Sehingga seorang ahli agama, Muller Kruger, melayangkan analisisnya bahwa pelayanan perahu gereja di Indonesia akan terus berjalan tanpa henti mencapai tujuannya yang makin lama makin berlawanan dengan

---

<sup>32</sup>Imbas tersebut tercium oleh media Barat dan pers asing lainnya sehingga banyak yang melansir secara dramatis tentang pengkonversian masyarakat agama di Indonesia ke dalam agama tertentu. Sehingga pada tahun 1960-an pemerintah berusaha untuk membuat regulasi yang mentidakbolehkan penyiaran agama ditujukan kepada penganut yang telah memeluk agama tertentu. Selanjutnya baca : Byron L. Haines dan Frank L Cooley (ed.), *Christians and Muslims Together An Exploration by Presbyterians* (Pennsylvania : The Geneva Press Phidelphia, 1987), h. 82.

Islam.<sup>33</sup> Gereja menghadapi tugasnya yang paling hebat, menghadapi islam, agama yang paling kuat setelah Kristen.

Perjumpaan yang konfrontatif antara berbagai agama ini tidak seharusnya diwariskan kepada generasi yang akan datang, Hindu, Budha, Kristen dan Islam sudah menjadi agama pribumi di tanah air Indonesia. Walaupun jumlah masing-masing penganut jauh berbeda, namun penilaian nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah sama. Yang harus dipikirkan adalah apa yang sesungguhnya menjadi kewajiban kita untuk melakukannya, yaitu mewujudkan suatu kepedulian bersama sebagai manusia-manusia beragama untuk menghadapi dan memecahkan segala permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat. Kita juga harus membuat sebuah jaringan yang solid yang akan mempunyai dampak terhadap hubungan Islam dan Kristen tidak lagi eksklusif melainkan akan merambah jalan yang sangat baru dan damai yaitu dengan mewujudkan toleransi. Ambisi dan emosi menjanging penganut baru yang berasal dari umat penganut agama lain yang sudah sama-sama hidup berdampingan dengan kita, sudah saatnya ditekan.

Dalam menggalang sebuah konstruksi kerukunan yang lebih sepeham dan sependirian kiranya jauh sebelum itu kita harus mengenal atau paling tidak mengetahui faktor-faktor yang bisa membuat stagnasi kerukunan umat beragama.

Dengan ini kita akan mendesain sebuah rekayasa model kerukunan yang impelementatif dan senantiasa akan menerima fleksibilitas untuk merespon kemajuan zaman. Hambatan-hambatan dalam merajut tali kerukunan antar umat beragama dapat ditinjau dari beberapa aspek :

### **1. Superioritas teologi agama-agama**

Sebuah ekspetasi dari pesan agama-agama dalam menjalin dan meningkatkan harmoni antar umatnya ternyata harus menjumpai sebuah diskursus teologis. Dalam lingkungan internal agama-agama yang ada, Islam, Kristen, Hindu dan Budha masih memberikan sebuah penekanan permasalahan kepada *truth claim* (klaim kebenaran).<sup>34</sup>

Jika *truth claim* hanya terbatas pada aspek ontologis-metafisis, barangkali tak perlu dirisaukan, namun yang terjadi sebaliknya yaitu *truth claim*

---

<sup>33</sup>Djam'annuri, et. al.(ed.), *Agama dan Masyarakat 70 Tahun A. Mukti Ali* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), h. 478. Selanjutnya disebut Djam'annuri et. al. (ed.), *Agama dan Masyarakat...*

<sup>34</sup>M. Amin Abdullah, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1999), h. 48. Selanjutnya disebut M. Amin Abdullah, *Studi Agama...*



memasuki wilayah sosio-politik yang praktis-empiris. Studi orientalisme yang mempelajari agama-agama di Timur berujung pada dominasi dan hegemoni Barat terhadap Timur, tulis Edward W. Said.<sup>35</sup> Ketercampuran truth claim dalam aspek wilayah praktis dan empiris sering menjebak kepada makna truth claim yang tidak pada porsinya, karena ketika dimunculkan isu tentang truth claim maka akan membawa sebuah suara kepentingan praktis dari sebuah pihak yang berkepentingan tersebut. Selanjutnya sebagai implikasi logisnya akan terjadi penyelewengan otoritas truth claim terhadap wilayah kajiannya.

Sedangkan Islam yang memasuki wilayah sosio-politik saat ini lebih dianggap sebagai “momok” yang menakutkan bagi Barat, ketimbang sebagai agama yang perlu dihormati karena konsepsi-konsepsinya yang luhur dalam memecahkan kesulitan manusia sekarang. Tampaknya bila perbincangan *truth claim* tercampur dengan politik praktis, maka harapan-harapan besar terhadap peran agama dalam mengatasi problem dunia kini makin surut untuk diimplementasikan.

Teologi bukanlah agama, sehingga teologi tidak lebih merupakan akal pikiran manusia sesuai dengan waktu dan situasi sosial yang ada. Itulah yang melatarbelakangi munculnya Mu'tazilah, Asy'ariyah, Karl Barth, Paul Tillich, Martin Burber dan lainnya.<sup>36</sup> Rumusan teologi terkait dengan ruang dan waktu; tingkat pengetahuan manusia dan situasi politik saat itu. Meski sumbernya kitab suci, namun teologi bisa saja mengalami kesalahan (*fallible*). Karena itu ia dapat berubah-ubah rumusannya sesuai tantangan zaman.

Dalam dataran persentuhan agama-agama di Indonesia, ternyata *truth claim* merupakan salah satu faktor yang bisa memperlambat roda kerukunan. Hal itu bisa dilihat dalam kasus hubungan Islam-Kristen dimana pandangan universal tentang petunjuk Tuhan serta merta dikaburkan oleh perilaku umat Kristen dan Islam karena perspektif absolutisme akan klaim kebenaran tersebut.<sup>37</sup> Dorongan oleh ambisi-ambisi politis, teologis dan duniawi, baik Islam maupun Kristen telah mengorbankan universalitas kebenaran atas agama. Kebenaran dengan demikian telah dipungkiri universalitasnya, masing-masing berlomba atau satu sama lain di bawah bendera agama terakhir untuk umat manusia.

---

<sup>35</sup>Edward W. Said, *Orientalism* (New York : Pantheon, 1978), h. 239.

<sup>36</sup>M. Amin Abdullah, *Studi Agama...*, h. 49.

<sup>37</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*, h. 97

Klaim kebenaran ini juga antara lain menjadi justifikasi gerakan-gerakan penyebaran. Logikanya ialah : jika memang yang dipegang itu adalah kebenaran dan kebenaran tentu akan membawa kebaikan maka apakah tidak justru merupakan kewajiban moral seseorang untuk menyampaikan dan menyebarkan kebenaran itu kepada orang lain? Jika klaim kebenaran ini diperparah oleh perbedaan antar agama atau dengan kata lain malah dengan perbedaan antar agama lebih memperbesar cenderung klaim kebenaran, maka apakah penemuan titik-titik kesamaan antar agama tidak harus diusahakan dengan sungguh-sungguh agar dengan begitu tumbuh pengakuan kenisbian (relativisme) antar agama, khususnya dari segi bentuk-bentuk lahiriah?<sup>38</sup> Kiranya toleransi agama hanya akan tumbuh di atas dasar paham kenisbian bentuk-bentuk formal agama dan pengakuan bersama akan kemutlakan suatu nilai universal yang mengena pada setiap manusia, yang kiranya merupakan inti setiap agama.

Sebagai penganut agama, manusia tak dapat mengetepikan hubungan antara kitab suci dan *truth claim*. Tanpa adanya *truth claim* yang oleh Whitehead disebut dogma atau oleh Fazlur Rahman disebut normatif (*transcendental aspect*), maka agama sebagai bentuk kehidupan yang *distinctive* tak akan punya kekuatan simbolik yang menarik pengikutnya.<sup>39</sup> Whitehead menyimpulkan bahwa baik dalam agama maupun ilmu pengetahuan, *truth claim* yang terbungkus dogma adalah sah. Dogma dalam agama merumuskan kebenaran pengalaman beragama, sedang dogma dalam ilmu pengetahuan mengungkapkan kebenaran pengamatan rasional.

Masih dalam koridor dikursus teologi bahwa ada kekaburan makna yang dihasilkan dari polemik teologi itu sendiri dengan *kalam* –lebih bermakna dalam kajian agama Islam. Para teolog dan ahli kalam telah “memecah belah” umat dari kesatuannya. Topik-topik yang diangkat dalam polemik agama –

---

<sup>38</sup>Tidak selamanya kita memberikan penilaian yang *pejoratif* pada agama karena banyak juga pemikir yang tidak memihak pendapat bahwa sebegitu jauh ajaran-ajaran kemanusiaan dari agama-agamalah yang paling efektif diikuti orang serta paling luas pula jangkauan pengaruhnya, baik ruang maupun waktu. Sebegitu jauh sebagian besar umat manusia masih secara efektif diatur perikehidupannya, terutama yang bersifat inti. Oleh ajaran-ajaran agama. Malahan tokoh-tokoh humanis terkenal yang mengingkari makna Tuhan masih menjadikan agama-agama sebagai tempat kemungkinan mencari nilai-nilai kemanusiaan yang benar-benar universal. Nurcholish Madjid, *Pikiran-pikiran Nurcholish 'Muda'; Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan, 1996) h. 238.

<sup>39</sup>Fazlur Rahman “Approach to Islam in Religious Studies : Review Essays”, dalam Richard C. Martin (ed.) *Approaches to Islam in Religious Studies* (Tucson : The University of Arizona Press, 1985), h. 194.

khususnya Islam- Kristen- lebih banyak berorientasi pada kekaburan daripada menuju ke titik kejelasan.<sup>40</sup> Mereka berpolemik tentang berbagai masalah yang tunggal, namun dengan kata-kata yang bermacam-macam.

Faktor mendasar yang melatarbelakangi dalam polemik ini karena masing-masing berposisi pada sudut pandangnya, tidak berusaha untuk mengadakan obyektifikasi permasalahan, sehingga yang timbul adalah klaim *kesendirian kebenaran* tanpa ada langkah-langkah kompromis dan saling pengertian.

## **2. Pengaruh dimensi Sosio-kultural**

Aktor penggerak dalam menjalin kerukunan antar umat beragama sering sangat menentukan terhadap hasil yang dipetik. Oleh karena itu faktor manusia sebagai subyek yang mengimplementasikan dan mempraktekan konsepsi-konsepsi religius ikut memberikan kontribusi yang signifikan. Dengan ini maka adanya kesalahan yang diakibatkan oleh *human error* dapat memasung terhadap perkembangan dimensi kerukunan. Hambatan yang berasal dari dimensi sosio kultural dengan manusia sebagai unsur pokoknya yang memegang peranan, bisa berupa :

- a) Dalam mendinamisir kerukunan ketidakcukupan pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar dan seimbang akan menyebabkan kurangnya penghargaan dan sekaligus akan mudah memunculkan sikap-sikap curiga yang berlebihan
- b) Perbedaan kebudayaan karena tingkat pendidikan yang tidak sama; juga masalah bahasa yang sangat peka dalam kelompok-kelompok tertentu.<sup>41</sup>
- c) Merasa diri cukup atau paling sempurna, sehingga memunculkan sikap-sikap defensif dan agresif.
- d) Kurang yakin terhadap nilai-nilai dialog dan mempunyai kecenderungan berpolemik bila mengungkapkan gagasannya.
- e) Permasalahan-permasalahan kontemporer seperti tumbuhnya materialisme, sekularisme, sikap apatis dalam beragama dan banyak sekte-sekte dalam agama banyak menimbulkan persoalan-persoalan tertentu yang lebih kompleks.

---

<sup>40</sup>Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran; Dialog Kreatif dan Kemanusiaan*, terj. (Surabaya : Risalah Gusti, 1997), h. 136. Selanjutnya disebut Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi*

<sup>41</sup>Armanda Riyanto, *Dialog Agama...*, h. 117

- f) Sikap yang tidak toleran yang seringkali dipegang oleh faktor lain; politik, etnis, ekonomi, ras dan sebagainya.

Faktor lain yang mengimbasi terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh subyek kerukunan adalah adanya *dosa historis* yang ditimpakan kepada generasi agama-agama sesudahnya yang berasal dari sebuah fakta historis pada masa lampau dan seharusnya dosa historis bisa dikikis oleh penganut agama-agama pada masa sesudahnya.<sup>42</sup> Kadang-kadang malah persoalan yang berimbas tersebut pada awalnya bukan merupakan persoalan yang berakar dari agama, sehingga misalnya ketika agama Kristen lahir, eksis dan berkembang di Indonesia, akan selalu dikaitkan oleh penganut agama lain dengan konotasi negatif karena mempunyai kesamaan yang identik dengan penjajah, padahal asumsi itu seharusnya diklarifikasikan dengan pendekatan intelektual, bukan penyudutan emosional.

Aspek lain yang ikut menentukan hambatan secara sosio-kultural disebabkan oleh keterasingan kultural, karena pada dasarnya peradaban dan kebudayaan mempunyai ciri yang berbeda, namun masing-masing punya sejarah yang tunggal. Peradaban berhubungan dengan pemikiran.<sup>43</sup> Keterasingan kultural akan mengakibatkan deskripsi dua metode yang berbeda dalam kehidupan, disamping itu akan juga menyebabkan adanya dua pola pikir yang berbeda. Kekosongan yang melintasi hubungan agama-agama telah mencapai batas yang menakjubkan, yaitu refleksi kemampuan manusia untuk bertetangga dengan sesama saudaranya sepanjang abad yang cukup lama, tanpa harus paham akan ideloginya atau tidak harus mengenai faktor keabadiannya.

### **3. Pengaruh dominasi peran politik dan negara**

Imbas besar dari peran politik dan negara yang menyelimuti kerukunan antar agama menghasilkan sebongkah keretakan dalam realisasi kerukunan yang sudah terbangun selama ini. Dalam konteks keindonesiaan ternyata asumsi politik dan peran negara sangat kuat dan dominan. Ada yang mensinyalir bahwa kerukunan yang ditampilkan dengan *frame* politik telah mengalami kegagalan<sup>44</sup>, hal itu disebabkan :

- a) Negara telah salah persepsi mengenai identitas keagamaan dan kesukuan sehingga yang dilakukannya bukan sebuah pencairan

---

<sup>42</sup>*Ibid.* h. 119.

<sup>43</sup>Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi...*, h. 133

<sup>44</sup>Elga Serapung et. al., *Pengalaman, Kesaksian dan Refleksi Kehidupan Mahasiswa di Yogyakarta; Hasil Penelitian Tentang Hubungan Antaretnis dan Antariman di Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta* (Yogyakarta : Interfidei, 1999), h. 8.

konsep agama dan identitas yang bisa membuatnya inklusif bagi dialog, namun justru pembekuan dan pembakuan konsep tersebut dengan membuatnya menjadi lebih eksklusif.

- b) Negara juga telah salah persepsi mengenai konsep kebhinekaan dalam kesatuan dengan antara lain menerjemahkannya menjadi kerukunan yang dalam praktik kultural tertentu lebih cenderung mengarah pada pembungkaman terhadap perbedaan.
- c) Negara/pemerintah lebih memahami identitas agama dan etnis beserta hubungan antar etnis dan antar agama lebih pada level kolektif institusional sehingga yang disebutnya kerukunan cukup antar pemimpin agama atau antar pemimpin etnis sebagai wakil komunitas yang bersangkutan.
- d) Negara pada saat tertentu lebih obsesif untuk mewujudkan “mimpinya” mengenai keberhasilan pembangunan, untuk sesegera mungkin menjadi negara yang sejajar dengan negara lain yang lebih maju. Sehingga jargon yang digembar-gemgorkan berupa “stabilitas yang dinamis” lebih cenderung diartikan sebagai stabilitas sosial-politik-kultural dan dinamika ekonomi, bukan stabilitas dan dinamika seluruh aspek kehidupan secara sekaligus.

#### **4. Pertemuan geografis dan kesenjangan peradaban**

Agama-agama yang dikemudian hari bersentuhan dan mengalami perjumpaan, pada awalnya mereka berasal dari wilayah yang berbeda. sebagaimana diketahui, Islam dan Kristen, sebagai misal, lahir di jazirah Arab (Islam) yang sebagian penduduknya beragama Kristen, sedangkan mayoritas negara yang dijangkau Islam pada umumnya menampilkan gambaran global Kristen, namun pada sebagian menampilkan gambaran-gambaran yang parsial.<sup>45</sup> Dengan meluasnya Islam secara cepat, maka terjadilah proses pemisahan penuh, antara Kristen dengan gereja Kristen. Islam mengatur negara, namun juga memberikan kemudahan terhadap gereja dan menjamin kelestariannya. Namun pada saat yang sama kehadiran Islam menjadi alternatif teologis yang orisinil bagi ajaran Kristen. Kristen sendiri melihat adanya ancaman dari ekspansi, eksplorasi dan kehidupan Islam yang heroik. Hal inilah yang memaksa Kristen pindah ke laut tengah.

Di samping itu Islam dan Kristen muncul dengan peradaban yang berbeda dengan lingkungan dan zaman yang berbeda. Kedua peradaban tersebut

---

<sup>45</sup>Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi...*, h. 126.

yang mengakibatkan timbulnya permusuhan yang tidak sekedar dilatari oleh perbedaannya belaka, namun juga adanya kesenjangan antar kedua belah pihak.<sup>46</sup> Dengan demikian sebenarnya kedua peradaban itu tidak saling berintegrasi, dan senantiasa menjadi cita-cita yang dipantulkan di masa depan.

## 5. Mispersepsi nilai-nilai dasar religius dan ambivalensi misionarisme

Kerukunan antar umat beragama yang diharuskan membawa pengaruh positif untuk penganut masing-masing agama harus berpijak dari pemahaman tentang nilai-nilai dasar keagamaan yang selalu menjadi rujukan bagi setiap agama. Sehingga penting sekali untuk bersikap kritis terhadap dirinya masing-masing dan lebih sadar akan tanggungjawab mereka bersama dengan mengingat kekuatan kekufuran, sinisme, kezaliman dan kemerosotan moral yang terjadi dalam lingkungan sosial dan budaya.<sup>47</sup> Hanya jika salah satu pihak dari komunitas agama bisa melampaui sejarah permusuhan dan sama-sama terlibat dalam upaya mempromosikan nilai-nilai dasar yang sama-sama diperjuangkan oleh setiap agama, banyak permasalahan akan cepat diselesaikan.<sup>48</sup>

Yang selalu menjadi perdebatan sengit diantara penganut agama-agama adalah munculnya gerakan dalam penyebaran agama yang diyakini oleh penganutnya memberi garansi teologis untuk dunia dan di alam masa depan, baik untuk menganut agama tersebut atau bahkan berimbas kepada penganut di luar agamanya.<sup>49</sup> Dengan realitas ini maka penyebaran agama mengalami benturan sosiologis yang tidak bisa dielakkan. Karena Islam dan Kristen

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 130.

<sup>47</sup>Alwi Sihab, *Membendung Arus ; Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, terj. Ihsan Ali-Fauzi (Bandung : Mizan, 1998), h. 188.

<sup>48</sup>Pencapaian rasa kebersamaan dalam konteks keindonesiaan masih dirasakan sangat merupakan kesulitan yang diakibatkan kurang adaptasinya nilai-nilai perubahan yang bisa diresponi masyarakat. Apalagi kalau prasangka, praasumsi dan praduga teologis tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Praduga teologis yang sudah berabad-abad sangat sulit untuk diterobos dan dijernihkan melalui cara apapun. Hubungan antar umat beragama tidak lagi hanya sekedar hubungan personal dan kolektif, namun sudah masuk dalam wilayah ketertumpangtindihan antara teks dan realitas. Lebih lanjut baca pidato pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah MA. yang mengupas tentang “Doktrin Agama Belum Menjamin Kerukunan Antar Umat Beragama”, dilansir dalam *Harian Republika* tanggal 19 Mei 2000.

<sup>49</sup>Akhir-akhir ini masih sangat sering di diskursuskan tentang masalah penyebaran agama, dalam agama-agama yang mengemban tugas suci tersebut dikenal dengan beberapa terminologi. Dalam Islam disebut dengan *da'wa*/dakwah, sedangkan dalam Kristen dikenal dengan *mission*/misi. Dalam berbagai konferensi tentang tugas ini sering bahan perbincangan, yang terakhir dari konferensi Jenewa dengan statemennya : “*In recognition that mission and da'wah are essential religious duties in both Christianity and Islam*”. Lebih lanjut baca : Olaf Schumann, *Dialog Antar Umat Beragama; Di manakah Kita berada kini?* (Jakarta : LPS Dewan Gereja-gereja di Indonesia 1980), h.98.

merupakan salah satu agama yang mengemban misi, maka kerap kita mendengar adanya benturan bahkan konflik akibat dari gerakan-gerakan misi ini.<sup>50</sup>

Sejak al-Masih mengutus murid-muridnya untuk mengajarkan Injil dan Nabi SAW pun mengutus para sahabat mengajarkan Islam, maka sejak saat itulah dua agama yang sama-sama mengemban misi berdiri pada posisi misionarik. Tradisi ini menjadi sumber lain dari kedua belah pihak.<sup>51</sup> Dalam agama Kristen ditegaskan bahwa kebenaran agamanya tidak hanya untuk mereka, namun juga untuk seluruh umat manusia dan harus sama-sama dianut, seorang misionaris atau bahkan setiap orang Kristen yang terlibat dalam kerja misi, selalu dipandang sebagai menggorek luka lama. Bahkan jika seseorang bekerja bukan untuk maksud mengajak orang lain berpindah agama, melainkan benar-benar dengan semangat cinta dan pengabdian kepada orang lain, kerja semacam itu tetap dipandang perlu dipertanyakan motifnya.

Sebaliknya ada yang mempersepsikan bahwa Islam juga telah melakukan Islamisasi terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa jauh sebelum kemerdekaan diraih.<sup>52</sup> Sehingga hal ini berakibat bahwa orang-orang yang mengaku menganut agama Islam dapat divariasikan ke dalam beberapa tingkatan. Ada yang menerima dan menjalankan secara taat prasyarat mutlak yang dituntut dalam keimanan Islam dan ada pula mereka yang sementara waktu terus menegaskan diri sebagai penganut Islam, tidak menjalankan praktik-praktik keislaman sepenuhnya.

### **C. Tinjauan Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Komunitas Pluralistik**

Pergolakan dunia yang ada sekarang masih mempunyai akibat lain yang aneh, juga di belahan dunia Bagian Timur. Maksudnya bahwa dalam abad

---

<sup>50</sup>H. Berhof dan I.H. Enklaar, *Sejarah Gereja* (Jakarta : Badan Penerbit Kristen, 1956), h.

<sup>51</sup>Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi...*, h. 142.

<sup>52</sup>Pada saat kemerdekaan ketika adanya ketertarikan umat Kristen terhadap institusionalisasi Syariat kaum muslim pada aspek-aspek tertentu kehidupan Indonesia, seperti hukum mengenai perkawinan, warisan dan mahar. Bagi umat Kristen, hukum-hukum ini bisa menjadi simbol meningkatnya kesabaran dan pengertian baru tentang identitas Islam bagi mayoritas muslim. Namun ini bagi umat Kristen yang lain merupakan langkah dalam proses menuju Islamisasi bangsa ini. Mereka dengan serius mempertanyakan apakah minoritas Kristen akan menikmati standar yang sama pada keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan persamaan sosial dalam lingkungan politik dan agama. Lebih lanjut baca : Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*, h. 35.

sekarang adanya berbagai agama dan pandangan dunia atas dasar keagamaan muncul kembali dengan tuntutan akan kebenaran dan pengakuan mutlak. Iklim kerohanian dalam abad yang lalu sangat berlainan. Waktu orang menginginkan diadakannya peleburan agama-agama dan orang telah mengangan-angankannya satu agama pada dunia yang akan datang.

Lebih dari itu agama-agama yang selama ini ada di Indonesia akan menampilkan sifat aslinya sesuai dengan kultur Indonesia, sehingga agama-agama yang terdapat dan berkembang akan mengalami ciri khas agama keindonesiaan; problematika dan solusi keagamaan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.<sup>53</sup> Dalam mengusung kerukunan antar agama untuk masa depan sebagai landasan kedamaian bangsa dan seluruh penganut agama, bahwa agama-agama satu sama lain bisa menuntut yaitu agama tidak bisa melepaskan haknya atas satu kebenaran yang harus dibenarkan. Agama apapun akan mengakui kebenaran yang sewajarnya (relativisme), dimanapun ia harus merasakan kewajiban untuk mengikrarkan tentang keluhuran dan kekuatan agamanya. Tetapi disamping itu, sebagai seorang yang percaya dan mengetahui sejarah agama-agama, seseorang seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi setiap agama lainnya. Karena menuntut keyakinannya, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada semua bangsa dan masa dengan keputusan-keputusannya yang bisa kita selami dengan cara berlainan, artinya; dalam setiap agama terdapat sebagian pengetahuan tentang Tuhan yang harus diakui oleh penganut-penganut agama lain.

Bagaimanakah seharusnya sikap penganut setiap agama kepada tetangganya dalam masa yang akan datang? Dalam hal ini para penganut harus belajar banyak untuk mengerti agama lainnya, sehingga dapat mengetahui sifat-sifat khusus agama lainnya. Setelah kita saling mengakui sifat-sifat baik masing-masing, kita dapat mengadakan pembicaraan satu sama lainnya dan malahan bisa bekerjasama. Dalam dunia modern di mana anggota bangsa-bangsa dan suku-suku bercampur-baur, penganut agama-agama akan semakin banyak berhubungan satu sama lainnya.

---

<sup>53</sup>Dalam kajian sosiologi bahwa inti setiap sesuatu akan mempertahankan bentuk aslinya manakala bentuk-bentuk luarnya terus berkembang. Pada saat datangnya agama Hindu dan Budha, ternyata penduduk asli Indonesia tetap mempertahankan tradisi aslinya berupa animisme dan dinamisme, sehingga tatkala dua agama itu mengadakan penyebaran, maka terjadilah akulturasi diantara keduanya yaitu antara tradisi dan agama baru yang datang dihadapan mereka. C.H. Bleeker, *Pertemuan Agama-agama Dunia*, terj. Barus Siregar (Bandung : Penerbitan Vorkink Van Hoeve, tt.), h.109.



Anjuran kerukunan yang dilembagakan dan dimasyarakatkan berawal dari adanya ketegangan konflik masing-masing agama, khususnya Islam dan Kristen. Sejak terjadinya konflik fisik dan perusakan berbagai tempat suci agama, maka sejak itulah pemerintah merasa sangat berkepentingan untuk mengangkat isu utama kerukunan untuk diimplementasikan dan dijadikan sebagai landasan beragama. Hal ini juga tak terlepas dari tanggapan serius yang dilontarkan oleh tokoh Islam Prof. Rasyidi, yang menyatakan :

*“Saya merasa dengan terus terang bahwa keadaan sekarang adalah serius, hubungan antar umat Islam dan Kristen adalah tegang, bahkan sangat tegang. Kita tak dapat pura-pura tidak merasakan hal ini. Dalam keadaan semacam ini saya mendengar bahwa ada suatu pihak yang manaruh minat dan perhatian serta berusaha agar keadaan ini jangan sampai meletus lebih besar lagi, cukuplah sudah terjadi di Makasar dan Aceh”.*<sup>54</sup>

Ketika ketegangan itu mencapai tingkat yang tidak dapat dikendalikan lagi, pertentangan fisik dan penghancuran fasilitas-fasilitas keagamaan dimulai. Jawaban penghancuran ini jelas ditunjukkan pada tahun 1967 ketika umat Islam menghancurkan gereja-gereja di Aceh dan Ujungpandang serta menghancurkan sekolah Kristen di Jakarta.<sup>55</sup> Pada tahun 1969 insiden serupa berkobar di daerah pinggiran Jakarta, sebuah gereja Protestan dihancurkan oleh pemuda-pemuda Islam. Insiden-insiden semacam itu juga mengejutkan umat Kristen di Jatibarang, Jawa Barat dan Purwodadi, Jawa Tengah. Setelah serangkaian konflik ini terjadi, pemerintah merasa perlu mengambil langkah untuk mengatasi ketegangan ini.

Untuk mengurangi ketegangan tersebut maka sikap dari para penganut yang harus dikembangkan adalah sikap-sikap moderat dan liberal terhadap keimanan lain. Dengan pendekatan dan pemahaman yang menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan ketidakmudahan manusia, boleh jadi dikembangkan, katakanlah semacam “Teologi Kerukunan”,<sup>56</sup> Yaitu suatu pandangan keagamaan yang tidak bersifat memonopoli kebenaran dan keselamatan, suatu pandangan keagamaan yang didasarkan atas kesadaran bahwa agama sebagai kebenaran tidak pernah terungkap oleh manusia secara

---

<sup>54</sup>Sudjangi (penyt.), *Kajian Agama dan Masyarakat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama III; 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1993), h. 4.

<sup>55</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*, h. 28.

<sup>56</sup>Greg Berton, *Gagasan Islam Liberal...*, h. 143.

penyebabnya adalah bahwa keagamaan seseorang, lebih merupakan produk atau setidaknya dipengaruhi oleh lingkungan.

Hal ini menandakan bahwa seorang seharusnya tetap setia memberikan apresiasi yang positif terhadap eksistensi pluralisme. Komunitas yang pluralistik merupakan keniscayaan dan tidak bisa dibantah dalam *global village* pada saat sekarang. Oleh karena itu perkembangan masyarakat dan kebudayaan kita menghendaki pandangan keagamaan yang moderat dan liberal. Tanpa pandangan keagamaan semacam itu sukar bagi agama untuk merangkul dan meragukan berbagai kemajemukan masyarakat kita. Dalam hal ini mungkin dialog-dialog yang dilakukan walaupun tidak begitu besar ada juga gunanya, asal saja para teolog mau membuka jendela hatinya.

## BAB 2

### DESAIN DINAMIS

#### KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

##### A. Kebijakan dan Strategi Membina Kerukunan dalam Meneguhkan Berbangsa dan Bernegara

Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang suka damai dan toleransi.<sup>1</sup> Toleransi dan kerukunan antar umat agama dihargai oleh mereka, dikagumi serta dipuji bukan saja oleh sarjana ahli keagamaan, melainkan juga oleh tokoh-tokoh agama, diantaranya adalah Sri Paus VI. Toleransi tersebut terjalin dengan seluruh alam pikiran masyarakat Indonesia asli di mana adanya batas-batas yang mutlak diingkari.

Pandangan dunia asli bercorak kerinduan kepada kesatuan dan keselarasan. Pedoman dalam menghadapi perbedaan bukanlah konfrontasi, melainkan keserasian, keharmonisan dan kompromisasi. Berkat kecenderungan budi tersebut, maka sepanjang sejarah agama demi agama diizinkan masuk ke Indonesia tanpa perlawanan-perlawanan, sehingga Landon menyebut kawasan Indonesia “*the only ground of the world’s principal religion*”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kata Toleransi berasal dari bahasa latin, “*tolerare*” (dari kata benda *tolus-eris*: beban). Arti pertama “*tolerare*” ialah memikul beban atau sesuatu yang dirasakan membebani (dapat merupakan beban fisik, pikis, mental atau gangguan lingkungan). Maka bersikap toleran berarti bersedia memikul beban gangguan yang timbul dari cara hidup yang berbeda dengan cara hidup atau *weltanschauung* atau sikapku. Makna positif toleransi menunjuk pada sikap-sikap memelihara, menanggung. Hidup dari lingkungan hidup orang lain dipandang sebagai bernilai dan karenanya harus dilindungi. Jadi toleransi tidak hanya berarti membiarkan dengan netral atau sabar, melainkan dengan ikut aktif serta menghargai hidup orang lain. Atau toleransi menunjuk pada sikap mengakui keunikan orang lain yang justru mengandaikan kemantapan pendirian dan pandangan sendiri. Karena arti pertama yang mencetuskan “ikut memikul beban”, kata toleransi selalu mengungkapkan sikap-sikap terhadap manusianya dan *tidak pernah* mengenai ajaran agama. Dengan kata lain, toleransi ada dalam kerangka perikemanusiaan, bukan kebenaran ajaran atau dogma agama. Maka toleransi tidak memecahkan masalah benar salahnya ajaran agama, melainkan berusaha menghargai hak orang lain dan membantunya juga. Hal ini bukan relativisme, juga tidak bertentangan dengan sifat absolut ajaran agama yang diyakininya. Selanjutnya baca : O. Carm Piet Go, *Keutamaan Teologal dan Keutamaan Religi* (Malang : STFT Widya Sasana, 1982), h. 19.

<sup>2</sup>Perjalanan sejarah agama di Indonesia memperlihatkan bagaimana ajaran-ajaran agama asing diselaraskan dengan alam pikiran asli. Dalam perbandingan antara agama asli dan agama asing, pokok-pokok ajaran yang kurang lebih serupa atau senada disamakan. Asas agama lain dipertahankan, diperkaya secara lahir dengan beberapa unsur dari agama baru. Lebih lanjut baca : Penerbitan Yayasan Kanisius, 1976), h. 98.

Toleransi yang berusaha untuk dikembangkan dalam menjangkau semua segmen masyarakat, pada tingkat realitasnya harus dibarengi oleh pihak-pihak tertentu yang ikut menentukan perannya. Pemerintah atau badan-badan agama yang bertugas untuk menjembatani toleransi tingkat atas dan masyarakat bawah (*grass root*), seharusnya menampilkan sosok yang bisa dijadikan panutan komunitas beriman Indonesia dalam mengimplementasikan hubungan antar agama dan toleransi.

Dilatari dengan beberapa *event* yang cukup menggetarkan hati, berupa terkoyaknya hubungan antar agama dalam realitas, pemerintah merasa sangat penting menunjukkan inisiatif positifnya untuk membangun jendela dan cakrawala toleransi antar umat beragama, baik dengan pendekatan politis ataupun dengan sebuah kepentingan stabilisasi bangsa.<sup>3</sup>

Referensi ideologis yang senantiasa dijunjung tinggi oleh kaum elit agama dalam mengoperasionalkan kerukunan dan toleransi adalah Pancasila. Langkah kompromis dalam menentukan Pancasila sebagai ideologi negara, merefleksikan suatu keputusan yang historis dan jenial dari para pendahulu dan pendekar pergerakan kemerdekaan bangsa kita bahwa mereka telah berhasil sepakat menetapkan Pancasila sebagai “falsafah negara” dan “ideologi kebangsaan” yang mendasari kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa kita. Keputusan dan tindakan yang sangat arif dan mengandung wawasan yang jauh ke depan telah melepaskan bangsa kita walaupun tidak sepenuhnya.<sup>4</sup>

Sebagai falsafah kenegaraan dan ideologi kebangsaan, dengan sendirinya Pancasila merupakan :

1. “Frame ideologis” yang merangkum secara padat dan pada berbagai cita-cita kemasyarakatan yang tumbuh dan hidup dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa kita.
2. “Frame kultural” yang berfungsi sebagai penapis dan penyaring, baik terhadap warisan kebudayaan-kebudayaan lama nusantara, maupun terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga pertumbuhan kebudayaan nasional Indonesia benar-benar merupakan suatu idiom dan identitas nasional yang baru, namun tidak kehilangan nilai-nilai luhur kepribadian nasional kita.

---

<sup>3</sup>Dewan Redaksi, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta : Interfidei, 1993), h. x. Selanjutnya disebut Dewan Redaksi, *Dialog : Kritik ...*

<sup>4</sup>Greg Berton, *Gagasan Islam Liberal Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta : Paramadina, 1999), h. 246.

Secara spesifik Pancasila menawarkan kerangka konseptual guna mengarahkan sikap serta perilaku masyarakat yang pluralistik dalam agama. Bisa dikatakan bahwa Pancasila adalah sebuah cara menformalkan kebutuhan terhadap keinginan baik diantara seluruh agama dan masyarakat. Pancasila bisa mengarahkan dalam memberikan koridor kerukunan sehingga tercipta suasana yang akan memunculkan :

- a. Saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan golongan lain yang mungkin berbeda dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri.
- b. Saling menghormati hak pemeluk agama lain untuk menghayati dan mengamalkan agamanya secara sungguh-sungguh.
- c. Saling mempercayai atas i'tikad baik masing-masing pemeluk agama.

Dengan realitas yang seperti ini maka Pancasila bukan saja diasumsikan sebagai lambang kenegaraan, namun juga mengambil peran yang signifikan dan berpengaruh dalam kehidupan ideologi penganut agama-agama. Asas yang dipakai dalam setiap perundang-undangan termasuk kerukunan antar umat beragama juga mengambil nilai-nilai filosofis dari Pancasila.<sup>5</sup> Demikian, ketika komunitas penganut agama-agama terbentur realitas sosial keagamaan yang penuh konflik, maka diaturlah secara formal-konstitusional *role of game* implementasi kerukunan dan toleransi dan agama.

Sejak dicanangkannya media-media kerukunan, pemerintah sudah beberapa kali berusaha mendinginkan suasana tegang dan penuh konflik. Tepatnya pada 30 November 1967 diadakan Musyawarah Kerukunan Agama yang bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung, Jakarta.<sup>6</sup> Musyawarah ini diprakarsai oleh Departemen Agama RI, dan dihadiri oleh Presiden, 58 orang pemuka agama dan wakil partai politik, 10 Menteri, keempat Kepala Staf Angkatan, Jaksa Agung dan pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan masalah tersebut.

Bisa dikatakan bahwa secara formal media kerukunan dimulai dari waktu ini. Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan ditandatangani bersama dalam satu piagam yang isinya antara lain; menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

---

<sup>5</sup>Tarmizi Taher, *Aspiring for the Middle Path Religious Harmony in Indonesia* (Jakarta : CENCIS, 1997), h. 16.

<sup>6</sup>Sudjangi (penyt.), *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1996), h. 3. Selanjutnya disebut Sudjangi (penyt), Kompilasi...

Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama, namun tidak bisa menyetujui penandatanganan piagam yang telah diusulkan oleh pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan oleh sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan pemerintah, terutama yang menyangkut “agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain”. Pemerintah juga misalnya tercermin dalam agama Islam melalui sekian pernyataan keputusan Muktamar ke-38 organisasi Muhammadiyah pada tahun 1971 dan dalam mata kuliah IAIN yang membahas cara dakwah kepada orang yang beragama lain.<sup>7</sup>

Karena tidak dicapainya kesepakatan antara delegasi agama-agama yang hadir pada musyawarah itu, maka upaya ini masih dianggap belum memuaskan banyak pihak. Meski demikian masih kita rasakan bahwa ada semangat moral yang berusaha dikembangkan dari acara formal ini, yaitu semangat kerukunan dan dialog agama yang tidak akan pernah padam. Hal ini sebagaimana yang dikatakan M. Natsir,<sup>8</sup> bahwa pemerintah dalam usahanya untuk menjamin toleransi dalam kehidupan beragama, berdasarkan keyakinannya masing-masing akan mengutamakan kesatuan dan persatuan nasional antar sesama bangsa.

Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua elit agama-agama di Indonesia, untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Pertemuan selanjutnya menginspirasi beberapa pertemuan rutin secara formal yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Aktifitas keagamaan yang bisa membangun kehidupan rukun dan damai tersebut memaknai sebuah realitas dengan praktik dan realisasi para elit keagamaan yang diwujudkan dengan; dialog, konsultasi musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama ke daerah-daerah, seminar antar cendekiawan agama-agama, sarsehan antar pimpinan generasi muda dan berbagai aktifitas keagamaan yang berimbang positif terhadap pembentukan rasa memiliki dan tanggungjawab dalam membina toleransi dan kerjasama antar agama.

Kerukunan dan toleransi yang berdasarkan falsafah dan ideologi negara yaitu Pancasila berasal dari asumsi bahwa Pancasila merupakan salah

---

<sup>7</sup>Tercatat dalam peringatan : Tim, *Sewindu Institut Agama Islam Negeri al Jami'ah al Islamiyah al Hukumijah Sunan Kalidjaga Jogjakarta tahun 1960 – 1968* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalidjaga, 1968), cet. I, h. 278.

<sup>8</sup>Dewan Redaksi, *Dialog : Kritik...*, h. xi.

satu asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kukuh dan dominan dalam rangka pengembangan kerukunan. Kelima sila dalam Pancasila yang digambarkan dengan butir-butirnya memberikan arahan yang amat jelas untuk mewujudkan kerukunan.<sup>9</sup> Butir-butir dari sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam P4 menyatakan antara lain :

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Dalam undang-undang Dasar 1945 juga dinyatakan dengan jelas tentang pangkal dari kehidupan agama di Indonesia, yang sekaligus akan berdampak jelas tersurat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan :

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Rumusan ini memberikan penegasan yang sangat urgen terhadap peranan negara dalam memberikan garansi bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya. Negara berfungsi untuk menjamin, memperjuangkan, mengupayakan dan membantu agar tiap-tiap penduduk memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya serta mengeskpresikan keberagamannya. Jaminan negara tidak hanya terletak pada “memeluk agamanya masing-masing” namun juga mencakup kepada “beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Negara tidak mengatur dan mencampuri ibadah dari agama-agama dan kepercayaan, negara menjamin agar pemeluk agama dan peribadatan berjalan dengan baik.<sup>10</sup>

Pembinaan kerukunan hidup beragama dalam GBHN mencantumkan sasaran Pembangunan Jangka Panjang kedua bidang Agama dan Kepercayaan

---

<sup>9</sup>Mustoha (ed.), *The Theological Frame of Harmonious Life of Communities in Indonesia* (Jakarta : Departement of Religious Affairs of Indonesia, 1997), h. 79.

<sup>10</sup>Sudjangi (penyt.), *Kajian Agama dan Masyarakat; Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama III 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1993), h. 65. Selanjutnya disebut Sudjangi (penyt.) *Kajian Agama...*

terhadap Tuhan yang Maha Esa yaitu terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang penuh dengan keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar dan antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.<sup>11</sup> Penjelasan ini tersurat dalam ketetapan MPR RI nomor II/MPR/1993 tanggal 09 Maret 1997 tentang GBHN.

Adapun beberapa kebijakan pemerintah dalam kerukunan antar umat beragama, maka pemerintah membuat berbagai peraturan mengenai kepentingan-kepentingan dalam membina toleransi dan kerukunan secara struktural. Artinya bahwa kerukunan yang ada dan muncul di komunitas agama-agama lebih tertanam dengan peraturan yang dimainkan oleh pemerintah. Beberapa kebijakan pembinaan kerukunan dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama dapat menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan :

1. Keberadaan organisasi sosial keagamaan dan lembaga keagamaan.

Organisasi sosial keagamaan dan lembaga keagamaan adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi, fungsi dan agama selanjutnya diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1985. Peraturan organisasi sosial keberadaan organisasi sosial keagamaan dan lembaga keagamaan menyangkut beberapa hal yang berkaitan antara lain :

- a. keberadaan organisasi kemasyarakatan
- b. Jenis dan dasar pembentukan organisasi kemasyarakatan
- c. Pembinaan dan bimbingan
- d. Saksi dan hukum
- e. Keberadaan, fungsi dan tujuan organisasi keagamaan
- f. Pengumpulan dan organisasi

2. Penyiaran agama dan tenaga keagamaan<sup>12</sup>

a. Penyiaran agama

Penyiaran agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran suatu agama. Hal itu diatur

---

<sup>11</sup>Sudjangi (penyt.), *Kompilasi...*, h. 9.

<sup>12</sup>Sudjangi (penyt.), *Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1996), h. 22.



dalam surat Keputusan Bersama – Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1/1979, pasal 1 ayat 1.<sup>13</sup>

b. Tenaga keagamaan

Dalam rangka pembinaan, pengembangan, penyiaran dan bimbingan terhadap umat beragama di Indonesia, maka penggunaan tenaga asing untuk pengembangan dan penyiaran agama dibatasi. Juga ada peraturan yang dikuatkan dengan ketetapan-ketetapan lainnya terhadap eksistensi tenaga keagamaan.

3. Pedoman pendirian dan penggunaan tempat ibadah

a. Pendirian tempat ibadah

Setiap pendidikan rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu. Hal ini tercantum dalam peraturan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 pasal 4 ayat 1

b. Penggunaan tempat ibadah

c. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan daerah umum.

4. Hubungan antar agama dalam bidang pendidikan, perkawinan, penguburan jenazah dan upacara hari-hari besar keagamaan.

a. Bidang pendidikan

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu kesatuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Hal ini tersurat dalam Undang-undang nomor 2/1989.

b. Bidang perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini tercantum dalam Undang-undang nomor 1/1979.

c. Bidang penguburan jenazah

Berdasarkan Surat Menteri Agama RI nomor B. VI/112/1978 tanggal 18 Oktober 1978 yang disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah

---

<sup>13</sup>Peraturan ini diawali dengan adanya inisiatif dari masing-masing agama dalam hak menyampaikan agama baik itu Islam, Kristen dan juga yang lainnya. Lebih lanjut baca : Encon Darsono, *Agama dan Kerukunan Penganutnya* (Bandung : al Ma'arif, 1980), h. 42.

Tingkat 1 di seluruh Indonesia bahwa penguburan jenazah adalah menyangkut keyakinan agama masing-masing.

d. Bidang upacara hari-hari besar keagamaan<sup>14</sup>

Berdasarkan pidato Presiden yang disampaikan dalam Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama bahwa peringatan hari-hari besar keagamaan pada dasarnya hanya diselenggarakan dan dihadiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan.

5. Pengamanan terhadap barang cetakan

- a. Pelarangan terhadap peredaran barang cetakan
- b. Impor buku-buku agama
- c. Pengawasan terhadap mushaf Al-Qur'an

6. Sumpah dan janji

7. Penodaan dan penghinaan agama

- a. Pembekuan aliran kepercayaan/kerohanian
- b. Tugas dan wewenang kejaksanaan agung
- c. Instansi yang membekukan aliran
- d. Sanksi pidana penodaan

Sebuah langkah aspiratif dari pemerintah lebih terasa ketika membentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama pada tahun 1967. Format kerukunan yang lebih menonjolkan segi keformalan mengindikasikan bahwa suatu kepedulian antara negara dengan penganut agama-agama, namun harus tetap disadari bahwa masih tetap ada keprihatinan untuk mengembangkan toleransi dalam hidup beragama yang bisa ditempatkan dalam konteks global dan dalam dimensi yang lebih mendalam.

Bahwa tidak salah apabila kita membuat sebuah peraturan dan “tetek bengek” yang mendinamisir kerukunan di Indonesia, namun juga sebagai sebuah relasi mondial bahwa jalinan kerukunan antar agama dunia pun telah lama terbina. Sehingga konteks kerukunan tersebut bisa ditarik ke dalam horizon yang lebih menginternasional. Dalam kongres Internasional untuk sejarah agama-agama IX di Tokyo sudah dirasakan kebutuhan dunia akan toleransi dan sumbangan yang mungkin bisa diberikan oleh studi agama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Sudjangi (penyt.), *Kajian Agama...*, h. 95.

<sup>15</sup>A. Mukti Ali, *Dialog Antar Agama* (Yogyakarta : Yayasan Nida, 1970), h. 7. Bandingkan dengan A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1990), h. 68.

Sehingga eksistensi kerukunan di nusantara tetap merupakan sebuah jalinan teologis dan ideologis dengan agama-agama dunia.

## **B. Mengunduh Asa dan Cita untuk Mewujudkan Nilai Kerukunan yang Humanis**

Dalam mendudukan kajian agama-agama kita tidak dilarang untuk mendekatinya hanya dari satu sudut pandang saja. Hal itu karena berkenaan dengan dinamikan pemikiran manusia. Untuk memahami dan juga mengaktualisasikan posisi agama dalam kehidupan, tak ada salahnya kalau melihatnya dari kacamata intelektual. Kadang pendekatan akan memberikan yang lebih positif, apalagi kalau yang mengkajinya orang yang ahli dalam bidangnya, dalam hal ini akan lebih cocok dengan ahli agama atau teolog.<sup>16</sup>

Salah satunya adalah Louis Massignon (1883 – 1962) yang sepanjang hayatnya bekerja keras mengumpulkan naskah tentang tasawuf dan tokohnya. Al-Hallaj adalah sasaran utama penelitiannya. Dia sangat tertarik kepada tasawuf Islam dan menghargai al-Hallaj sama seperti dunia Kristen menghargai tokoh-tokoh besarnya seperti Paulus Agustinus, Thomas Aquinas, karena itu dia menetapkan istilah atau gelar “wali (*saint*) kepada al-Hallaj. Yves Moubarac, seorang keturunan Kristen Libanon pada tahun 1957 mempertahankan disertasinya dengan judul *Abraham dans le Coran* di Institut Catholique, Paris.<sup>17</sup> Ia berusaha menceritakan tafsir cerita Ibrahim a.s. menurut Injil dan al-Qur’an.

Di samping itu masih juga ada dua orang piter dari biara Dominican Katolik. Gardet dan Anawati (Perancis dan Mesir), yang keduanya berusaha menjembatani antara pemikiran Islam dengan Kristen. Keduanya berhasil mengadakan perbandingan antara pemikiran para mutakallimin dengan Thomas Aquinas.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Dalam tataran kajian intelektual masih sering kita melihat bahwa agama-agama Disamping sebagai kajian yang bisa dicarikan yang bersifat rekonsiliatif untuk kehidupan keseharian lebih dari itu pada kali pertama harus bisa mengkomparasikan dari agama-agama tersebut, sehingga akan jelas kebenaran dari agama-agama tersebut. Lebih lanjut baca : Dale Cannon, *Six Ways of Being Religious A Framework for Comparative Studies of Religion*, (USA : Wadsworth Publishing Company, 1996), 215.

<sup>17</sup>Djam’annuri et.al. (ed.), *Agama dan Masyarakat 70 Tahun A. Mukti Ali* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), h. 470.

<sup>18</sup>Thomas Aquinas (1225-1247) lahir di Rocca Sica dekat Napels dari suatu keluarga bangsawa. Filsafat Thomas dihubungkan dengan erat sekali dengan teologia. Sekalipun demikian pada dasarnya filsafatnya dapat dipandang sebagai suatu filsafat kodrati yang murni.

Dalam menguak pemikiran yang memberi peluang kepada harmonisasi agama, kiranya kita harus tidak melupakan akan reformasi gereja yang dihasilkan dari Konsili Vatikan II (1962-1965) menghasilkan beberapa pemikiran intelektual yang cukup membuka peluang dalam mendorong tertatanya sebuah kerukunan antar umat beragama. Lebih artikulatif masalah kerukunan tertuang dalam piagam yang membicarakan hubungan Katolik dengan agama lain. Adapun piagam dikutip dari bahasa Latin yaitu *Nostra Aetate* atau Zaman kita.

Zaman kita adalah zaman umat manusia tambah hari tambah bersatu dan hubungan-hubungan antara bangsa berbeda-beda semakin dilipat gandakan, maka gereja dengan lebih seksama mempertimbangkan bagaimana sikapnya terhadap agama-agama bukan Nasrani. Dalam tugasnya memajukan kesatuan dan cinta kasih diantara orang-orang, bahkan diantara bangsa-bangsa, maka mempersatukan manusia satu dengan yang lain serta faktor-faktor yang memperkokoh kesatuan itu ...<sup>19</sup>

Kajian intelektual disiratkan oleh seorang tokoh pluralis yaitu Hans Kung berkenaan dengan doktrin gereja *extra eclessiam nulla salus*. Hans Kung berdialog dengan kapasitasnya sebagai ahli agama yang menyoroti agama lain, sehingga dengan intensif ia berdialog dengan cara mengajukan pertanyaan mendasar tentang Islam.<sup>20</sup> Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini Hans Kung

---

Sebab ia tahu benar akan tuntutan penelitian kebenaran dan secara jujur mengakui bahwa pengetahuan insani dapat diandalkan juga. Demikianlah ia membela hak-hak akal mempertahankan kebebasan akal dalam bidangnya sendiri. Wahyu berwujud juga dalam bidangnya sendiri. Disamping memberi kebenaran alamiah, wahyu juga memberi kebenaran yang adikodrati, memberi misteri atau hal-hal yang bersifat rahasia. Lebih lanjut baca : Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat I* (Yogyakarta : Kanisius, 1996), h. 104.

<sup>19</sup>Mustoha (ed.), *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1997), h. 106. Selanjutnya disebut Mustoha (ed), *Bingkai Teologi...*

<sup>20</sup>Untuk menjawab pertanyaan itu sangat membutuhkan sebuah pemahaman yang jelas tentang Islam; (1) Apakah Islam adalah sebuah jalan keselamatan, (2) Apakah Muhammad adalah Nabi, (3) Apakah al-Qur'an adalah Firman Allah, (4) apa yang merupakan pokok yang menghubungkan agama-agama Islam, (5) Apakah penggambaran Isa al-Masih (Yesus Kristus) dalam al-Qur'an itu tepat, (6) Apa yang merupakan pusat perbedaan teologis antara Islam-Kristen, (7) Bagaimana mengatasi perbedaan-perbedaan ini, (8) Apa yang harus dilakukan oleh kaum Muslim untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini. Hans Kung juga menggemakan sebuah statemen menarik berkenaan dengan kerukunan antaragama : *No peace among the nations without peace among the religions. No peace among the religions without dialogue*

memberikan respons yang positif terhadap Islam dan kiranya menjadi contoh terbaik dalam mengatasi hambatan-hambatan teologis diantara dua agama Semitik dari kalangan Muslim kita juga mengenal tokoh-tokoh yang sering berkecimpung dalam kajian intelektual kerukunan agama dan sekaligus memposisikan mereka sebagai tokoh pluralis, seperti Ismail Razi al Faroqi, Sayyed Husein Nasr, Mahmoud Ayoub, Abbul Kalam Azzad, Fazlur Rahman, Hassan Askari, Muhammad Arkoun dan Mohamed Talbi.

Dalam kajian kerukunan yang bersifat intelektual termasuk di Indonesia penganut agama kita harus mengingat satu sikap yang membendung terhadap adanya *a priori dan prejudice*, yaitu dengan mengembangkan sikap keterbukaan (*inklusif*). Sehingga ketika penganut agama mendapatkan perbedaan dari kebenaran tradisi agamanya maka ia menyatakan pada saat yang sama bahwa hal ini meliputi semua saja yang ada yang berkaitan dengan kebenaran pada tahap-tahap yang berbeda di mana pun. Sikap inklusivistik akan cenderung untuk menginterpretasikan kembali hal-hal dengan cara sedemikian sehingga hal-hal itu tidak saja cocok namun dapat diterima.<sup>21</sup> Pada saat menghadapi kontradiksi yang nyata, misalnya suatu perbedaan yang perlu pun dapat dibuat antara tataran-tataran berbeda sehingga dimungkinkan untuk mengatasi kontradiksi itu.

Kerukunan dalam horizon di Indonesia pernah dirajut dengan mengadakan pertemuan antar ahli agama-agama seperti dalam pertemuan yang diadakan di Sukabumi pada tahun 1998,<sup>22</sup> yang menghasilkan dokumen yang mengandung kepedulian terhadap harmoni agama-agama sejati.

Untuk memelihara kerukunan yang didambakan dengan dimensi intelektual, hal tersebut tidak terlepas dari aktifitas elit agama-agama yang ada di Indonesia. Hal itu bisa dipahami karena para elit agama merupakan panutan bagi para pemeluknya. Dalam agama Kristen, misalnya ada *warning* yang harus diperhatikan oleh *formatio* calon pemimpin umat.<sup>23</sup> Dalam konteks pluralisme

---

*between the religions. No dialogue between the religions without investigating the foundation of the religions.* Lebih lanjut baca : George B. Grose dan Benjamin J. Hubart (ed.), *Tiga Agama Satu Tuhan; Sebuah Dialog*, terj., (Bandung : Mizan, 1998), h. xvii.

<sup>21</sup>A. Sudiarja (ed). *Raimundo Panikkar, Dialog Intra Religius* terj., (Yogyakarta : Kanisius, 1994), h. 20.

<sup>22</sup>Mustoha (ed.), *Bingkai Teolog...*, h. 100.

<sup>23</sup>Formatio calon pemimpin adalah para calon imam yang mempersiapkan diri dalam lembaga-lembaga teologi. Dan telah terealisasi sebuah pertemuan di Philipina yang diikuti oleh para rektor dan direktur spiritualitas pada tanggal 15-28 Oktober 1991. Isi rumusan yang dihasilkan adalah : (a) Pembentukan untuk dialog dengan agama-agama dan budaya, (b) Dalam

agama di mana umat beriman Katolik Indonesia diajak untuk bersikap terbuka dan dialogis secara wajar terhadap sesama yang berima lain. Tanpa mengecilkkan peran awam, mengingat tugas sebagai inspirator pengembangan iman umat Katolik, para imam harus mempersiapkan, membekali dan melatih diri berdialog dengan kaum beriman lain, dan juga calon imam perlu diajak untuk semakin terbuka terhadap aneka pandangan yang berkembang dalam masyarakat agama lainnya. Di samping keterbukaan yang diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman yang positif, konstruktif dan integral mengenai agama lain, para calon perlu memicu keterlibatan yang semakin kongkret dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Sebagaimana ada peran yang sangat signifikan dalam agama Kristen yang diinspirasi oleh para imam. maka perlu untuk menggalang kerjasama yang mutualistik harus juga memperhatikan peran elit agama lain. Di sini yang sama penting juga adalah peran ulama dalam mengatrol kerukunan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya aktifitas ulama harus melihat kepada dua sisi, *pertama*; berusaha untuk mereinterpretasikan agama sehingga ulama bisa berperan langsung dalam melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui upaya reinterpretasi agama, sehingga pesan-pesan yang dibawa agama menjadi fungsional dan ajaran keadilan, toleransi dan cinta kasih yang dikandung oleh agama menjadi implementatif dan integratif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.<sup>24</sup>

---

mengikuti jejak Kristus, semua orang dipanggil untuk menginkarnasikan diri sungguh-sungguh dalam milieu religio (kondisi religius budaya setempat). Pemimpin dari Gereja Universal mendorong kita untuk berdialog dengan agama-agama dan budaya-budaya bangsa kita. Sesuai dengan itu, para imam pada hari mdatang harus disiapkan sejak dalam masa seminari dalam proses inkarnasi itu. Ini adalah tanggungjawab dari formator-formator yang mengupayakan agar komunitas-komunitas seminari memperhatikan sikap percaya pada tradisi kepercayaan kristiani dan pada waktu yang sama hormat akan kemampuan berpikir yang biasa dan nilai-nilai asli yang terdapat dalam tradisi religius kutltural bangsa ini, (c) mengenai dialog antar agama. Kita harus berusaha secara kongkret untuk menambah pengertian dan penghargaan kita terhadap agama-agama lain, lebih-lebih mereka yang bersifat umum (mayoritas) di daerah kita. Usaha-usaha ini harus diikuti dengan dialog dengan para penganut agama-agama lain. Lebih lanjut telaah : Armanda Riyanto, *Dialog Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), h. 128.

<sup>24</sup>Khusus dalam konteks pembinaan kerukunan antar umat beragama, setidaknya ada dua pesan al-Qur'an yang harus diinterpretasikan : *pertama*, yang harus diinterpretasikan adalah ayat al-Qur'an : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah" (QS. 9.29). Ayat ini jika dipahami secara tekstual akan sangat membahayakan kerukunan antar umat beragama. Menurut seorang ulaman Mesir terkenal, Sayyid Quthb, ayat ini berlaku temporal dan periodik, artinya dalam era damai ia harus disandingkan dengan ayat-ayat lain yang menganjurkan kasih sayang dan tolong menolong antar sesama. *Kedua*, harus juga diinterpretasikan terminologi

38

Duduk bersama dalam satu meja dan mendiskusikan kepentingan bersama juga sudah dilaksanakan bersama antara penganut agama-agama di Indonesia, misalnya seminar tentang peran agama dalam pembangunan pada tanggal 17-21 September 1973 yang menghasilkan beberapa poin penting antara lain : rasa keadilan yang diinginkan bukan saja dalam ukuran materil, namun meliputi sikap, tindakan dan suasana yang menjamin : (a) Kebebasan menyatakan pendapat, (b) Kepastian hukum, (c) Kebebasan dari rasa takut. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1974 di Banda Aceh mengadakan seminar tentang peranan pemimpin-pemimpin agama dalam pembangunan nasional.<sup>25</sup>

Sementara itu tahun-tahun belakangan ini terjadi prakarsa-prakarsa internasional yang sejajar dengan usaha-usaha nasional tadi. Juga yang tak bisa dilupakan adalah adanya konferensi meja bundar misi Kristen dan dakwah Islam di Jenewa Juni 1976 yang diselenggarakan oleh Dewan Gereja Sedunia bekerjasama dengan *Islamic Foundation* di Inggris yang diikuti oleh tokoh-tokoh/ ahli-ahli Islam, Kristen Protestan dan Katolik dari Eropa, Asia dan Afrika.<sup>26</sup> Hasil bersama itu adalah merupakan bukti, bahwa kita dapat

---

“kafir”. Kata ini umumnya ditafsirkan secara tidak proporsional, dengan dikonotasikan kepada seseorang atau sekelompok orang ‘lain’ yang harus dibenci bahkan diperangi. Dalam al Qur’an, kata “kafir” ditujukan kepada mereka yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah. Namun al-Qur’an sama sekali tidak memberi hak kepada siapapun untuk membenci dan memerangi mereka (mendahului) menyebarkan kebencian dan peperangan. Sebaliknya al Qur’an memberi kebebasan kepada siapa pun untuk beriman atau tidak beriman kepada Allah. (QCS. 18:29). Lihat : Andito (ed.), *Atas Nama Agama : Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas” Konflik*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1998), h. 330. Selanjutnya disebut : Andito (ed.), *Atas Nama Agama...*

<sup>25</sup>Di sini pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan perlunya pengamalan pasal-pasal yang disebut oleh Menteri Agama di DPR tanggal 02 Mei 1973 : (1) Golongan yang belum beragama atau belum berketuhanan Yang Maha Esa termasuk golongan atheis dan animis diusahakan agar mereka berketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan pilihannya sendiri. (2) Golongan yang sudah beragama atau berketuhanan Yang Maha Esa diusahakan agar mereka makin mantap dan tebal imannya serta luhur budi pekertinya berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing. (3) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan jiwa tenggang menenggang umat beragama yang tinggi antar pemeluk agama yang berlainan dengan memperhatikan faktor-faktor di bawah ini : a. Jangan sampai orang berusaha supaya orang lain yang sudah memeluk agama meninggalkan agamanya untuk memeluk agama yang ia peluk dengan penindasan atau daya tarik ekonomi dan kebudayaan. b. Menjauhi polemik untuk lebih meningkatkan hubungan antar kelompok-kelompok. c. Saling memahami kepercayaan satu sama lain. Lebih lanjut baca : Jend. A. Haris Nasution, *Kerukunan Beragama; Ceramah dan Tanya Jawab di Universitas Kristen Nomensen*, (Medan : tp, 1977), 16.

<sup>26</sup>Olaf Schumann, *Dialog Antar Umat Beragama Di manakah Kita Berada?* (Jakarta : Dewan-dewan Gereja Indonesia, 1980), h. 88

menemukan jalan-jalan bersama untuk kerukunan beragama yang kemudian perlu didamaikan bersama.

### **C. Bergandengan Tangan Menuju Masyarakat Rukun dan Bersikap Tenggang Rasa**

Kerukunan agama dalam dimensi kultural tidak terlepas dari situasi dan latar belakang sosial budaya Indonesia. Kalau kita runut dari awal perkembangan agama di Indonesia, maka sebenarnya kita akan berbicara dalam konteks apa yang disebut oleh para ahli sebagai “Peradaban Hindu/Jawa” atau *the Indie/Javanese Civilization*. Dari pembahasan tentang kondisi sosio kultural ini mengasumsikan bahwa corak budaya seperti itu lazim disebut *cosmic-monisme*. Ini pada hakikatnya berakar pada satu asas yang bersifat Ilahi. Jadi, walaupun ada perbedaan semuanya adalah satu.

Dan keterpaduan antara kepelbagaian yang pada dasarnya satu itulah yang mencerminkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan kosmos itu. Manusia di sini dilihat sebagai mikrokosmos dalam berhadapan dengan dunia sebagai mikrokosmos. Karena asas yang asli itu bersifat ilahi maka seluruh kosmos itu merupakan kenyataan yang suci dan sakral, termasuk manusia. Atas dasar keterpaduan itu maka corak yang berbentuk adalah corak masyarakat yang bersifat komunal yang bermuara pada dasarnya pada adanya perilaku gotong royong dan bahu membahu diantara anggota masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal pokok di atas, kita memperoleh kejelasan bahwa pada dasarnya, tradisi sosial budaya Indonesia melihat kehidupan sebagai sesuatu yang utuh secara lahir dan batin serta secara material dan spiritual. Setiap pemenggalan dan pemisahan terhadap kenyataan itu dilihat sebagai sesuatu yang menciptakan kekacauan dan perpecahan sehingga tidak dapat ditolerir.<sup>27</sup> Setiap upaya pemisahan dilihat sebagai suatu yang identik dengan kejahatan atau kuasa jahat. Diakui adanya pembedaan dalam bidang kehidupan, namun tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan saling terpadu dalam sebuah kebersamaan. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa asas kekeluargaan adalah ciri khas budaya bangsa. Dalam kepelbagaian agama pun, yaitu bangsa Indonesia adalah anggota sebuah keluarga bangsa, yaitu bangsa dan rakyat

---

<sup>27</sup>Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial; Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer* (Jakarta : CIDES, 1998), H. 38.



Indonesia. Inilah yang tercermin dalam motto bangsa kita “*Bhineka Tunggal Ika*”.

Dengan demikian, maka jelas apa yang kita kenal dalam budaya Barat sebagai *managing by or through conflict* (penyelesaian melalui konflik) pada dasarnya tidak dapat diaplikasikan dalam konteks kultur Indonesia. Yang lebih tepat adalah saling asah, saling asih dan saling asuh. Namun tidak berarti bahwa semuanya harus sama. Jika timbul perbedaan pendapat ditekankan adanya penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat. Atas dasar ini maka kebebasan dan hak tidak dapat dilakukan atas landasan individualisme, namun harus dilakukan atas landasan kebersamaan atau komunalitas, melalui hubungan personal antar sesama, sebuah paguyuban manusiawi yang saling membagi dan saling memperdulikan (*community of sharing and caring*).

Pemahaman yang benar dalam konteks kerukunan beragama juga harus ditopang oleh rongga kebebasan beragama (*religious right*) yang dimiliki oleh seorang penganut agama, sehingga dengan hak ini ia tidak akan berhenti “membangun” visi keagamaannya sendiri serta memelihara semacam “moralitas” dalam dirinya.<sup>28</sup> Ia pun berhak mengkomunikasikan pemahamannya kepada orang lain tersebut secara sosial. Ia lalu butuh kata-kata, kefasihan, peristilahan bahkan juga sarana dan lain sebagainya. Kalau ia mampu, “kebenaran” yang telah diraihinya itu akan bergema secara sosial, minimal ke dalam kelompok keagamaan dari mana ia berasal. Bila corak pemahamannya diwarnai kultur keagamaan yang beragam, gemanya boleh jadi akan mengarah pada lingkup lebih luas.

Namun besar kemungkinan ia juga akan mengalami penolakan yang keras dari kalangan yang *establishment*, bisa secara halus tapi bukan mustahil secara licik dan kasar dan pada batas tertentu berupa teror ataupun *violent antagonism*. Kalau ia kuat, corak pemahamannya akan diikuti orang dan ia akan beroleh pengikut. Bersama pengikutnya ia akan berjuang terus sampai ke tingkat mengorganisir diri secara teratur. Bila kendala demi kendala dilaluinya, eksistensi gerakan keagamaan yang dibangunnya akan mendapat pengakuan di masyarakat ataupun dari pihak yang berkuasa. Itulah sebuah perjalanan panjang dan rawan demi “kebenaran”. Ia bersama pengikut setianya adalah saksi dari “kebenaran” itu.

---

<sup>28</sup>Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed.), *Passing Over Melintas Batas Agama* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 124.

Dengan perspektif kerukunan kultural ini maka setiap pemeluk agama di Indonesia selain memberikan apresiasi dan respons positif terhadap kerukunan yang berasal dari himbauan pemerintah (kerukunan struktural), lebih dari itu harus dikembangkan kerukunan yang berasal dari kalangan penganut agama sendiri, khususnya para pemimpinnya dan pemahaman-pemahaman baru mengenai ajaran agamanya menyangkut agama-agama lain. Demikianlah Teologi agama-agama (*Theologi Religionum*) dari setiap agama dan ilmu agama akan menjadi kebutuhan baik pada tingkat akademis maupun di kalangan pemimpin lembaga-lembaga agama dan bahkan penganutnya secara umum.

Pada satu sisi teologi agama-agama dari suatu agama menjadi salah satu sarana untuk memperbaharui pemikiran-pemikiran lama yang tertutup terhadap agama lain dan untuk menemukan titik-titik temu fungsi sosial kemanusiaan bersama agama-agama.<sup>29</sup> Dalam sisi yang lain ilmu agama mendorong pengenalan yang lebih utuh terhadap agama-agama lain, baik dalam perbedaan-perbedaan bangunan kelebagaannya, maupun dalam kesamaan-kesamaan fungsinya dalam kehidupan manusia pribadi dan masyarakat.

Tinjauan kerukunan dalam bingkai kultural ini dikarenakan kalau agama tidak disampaikan dengan media kultur masyarakat, ia akan memicu munculnya idiologisasi “semu” terhadap agama itu sendiri yaitu sikap keberagaman yang “berlebihan” secara fisik tetapi tidak berpijak dalam roh dan nafas kehidupannya. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak diajari untuk memahami, tetapi menyakini agama. Agama hanya menjadi bendera atau lambang dari sebuah eksistensi. Ia lahir bukan dari sebuah refleksi kesadaran yang sesungguhnya, melainkan lebih merupakan upaya penguatan status quo agama itu sendiri.

Resiko yang harus ditanggung adalah masyarakat menyikapi agama secara “buta”. Agama bukan lagi sebagai ajaran untuk belajar memilih yang terbaik dan mencapai kebenaran abadi. Ia telah dijadikan sebagai ajaran yang sudah final dan bertugas menghakimi kenyataan. Dan masyarakat pun tidak berani memahami agama melebihi dari apa yang ia dengar dan ia baca. Secara otomatis, mereka dibuat tidak berdaya untuk membedakan mana yang *pure* agama (tekstual) dan mana yang bukan (kontekstual). Keberagaman semacam ini akan melahirkan sikap eksklusif dan merasa diri paling agamis. Mereka yang berada di luar pemahaman dirinya dinilai sebagai kelompok yang kurang agamis dan bahkan dianggap sebagai kafir yang halal darahnya. Sikap

---

<sup>29</sup>Olaf Schuman, *Keluar dari Benteng Pertahanan*, (Jakarta : Gramedia, 1996), h. xii.

keberagaman semacam ini merupakan kenyataan real yang dalam masyarakat tertentu.

Melihat fenomena semacam ini diperlukan penanaman ajaran agama yang inklusif. Paling tidak agama harus menjelma menjadi sebuah kesadaran yang terbangun bersama dalam kultur masyarakat yang pluralistik. Ia tidak berdiri di luar budaya bahkan menjadi hakim terhadap budaya. Inilah salah satu pendekatan yang belum banyak dilakukan para tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan agamanya.

Pembinaan umat beragama khususnya dalam hal toleransi sikap keberagaman, tidak bisa dilihat dari semaraknya dakwah yang sering digelar, melainkan dari penanaman nilai keberagaman yang terpancar dalam sikap dan perilaku para tokoh masyarakat termasuk elit penguasa yang bertanggungjawab atas berbagai kebijakan dalam satu negara.

Dalam membina kerukunan secara kultural di Indonesia ini, maka harus diambil langkah-langkah efektif untuk menindaklanjuti upaya ke arah pembangunan kerukunan antar umat beragama.<sup>30</sup> Selama ini sudah banyak upaya yang dilakukan demi tercapainya kerjasama antar umat beragama. Salah satunya adalah diselenggarakannya dialog diantara kaum elit (cendekiawan) agama atau diantara institusi-institusi keagamaan. Akan tetapi persoalan yang sering muncul dalam masalah agama bukanlah pada tataran institusi atau diantara kaum elit agama tersebut. Justru yang sering merasakan ketersinggungan emosi keagamaan adalah kaum bawah yang secara kultural masih awam dan secara struktural masih lemah. Kemesraan antara pemerintah dengan tokoh agama selama ini tidak boleh berhenti pada kepuasan individual atau institusional, namun harus bisa disampaikan pada masyarakat sesuai dengan bahasa mereka yang berkepentingan bersama.

Oleh karena itu dialog untuk menemukan titik temu atau kerja sama antar umat beragama tidak bisa direkayasa dari institusi-institusi atas atau kaum elit agama. Ia harus lahir dari suatu keinsyafan masyarakat awam untuk benar-benar mengkonsentrasikan dirinya pada upaya kerjasama. Dan kerjasama itu akan terjalin ketika kesamarataan dan kesamarasaan tercipta diantara sesama umat beragama. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan “dapur” sehingga bisa mengkonsentrasikan dirinya pada agenda-agenda kemanusiaan.

Dengan kondisi sosiologis Indonesia yang pluralistik, setidaknya kerukunan antar penganut agama bisa dipolarisasi dalam beberapa segmen

---

<sup>30</sup>Andito (ed), *Atas Nama Agama...*, h. 116.

pembahasan untuk direalisasikan. *Pertama*, pola pembahasan kerukunan pada segmen doktrin (ajaran) agama. Anatomi kerukunan dalam segmen ini dapat dilakukan dengan media kitab suci agama-agama yaitu dengan mendiskusikan ajaran-ajaran, ayat-ayat, pesan-pesan yang berasal atau terhadap kitab-kitab suci masing-masing agama yang mengandung atau berisi ajaran-ajaran tentang kerukunan, baik kerukunan intra agama atau pun kerukunan antar agama. Tentu saja diantara kitab-kitab suci dari agama-agama yang berbeda itu mengandung perbedaan-perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut terutama dalam aspek yang bersifat prinsip seperti akidah, ibadah dan ritual. Perbedaan dibidang-bidang tersebut tidak dapat dipersatukan dan memang tak perlu dicari titik temunya. Sebab upaya mempersatukan ajaran agama yang pokok tersebut hanya akan sia-sia belaka, kecuali jika dikehendaki sebuah kerukunan adalah sinkritisme.<sup>31</sup> Sinkritisme ditolak oleh semua agama-agama yang ada di Indonesia.

Ajaran-ajaran agama yang digali dari kitab-kitab suci tersebut dalam hubungannya dengan upaya peningkatan kerukunan adalah ajaran-ajaran agama yang mengandung atau beraspek sosial kemasyarakatan, seperti pesan-pesan agama yang universal yang melekat pada semua ajaran agama, seperti kewajiban menolong orang miskin, menegakkan keadilan, menghormati orang lain, membela kaum tertindas dan sebagainya. Pesan-pesan tersebut bersifat universal, diajarkan oleh semua agama seperti yang termaktub dalam kitab-kitab suci agama-agama. Pesan-pesan tersebut menjadi pesan universal yang menyangkut seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, ras, kewarganegaraan perbedaan lainnya. Dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa – suatu tujuan yang dikehendaki oleh kerukunan umat beragama- penggalian atau pengkajian pada segemen doktrin dalam kitab suci dari agama-agama sangat perlu dilakukan dan hasilnya sangat urgen untuk disosialisasikan ke masyarakat.

*Kedua*, pada segmen historis-sosiologis atau empirik kerukunan beragama akan menemui titik singgungnya dalam realitas kehidupan beragama secara nyata. Dalam kancah pergaulan bangsa, Indonesia mempunyai perbendaharaan dari aneka bentuk dan tradisi yang hidup tentang kerukunan beragama secara kultural. Kiranya hanya untuk memberikan bukti kerukunan

---

<sup>31</sup>Sudjangi (penyt.), *Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1997/1998), seri 2, h. 4.

itu mesra dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang majemuk di bawah ini dapat dilihat kerukunan yang berasal dari beberapa suku, ras dan agama yang di dalamnya.

Kerukunan dalam bingkai kultural dalam masyarakat Indonesia mengungkapkan bahwa begitu besar dan kokohnya rasa toleransi antar agama yang dijalankan oleh masing-masing agama. Oleh karena itu tidak salah kiranya kalau kita menyoroti kerukunan dalam masyarakat agama di Indonesia ini sebagai contoh kerukunan yang tumbuh secara kultural.

Di Lingkungan masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah upaya menghindari konflik sehingga dapat diwujudkan kerukunan hidup antar umat beragama tercermin dalam rumah *Betang*. Dalam rumah Betang yang dihuni oleh beberapa keluarga, ada diantara keluarga-keluarga tersebut yang berbeda-beda agama. Sehingga terdiri dari penganut Islam, Kristen atau penganut faham *Kaharingan*.<sup>32</sup> Mereka yang beragama Islam di tempatkan di bagian hulu sungai, agar jika anggota keluarga yang beragama lain memotong babi hasil buruannya, air yang telah tercampur dengan darah babi tersebut tidak mengalir ke tempat keluarga yang beragama Islam. Babi bagi umat Islam adalah binatang yang dianggap najis, daging dan darahnya haram dimakan. Upaya ini untuk menghindari konflik antar warga yang berlainan agama.

Di kalangan masyarakat Madewi, Jembrana, Bali kerukunan hidup antar umat Hindu dan umat Islam terwujud berupa Subak yang antara lain karena mereka hidup di lingkungan pedesaan yang sama dengan pengalaman hidup dan tantangan alam yang sama pula. Mereka mempunyai *awig-awig* atau aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan, manusia dan manusia lainnya dan manusia dengan alam. Di dalam *awig-awig* tersebut misalnya diatur semua anggota Subak Madewi baik Islam maupun Hindu diberikan kebebasan untuk melaksanakan upacara keagamaan masing-masing. Yang menarik pada Subak Madewi ini adalah adanya Pura dan Mushala dalam satu lokasi. Antara umat Islam dan Hindu mengadakan upacara dalam waktu yang berbeda sehingga satu sama lain tidak menjadi saling mengganggu.<sup>33</sup>

Lain lagi dengan lingkup kehidupan keagamaan di Maluku, di sana dikenal suatu adat yang sudah mentradisi yang disebut *Pela*.<sup>34</sup> *Pela* mempunyai

---

<sup>32</sup>Sudjangi (penyt.), *Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1996/1997), seri 1, h. 3.

<sup>33</sup>Sudjangi (penyt.), *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta : Departemen RI, 1995/1996), seri 2, h. 38.

<sup>34</sup>Sudjangi (penyt.), *Bingkai Sosio-Kultural...*, h. 101.

beberapa arti antara lain dari kata *pelau* yang berarti saudara laki-laki. Istilah *pela-pela* berarti tanda, simbol, gambar dengan pola dan bentuk yang mempunyai arti atau pesan tertentu. Dalam Realitasnya *pela* menunjukkan kepada ikatan kesatuan persaudaraan antara dua atau lebih negeri (desa), baik itu dari negeri-negeri Kristen atau *Pela* mempunyai negeri-negeri Islam maupun negeri Islam dengan negeri Kristen. Di dalam *pela* terdapat ikatan persaudaraan dan kekerabatan yang kuat, saling tolong menolong dalam berbagai hal dan aktifitas. Dengan *pela* dapat dihindari pertentangan atau permusuhan diantara pihak-pihak yang terkait dengan hubungan *pelanya*. Hubungan *pela* bersifat lintas negeri, lintas agama dan lintas multi suku bangsa di Maluku.

Bentuk tradisi kerukunan hidup beragama lain yang juga ikut memperkaya adalah adanya konsep *Dalian Natolu* (tiga tungku) dalam masyarakat Batak yang berupaya meningkatkan kerukunan sebab dalam upacara-upacara budaya mempertemukan para anggota masyarakat baik yang sama maupun berbeda agamanya. Pengertian *Dalian Natolu* adalah bahwa setiap kampung mempunyai kesepakatan bersama yang diperankan oleh tiga komponen. Yaitu *Mora* (pengambilan gadis), *Kahanggi* (kawan keturunan) dan *Anak Boru* (pemberian gadis).<sup>35</sup> Konsep ini berlangsung secara dinamis, sebab di kampung tertentu seseorang memerankan fungsi *Mora*, namun jika ia pergi ke kampung lain, ia dapat memerankan fungsi *Anak Boru* dan seterusnya.

Dalam konteks Indonesia dengan *background* sosio kultural yang sangat beraneka mempunyai makna yang signifikan dalam menjembatani bukan hanya antar agama namun lebih dari itu harus mampu menjadi kohesi sosial dari multietnis yang hadir di negeri ini. Sehingga ini akan berimbas pada pengalaman beragama yang terdiri dari masyarakat-masyarakat yang mempunyai pengalaman hidup dalam komunitas yang beragam agamanya di mana mereka telah menciptakan institusi-institusi atau tradisi yang mampu meredam kemungkinan terjadinya konflik antar umat beragama.

Di samping itu harus juga ada solusi dari beberapa kesulitan implementasi kerukunan yang bersifat kultural ini, karena suku-suku atau masyarakat-masyarakat lokal yang bisa hidup homogen dalam suku dan agama yang relatif masih tertutup, masih perlu belajar banyak dalam menghadapi arus perubahan cepat dewasa ini, terutama dalam perubahan komunikasi, transportasi dan juga mutasi, mobilisasi dan perubahan demografi yang berlainan suku dan agama juga kebudayaannya. Seringkali diantara masyarakat-

---

<sup>35</sup>Sudjangi (penyt.), *Bingkai Sosio-Kultural...*, h. 6.

masyarakat itu belum siap untuk menerima perubahan-perubahan yang sangat cepat, sehingga dalam interaksi sosial antara kelompok-kelompok pendatang dan penduduk lokal tidak dapat dihindarkan terjadinya berbagai konflik, baik itu konflik tertutup (kecil) ataupun konflik terbuka (besar) antara kedua kelompok tersebut. Para pendatang biasanya sudah lebih siap dalam menghadapi perubahan, sedangkan penduduk lokal biasanya lebih kurang siap untuk menerima perubahan. Maka sebagai upaya mekanisme defensifitas diri dari ancaman keberadaannya, mereka beraksi dengan cara menolak perubahan-perubahan tersebut, menolak kehadiran warga pendatang. Serta untuk menggalang solidaritas, maka diaktifkanlah suku atau agama mereka yang biasanya berbeda dengan suku dan atau agama warga pendatang.

Elaborasi tentang kerukunan yang sarat dengan muatan kultural dari komunitas-komunitas berbeda agama dan multi ras, suku dan kepentingan harus terus diupayakan berjalan dan dinamis, agar diketahui pola-pola hubungan antar umat beragama baik yang mendukung terwujudnya kerukunan (kooperasi) maupun yang mengarah kepada terjadinya disharmoni agama-agama.<sup>36</sup>

Dengan mengetahui pola-pola kerukunan ini maka akan dengan tidak begitu sulit dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan antar umat beragama di satu pihak, sekaligus juga dapat diupayakan untuk menghindari atau mengurangi konflik di pihak lain.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Kalau ditelaah lebih luas ternyata dalam bentuk-bentuk aslinya agama dengan muatan ajaran yang tidak melepaskan kadar kebenarannya tetap memberikan peluang untuk hidup damai, sehingga bentuk kerukunan kultural ini dapat ditemukan di pulau Jawa yaitu Cirebon, Bekasi dan juga di luar pulau Jawa misalnya di Ujungpandang dan lainnya. Baca : Nuhriyon M. Nuh (penyt.), *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1997/1998), seri 3.

<sup>37</sup>Dalam penelaahan yang akademik dan prospektif baru-baru ini banyak sekali pihak yang berkepentingan untuk menyusun usaha-usaha baru dari agama-agama yang hadir di Indonesia dalam mengatasi konflik searah dengan perubahan sosial. Lebih lanjut bisa ditelaah dalam hasil tulisan “Studi Bersama Tentang Dialog sebagai Instrumen Pencegahan Konflik SARA perspektif Relasi Historis dan Normatif Sosial-Politik-Ekonomi, Sosial-Budaya dan Agama”, yang diselenggarakan oleh Institut DIAN INTERFIDEI di Yogyakarta, pada tanggal 1 – 5 Desember 1999.





### BAB 3

## POTRET KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA DALAM MENEMBUS ARUS PERUBAHAN SOSIAL

### A. Intensifikasi Media Dialog Antar Umat Beragama

Kedewasaan beragama yang dicerminkan dengan pengalaman beragama seorang penganut agama senantiasa diparameterkan dengan dimensi imannya. Karena dengan iman merupakan unsur internal yang harus bisa memberikan inspirasi kepada gerakan lahiriyah. Setidaknya dengan iman tersebut seorang penganut agama akan merasakan kristalisasi yang berasal dari, *pertama*; pengalaman iman adalah pengalaman berintim diri dengan Tuhan Yang Maha segalanya, karena Tuhan juga Maha Baik, maka seseorang yang beriman semestinya juga memancarkan kualitas pribadi yang baik. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab suci, misalnya al-Qur'an, kata iman selalu dihubungkan dengan amal saleh.<sup>1</sup> Dengan kata lain bahwa iman yang bersifat personal harus melahirkan perilaku sosial yang saleh. Kita tidak bisa mengukur iman seseorang, tetapi bisa ikut merasakan buahnya berupa amal sosial yang konstruktif. *Kedua*: iman yang dewasa bisa membedakan antara tuntunan doktrin agama yang formal dan dorongan hati nurani yang bersifat ilahi. Hukum agama bersifat formal eksoterik, sedangkan kesadaran iman bersifat pencerahan esoterik.

Oleh karenanya ketaatan pada agama bisa melahirkan sikap ideologis, sedangkan pencerahan iman membuat seseorang berperilaku tentang, bijaksana dan ingin berbagi kedamaian dengan orang lain. Iman memang memerlukan institusi keagamaan tetapi ketika institusi keagamaan terpisahkan dari ruh iman, yang muncul adalah kecenderungan sikap tiran dalam rangka memperjuangkan egonya dengan mangatasnamakan Tuhan. Pada akhirnya dengan kedalaman imannya, seseorang akan menyadari betapa pentingnya menghargai “iman” yang tidak seiman dengannya. Oleh karena itu dialog antar iman akan merupakan tuntutan orang beragama yang beriman.

Dalam mencermati dialog<sup>2</sup> antarumat beragama ini kita setidaknya memerlukan sebuah *insight* yang cukup *legitimate* dan bisa mencerahkan

---

<sup>1</sup>Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta : Paramadina, 1998), h. 193

<sup>2</sup>Dialog agama yang terkontekstualisasikan dalam sejarah agama-agama merupakan sebuah “obrolan” tentang makna keimanan, ritualitas dan etika, yang dengan jelas mengambil bagian tempat baik secara formal atau bahkan tidak tercatatkan, yang berawal dari

penganut agama-agama yang ada. Dalam beberapa ajaran dan atau pun malah kitab suci berbagai agama terutama yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat, misalnya Islam atau Kristen, terdapat suatu realitas bahwa dialog adalah salah satu dorongan internal yang harus dipraktikkan dalam kehidupan beragama yang pluralistik. Agama Kristen menyimak bahwa dialog yang tercantum dalam dokumen-dokumen dialog dari hasil Konsili Vatikan II, khususnya dokumen *Ensiklik Ecclesiam Suam*, terdeskripsikan dalam tiga wawasan. *Pertama*, dialog yang berkelindan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai komunikasi timbal balik. Tujuan komunikasi timbal balik. Tujuan komunikasi ini adalah dapat berupa sekedar saling tukar menukar informasi untuk meraih kesepakatan. *Kedua*, dialog lebih berkaitan dengan tugas evengelisasi yang harus jalankan dalam semangat dialogis. Dialog dalam arti ini difahami sebagai sikap hormat, penuh persahabatan, terbuka, suka mendengarkan orang lain. *Ketiga*; dialog yang memiliki arti khusus, yaitu dialog yang merupakan hubungan agama-agama yang positif dan konstruktif. Hubungan ini dilangsungkan dengan pribadi-pribadi dan jemaah-jemaah dari agama-agama lain, yang diarahkan untuk saling memahami dan saling memperkaya dalam ketaatan kepada kebenaran dan hormat terhadap kebebasan, juga termasuk di dalamnya kesaksian dan pendalaman keyakinan keagamaan masing-masing.<sup>3</sup>

Islam mengintrodusir formula dialog yang tidak terlepas dari peranan bapak monoteisme dan sang *Patriarch* yaitu Ibrohim, ketika itu juga al-Qur'an

---

pertemuannya dengan sistem-sistem kepercayaan yang berbeda. Dialog bisa dibagi ke dalam empat bentuk : (1) Dialog yang bersifat diskursif; yang diawali dengan debat dan diskusi dan melibatkan pertemuan, dan melibatkan pertemuan, saling mendengar dan diskusi pada level komponen intelektual. (2) Dialog kemanusiaan, yaitu dialog yang didasarkan dari gambaran dan asumsi bahwa ada kemungkinan manusia bisa bertemu secara "murni". (3) Dialog sekuler yang menekankan bahwa ada sebuah tugas yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan, para kaum yang beriman yang berbeda tanpa memperdulikan terhadap asal keimanan mereka. (4) Dialog spiritual, yang fokusnya bukan pada debat atau diskusi, namun lebih pada do'a dan meditasi. Lebih lanjut baca : Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion, "Dialogue of Religion"*, (New York : Macmillan Publisher, 1995), Vol. IV, . 347.

<sup>3</sup>Watak dari arti ketiga ini menggambarkan bahwa gereja menginginkan dialog yang sebenarnya dan hal itu terdapat dalam dokumen tentang dialog (seperti *Dialogue and Mission* dan *Dialogue and Proclamation*). Dialog yang sebenarnya dijalankan dalam lingkup kebenaran dan kebebasan dan tidak membantu pencarian terhadapnya. Sebab dialog yang sejati tidak hanya memajukan kerjasama dan sikap terbuka, melainkan juga memurnikan dan mendorong untuk menggapai kebenaran dan kehidupan, kesucian, keadilan, kasih dan perdamaian, serta aneka dimensi dari dan kerajaan Allah. Lebih lanjut baca : Armanda Riyanto, *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), h. 102.

mengungkapkan bahwa keberadaan Ibrahim bukanlah seorang Yahudi maupun Nasrani melainkan seorang yang *hanif*, seorang muslim dan cenderung pada kebenaran dan seorang muslim yang menundukkan dirinya hanya kepada Allah.<sup>4</sup>

Dewasa ini “agama Ibrahim” atau “iman Ibrahim” adalah agama mayoritas umat manusia, belum diperhitungkan mereka yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa, namun tidak secara formal memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.<sup>5</sup> Arah yang ingin dicapai oleh al-Qur’an sebenarnya adalah kata sepakat (*kalimat al-sawa*)<sup>6</sup> diantara kelompok-kelompok yang bertikai.<sup>7</sup>

Dari sinilah Islam menganjurkan sebuah dialog antar iman (*interfaith dialogue*) di mana setiap pemeluk bisa memperdalam iman masing-masing dan menyampaikan pengalaman imannya pada orang-orang lain. Prinsip-prinsip ini bukan hanya berlaku diantara sesama muslim, tetapi juga merupakan pedoman pergaulan dengan para pemeluk agama lain hanya sebagai muslim, memiliki prinsip-prinsip sendiri yang khas, sebagai pedoman berdialog dengan para pemeluk agama lain sebagaimana pemeluk agama lain juga berpedoman pada iman yang mereka yakini. Namun dialog antar iman yang dilakukan secara tulus dan jujur akan menghasilkan proses saling menyuburkan dan saling berdekatan pada kebenaran.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Allah berfirman : ”Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, namun ia adalah seorang yang lurus (*hanif*) dan seorang yang menyerahkan diri (*muslim*) dan dia sekali-kali bukanlah dari kategori orang-orang yang menyekutukan Tuhan (*Musyrik*)”. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI), h. 86. Selanjutnya disebut : *Al-Qur’an dan Terjemahannya*...

<sup>5</sup>Farid Essack, *Qur’an, Liberation and Pluralism An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* (Finland : WSOY, 1997), H. 155.

<sup>6</sup>Seperti tercantum dalam ayatnya : “Hai ahli kitab, marilah kita sampai kepada kata sepakat (*kalima al-sawa*), di mana tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah sesuatu kecuali Allah dan tidak akan mempersekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan (sasaran pengabdian) selain Allah. Jika mereka menolak, maka katakanlah : “Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah”, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., h. 86.

<sup>7</sup>Reaksi pertikaian juga bisa dipicu oleh adanya gerakan dari satu penganut agama untuk memprovokasi atau bahkan memunculkan legitimasi kesalahan pada agama yang lain, berkenaan dengan ini Allah berfirman : “Hal orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain”. *Al-Qur’an dan terjemahnya*..., h. 847.

<sup>8</sup>Dengan referensi yang normatif ini akan timbul pertanyaan, mungkinkah seorang muslim berbicara tentang agama lain, dengan cara bertolak “dari dalam” agama yang bersangkutan? Jawabannya adalah, bahwa seorang muslim tidak akan melihat agama lain dari

Secara normatif, dalam setiap agama ada garis yang tidak melarang bahkan senantiasa mengharuskan untuk berdialog dan bahkan menjalin kerjasama dengan agama lain. Sebagaimana kalau dilihat dalam Kristen, bahwa dorongan atau seruan untuk mengajak dialog dengan “iman” lain merupakan perilaku yang dianjurkan. Sehingga menolong orang-orang agar memperhatikan dalil-dalil atau aturan agama mereka yang membuka hatinya bagi rahmat ilahi adalah pertolongan halal. Menasehati agar berdo’a, bertobat dan bersyukur kepada Tuhan adalah sumbangan baik kepada pihak kita (baca : Kristen). Menjelaskan dan mengemukakan bukti-bukti yang syah mengenai dalil-dalil agama lain yang menganjurkan do’a dan itulah merupakan dialog antar agama yang tepat. Bila misalnya seorang Muslim atau Hindu yang berpendidikan tinggi dihindangi oleh keragu-raguan tentang adanya Tuhan, makna hidup, kewajiban moral dan lainnya dari perilaku yang baik menurut agamanya, maka seorang Kristen yang mempunyai pendidikan sepadan dan berjiwa diaog dan dengan tanggungjawab serta khidmat sedia menguraikan persoalannya, tanpa mencoba “memancing” orang itu untuk masuk ke agama orang yang menasehatinya.

Sebagai anjuran formal dari Kristen adalah adanya dokumen Konsili Vatikan II tentang zaman kita yang menganjurkan untuk berdialog. Dalam kontak antar agama dibedakan antara polemik, apakah itu yang bersifat fisik (perang salib, jihad) atau yang bersifat intelektual (*diatribes*).<sup>9</sup> Keduanya bersifat ofensif dan bertujuan mengalahkan lawan dan melumpuhkan kegiatannya. Apologetik bersifat defensif; kaidahnya sendiri dibuktikan kebenarannya, ketika dikonfrontir oleh lawan dialognya masih merespon bernada polemis. Dalam hal ini antara orang yang berpolemik dan apologetis tidak bisa keluar dari ruang lingkup pikirannya sendiri, tidak juga beralih ke dalam alam pikiran lain atau alam pikiran bersama.

---

kerangka pemahamannya tentang agama. Pertama-tama ia akan bertolak dari prinsip “bagimu agamamu bagiku agamaku” prinsip ini akan dinyatakan pada mereka yang telah jelas-jelas kafir, yaitu memiliki keyakinan yang berlawanan dengan keyakinan muslim. Sesungguhnya begitu, seorang muslim akan berusaha untuk mencari unsur-unsur kebenaran pada keyakinan lain, karena seorang muslim adalah seorang yang hanif, yang cenderung pada Kebenaran yang berusaha mencari dan mendekati Kebenaran dengan asumsi bahwa dimanapun, dalam masyarakat manusia bisa ditemui Kebenaran, karena Allah telah mengutus rosul-rosulnya pada setiap umat atau masyarakat. Lebih lanjut baca : M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta : Paramadina, 1996), h. 151. Bandingkan juga Fazlur Rahman, *Islam*, terj. (Bandung : Pustaka, 1984), h. 24.

<sup>9</sup>YWM, Bakker, SY, *Umat Katolik Berdialog Dengan Umat Beragama Lain* (Yogyakarta : Penerbitan Yayasan Kanisius, 1976), h. 90.

Sikap terbuka merupakan jiwa dari dialog, pergaulan dengan orang berkeyakinan lain pada tingkat yang sama, dengan maksud memahaminya, mencari saling pengertian dan harga menghargai. Dalam dialog kesadaran agama pada dua pihak diperkuat yang dicari adalah kebenaran universal yang tidak dimiliki penuh-penuh oleh sepihak saja. Jika satu pihak tidak mau mengaku unsur kebenaran universal yang terdapat pada pihak lain, atau tidak memperkaya diri dengannya maka dialog berubah menjadi dua monolog sejajar.

Dialog sejati harus dimulai dan barangkali menetap untuk beberapa waktu pada tingkat kongkrit pengalaman rohani. Itulah lebih menguntungkan daripada sekaligus naik ketingkat doktrin dan sistem. Maksud dialog antar agama tidak saja untuk mencari saling pengertian, melainkan untuk mengambil bagian dalam pengalaman rohani seorang "lain". Pengabdian kepada agama-agama harus bertolak dari sini, setelah bertahun-tahun lamanya mengabdikan pada tingkat tersebut kita akan dapat menemukan pembukaan kepada pengabdian pada tingkat sistem dan doktrin sendiri.

Sebagai manifestasi dari dialog antar agama, hal itu berimplikasi kepada sebuah tata aturan dalam seruan kepada agama lain dalam agama Kristen. Kalau dulu umat Kristiani diperintahkan untuk keluar dan mengajak orang di semua bangsa menjadi penganut agama tersebut, bahkan kepada taraf pemaksaan karena dimotivasi oleh rasa ingin menyelamatkan dan rasa superioritas sebagai orang-orang Barat yang memiliki keunggulan dibanding bangsa-bangsa selain mereka. Sekarang hal itu berubah menjadi usaha untuk melihat ke dalam. Kalau dulu bersifat ofensif, sekarang menjadi defensif. Artinya, hanya berusaha untuk memahami ajaran sebaik-baiknya. Orang yang bertanya dan mempelajari ajaran Kristen, diberitahu dan dijelaskan dengan cara lemah lembut dan penuh rasa hormat.

Orang Kristen pada saat ini tidak bisa lagi mengklaim diri sebagai pemilik satu-satunya jalan keselamatan. Mereka harus mengakui bahwa jalan keselamatan dan kebenaran itu terdapat juga di tempat lain, dalam agama lain. Karena itu, masing-masing harus berusaha untuk menciptakan kondisi di mana para pemeluk agama apapun dapat mengangkat derajat keimanannya. Secara langsung bahwa *shifting paradigm* dalam dunia Kristen dan ini dipandang cocok untuk dikembangkan di masa sekarang dan masa depan. Sebab orang-orang Kristen saat ini tidak bisa lagi mengatakan bahwa selain mereka adalah orang-orang yang jauh di sana yang tidak mereka kenal, sebagaimana pada masa lalu. Realitas sekarang mereka hidup berdampingan dengan para pemeluk

agama lain, sehingga tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka itu salah dan hanya orang Kristen saja yang benar. Tentu harus diakui bahwa tidak semua orang Kristen menyetujui paradigma ini, namun begitu paradigma ini masih terus berproses dan mencari bentuknya yang tepat.<sup>10</sup>

Perwujudan miliu yang dialogis antar penganut agama-agama, tak terlepas dari karakteristik dasar manusia sebagai pengemban tugas tersebut. Sejak awal manusia didesain dan diciptakan sebagai makhluk berakal, ia juga merupakan makhluk ruhani. Di dalamnya terdapat ruh ketuhanan yang hidup kekal tak kenal kematian. Oleh karenanya tak pernah manusia itu sendiri tanpa kehidupan yang menyertainya. Hidup berarti juga berpikir, merasa, berkreasi dan juga berdialog. Adakalanya manusia berdialog dengan dirinya, dengan sesamanya, juga dengan alam lingkungannya, dengan masa lalunya dan dengan hal-hal yang berkaitan selama manusia itu masih berada.

Manusia adalah makhluk yang paradoksal. Kadang-kadang ia ingin menyendiri menjaga eksklusivitasnya, namun pada saat yang bersamaan ingin berada bersama yang lain.<sup>11</sup> Terlalu akbar, sunyi dan mengerikan kalau saja bumi ini dihuni sendirian. Hanya dengan berada dan melibatkan diri dengan yang lain manusia akan menghayati kemanusiaannya dan keakuannya. Tetapi merasa terganggu kesendiriannya. Bagaimana pun, seseorang merasa senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Melalui dialog dengan orang lain maka seseorang akan tumbuh menjadi dirinya sendiri. Setiap individu adalah unik, suatu keunikan yang tumbuh bersama keunikan orang lain, yang pada gilirannya melahirkan keunikan orang lain, yang pada gilirannya melahirkan keunikan kita. Kata hidup bersama dalam perbedaan dan berbeda dalam kebersamaan. Orang yang tidak bisa menerima dan menghargai keunikan

---

<sup>10</sup>Perubahan sikap ini tidak terlepas dari nuansa relativitas dan pluralitas yang selalu *debatable*. Dengan sebuah pengertian yang bisa diperhitungkan sisi keuntungan nilai *advantage*-nya, bahwa relativitas bukan dimaksudkan sebagai penolakan total terhadap adanya standar umum, nilai-nilai fundamental keagamaan; prinsip-prinsip tauhid dan lainnya, namun relativitas (pluralitas) adalah merupakan istilah “praktis” yang sangat dibutuhkan dalam dunia pemahaman penafsiran dan pemaknaan karena istilah tersebut dimaksudkan sebagai gambaran atau potret realitas betapa perbedaan kultur, agama, bahasa dan tradisi memberikan gambaran dunia yang juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut baca : M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer* (Bandung : Mizan, 2000), h. 82. Selanjutnya disebut : M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam...*

<sup>11</sup>Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over Melintas Batas Agama* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1999), h. 42. Selanjutnya disebut : Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over...*

orang lain dan tidak mampu lebur dalam proses dialog dengan orang lain adalah orang yang gagal memahami diri dan sesamanya. Kehidupan adalah sebuah proses dialog terus menerus, dalam dialog seseorang akan memberi dan menerima. Untuk itu melakukan dialog secara dewasa dan produktif tentu saja diperlukan kesabaran, pengalaman, kepercayaan diri serta kematangan pribadi. Dialog yang produktif tidak akan terwujud jika dari masing-masing partisipan tidak ada kesediaan untuk membuka diri, kesediaan saling memberi dan menerima secara sukarela dan antusias.

Dialog antar penganut agama-agama terwujud hanya ketika para penganut tersebut bisa hidup dijalani bersama, dan semua persoalan manusia adalah juga persoalan yang ditanggung dan dirasakan penganut agama secara keseluruhan. Termasuk persoalan berketuhanan dan masalah agama serta keberagaman adalah juga persoalan yang dihadapi oleh subyek yang sama. Dan damai serta kreatif kalai tali pengikatnya adalah ikatan cinta, dan disadari rasa saling menghormati, saling mempercayai serta masing-masing penganut bersikap bisa dipercaya.

Dialog mengandung arti yang seluas-luasnya, bisa secara formal dalam ruangan tertentu dengan pemeluk agama tertentu. Bisa secara alami antara gaya hidup satu agama tertentu yang dikristalisasikan dalam kehidupan sehari-hari yang terwujud dalam pergaulan. Bisa juga dialog secara intelektual dengan merferensi kepada sumber normatif keilmuan yang validitasnya tidak bisa meragukan dan bisa menambah keyakinan kepada peserta dialog. Di sini dialog berfungsi lebih sebagai sarana untuk berbagi pengalaman yang karenanya, melalui dialog ini. Terjadi proses saling memperkaya dan mendalami pengalaman dan tradisi keagamaan masing-masing. Dengan kata lain, bahwa dialog merupakan perbincangan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda yang tujuan utamanya adalah saling belajar antar peserta dialog. Sehingga masing-masing peserta tersebut bisa saja mengubah pendangannya dan tambah meningkat pengalaman religiusitasnya. Dialog bukanlah perdebatan, dalam dialog kawan harus mendengarkan kawan yang lain secara terbuka dan penuh simpatik sehingga masing-masing berupaya mencoba memahami posisi yang lain secara tepat dan memandangnya harus dari dalam posisi mereka yang dipahami.

Beranjak dari pemahaman yang pluralistik, dalam konteks ke-Indonesia-an dapat ditangkap bahwa wilayah nusantara memiliki sosok yang bisa diamati dengan sifat khusus dari aneka agama. Berbagai agama dan

kepercayaan diberi ruang gerak yang bebas, diakui dan dijamin kebebasannya. Dari fenomena historis ini, bangsa Indonesia sejak awal sudah hidup dan mengembangkan religiusitas manusia Indonesia, dari taraf animisme menuju bentuk-bentuk hidup keagamaan seperti yang *de facto* ada di Indonesia saat sekarang. Keanekaragaman agama dan kepercayaan ini makin hari makin memerlukan usaha dialogal. Pada tingkat nasional Indonesia sudah memperlihatkan perjalanan dialog yang cukup lama dan panjang. Dalam sejarah dialognya ada dua pola kerukunan antar umat beragama, yaitu pola kerukunan tradisional.<sup>12</sup> Dalam pola kerukunan ini kerap kali tidak jelas adanya batas antara agama yang satu dengan agama yang lain, semua agama sama saja dalam arti semuanya kebenaran. Memang kerukunan sudah tercapai namun harus antara agama-agama menjadi kabur, akibatnya suatu ketika bisa muncul krisis apabila pada suatu saat agama-agama mulai mencari dan menerima identitasnya masing-masing. Dan kalau krisis ini terus berkelanjutan maka ada kecenderungan gairah untuk hidup rukun juga berkurang, bahkan di sana-sini mulai muncul kericuhan dan konflik.

Partisipasi dialog antar agama dalam pembangunan bangsa ternyata memberikan kontribusi yang sangat signifikan dan menentukan. Sehingga ketika bangsa Indonesia sedang memasuki era pembangunan, sikap saling menghormati antar pemeluk agama harus dibina, dikembangkan, dihayati dan diamalkan.<sup>13</sup> Pembangunan di Indonesia banyak sekali tergantung kepada sikap agama terhadap dialog tersebut, juga sangat tergantung kepada kerukunan hidup antar agama.

Dengan realitas seperti ini maka pemerintah menciptakan pola kerukunan dan dialog baru. Upaya itu dilakukan dengan mengajak para tokoh agama-agama sepakat untuk menyatakan akan menghentikan semua usaha penyebaran agama. Juga akan ditempuh dengan cara dialog di setiap daerah untuk mencari kode etik pergaulan antar agama. Cukup banyak dialog yang membawa hasil, namun harus diakui juga bahwa kebebasan agama dan beragama, pluralistik keagamaan belum sampai disadari konsekwensinya sampai yang terakhir.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>M. Yuwana Marjaka, *Kemungkinan dan Batas-batas Dialog Antar Umat Beragama* (Yogyakarta : Seri Pastoral No. 97, 1983), h. 29.

<sup>13</sup>Silsilah Editorial Board (ed.), *Inter-religious Dialogue : A Paradox?* (Philippines : Silsilah Publications, 1991), h. 105.

<sup>14</sup>A. Mukti Ali, *Dialog Antar Agama* (Yogyakarta : Yayasan Nidia, 1970), h. 43



Media dialog yang tepat bagi perkembangan masyarakat keagamaan yang kondusif adalah paling tidak harus memulai pendekatan dialog yang memediasi dan bertolak dari ajaran agama masing-masing. Ketika, misalnya, umat Islam berdialog dengan umat Kristiani maka yang dikedepankan adalah dengan membedah ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dengan keasliannya, (terlepas dari perkembangan syari'at dan ilmu *ushul al-din* di kemudian hari) yang ternyata lebih dekat dengan ajaran injil dan tidak berpolemik dengan dogma yang diimani oleh umat Kristiani.

Sikap dan perilaku penting dalam dialog adalah dengan kesadaran diri seorang penganut untuk tidak terjadinya titik singgung yang konfrontatif dengan penganut agama lain. Terwujudnya dialog yang kondusifitasnya terjaga, beranjak dari pendekatan yang selaras, bertolak dari masing-masing orang yang beragama yang dapat mereka pahami, lebih mencari segi-segi persamaan. Sikap semacam itu bisa tercapai oleh masing-masing agama jika mau menampung nilai-nilai keagamaan lain. Menampung berarti menanggapi dengan kritis nilai-nilai keagamaan setempat dan mengintegrasikan dalam kehidupan keagamaan masing-masing agama.

Kesenantiasaan berdialog pada dasarnya merupakan dari keinginan untuk mengkonseptualisasi dan membagi pengalaman keagamaan dengan penganut agama lain. Relasi keagamaan di Indonesia yang berwajah pluralistik setidaknya harus menjamin keamanan untuk berdialog, sehingga dialog tidak dianggap sebagai rutinitas elit atau malah penganut keagamaan *an sich*, yang *useless* dan *meaningless*, tanpa tujuan dan tidak peduli lingkungan sosialnya. Untuk memulainya kita harus merekonstruksi dialog yang didasarkan dari beberapa praasumsi.<sup>15</sup> *Pertama*; bahwa dalam semua agama ada pengalaman mengenai suatu realitas yang mengatasi konsepsi manusia. *Kedua*; bahwa realitas itu dipahami dengan berbagai cara baik dalam masing-masing agama maupun di kalangan semua agama dan bahwa pengakuan terhadap pluralitas diperlukan baik untuk melindungi kebebasan beragama maupun untuk menghormati keterbatasan manusiawi. *Ketiga*; bahwa bentuk-bentuk pluralitas

---

<sup>15</sup>Pembahasan praasumsi ini merupakan upaya awal untuk merumuskan syarat-syarat dialog antar agama di masa kesekarang dan yang akan datang. Sejalan dengan itu praasumsi dan persyaratannya memang sederhana, tidak lengkap dan pada tempatnya apabila menimbulkan salah paham. Namun praasumsi dan persyaratan tersebut menggambarkan satu usaha untuk mengadakan refleksi yang kritis terhadap diri sendiri menyangkut pengalaman masa lampau dan atas dasar itu merumuskan beberapa pedoman untuk dialog. Lebih lanjut baca : Harold Coward, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama* terj. (Yogyakarta : Kanisius, 1989), h. 185.

agama-agama berfungsi sebagai alat. *Keempat*; bahwa karena keterbatasan kita dan sekaligus kebutuhan kita akan komitmen terhadap suatu pengalaman partikular mengenai realitas yang transenden, maka pengalaman partikular kita, meskipun terbatas, akan berfungsi dalam arti yang sepenuhnya sebagai kriteria yang mengabsahkan pengalaman keagamaan pribadi kita sendiri. *Kelima*; bahwa ajaran agama-agama yang hadir di muka bumi ini mengenai toleransi kritis dan keharusan moral harus selalu diperhatikan. *Keenam*; bahwa melalui dialog yang kritis terhadap diri sendiri kita harus menerobos lebih jauh ke dalam pengalaman partikular sendiri mengenai realitas transenden (dan mungkin ke dalam realitas transenden orang-orang lain).

Berpihak dari praasumsi tersebut, maka untuk terjalannya sebuah dialog juga harus diperhatikan *ground rules* dialog sehingga akan menjamin kelanggengan dan mencapai hasil yang positif. Aturan main tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Swidler<sup>16</sup> bisa berupa :

*Pertama*; tujuan utama dialog adalah untuk belajar dan bisa saja mengubah atau meningkatkan pemahaman tentang realitas, yang kemudian melahirkan tindakan yang tepat. Ini artinya bahwa pandangan seseorang harus dipahami secara lebih proporsional bagi masing-masing peserta dialog, maka kendati mengalami perubahan pandangan keagamaannya, maka perubahan tersebut betul-betul signifikan bagi orang yang bersangkutan, bukan karena hal lain di luar kesadaran dirinya.

*Kedua*; dialog interreligius dan interideologi harus menjadi dua sasaran, karena pada satu sisi, setiap agama dan ideologi memiliki komunitas dan di sisi lain antara komunitas agama dan ideologi menjadi satu komunitas.

*Ketiga*; Setiap partisipan dalam dialog harus betul-betul jujur, tulus dan ikhlas. Sebaliknya, para partisipan juga harus mengasumsikan bahwa partner dialognya itu sama dengannya, yaitu betul-betul memiliki kejujuran dan ketulusan.

*Keempat*; dalam dialog interreligius satu peserta dialog tidak boleh membanding-bandingkan pemikiran idealnya dengan pemikiran praktis partner dialog yang lain.

---

<sup>16</sup>Leonard Swidler, "The Dialogue Decalogue, Ground Rules for Interreligious, Interideological Dialogue" dalam *Journal Ecumenical Studies*, 20 : 1, Winter 1983 (September 1984, Revision). Bandingkan juga : Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over...*, h. 96.

*Kelima*; setiap peserta dialog harus secara sadar mendefinisikan dirinya. Hanya orang muslim, misalnya, yang mengerti apa itu muslim. Yang lainnya, hanya dapat menggambarkan pandangan-pandangan dari luar sebagai orang lain. Sebaliknya, interpretasi yang lain tersebut harus memperoleh pengakuan dari orang-orang yang agama dan ideologinya diinterpretasikan.

*Keenam*; setiap peserta tidak boleh secara keras dan cepat menerima poin-poin yang tidak disetujuinya. Memang setiap partner dialog tidak hanya mendengarkan partner dialog lainnya dengan sikap terbuka dan simpati, melainkan juga harus mencoba menyetujui partner dialognya sejauh yang mungkin masih dianggap bisa menjaga integritas tradisi yang memilikinya.<sup>17</sup>

*Ketujuh*; dialog hanya bisa berjalan diantara (posisi) sama. Artinya dialog hanya bisa berjalan dalam keadaan penuh persamaan. Karenanya tidak akan terjadi dialog bila diantara peserta dialog posisi rendah atau tersubordinasi oleh kelompok peserta lain.

*Kedelapan*; dialog hanya bisa berjalan di atas landasan saling percaya.

*Kesembilan*; masing-masing orang yang memasuki dialog interreligius atau interideologi paling tidak secara minimal harus mengkritik diri terhadap diri mereka sendiri dan tradisi agama dan ideologi yang mereka miliki.

*Kesepuluh*; setiap peserta dialog pada akhirnya harus mencoba untuk mengalami agama atau ideologi partner dialognya “dari dalam”, karena agama atau ideologi tidak hanya sesuatu yang ada di kepala saja, melainkan juga spirit, dan semua kemanusiaan, baik individu maupun komunal.

Pengamalan dialog bukan hal baru dalam komunitas agama Indonesia juga bukan hal yang sama sekali baru dalam hubungan antar agama. Namun ketika didorong untuk merumuskan gagasan secara sistematis mengenai dialog, ia muncul sebagai sebuah tantangan yang baru, khususnya karena penganut agama-agama harus mengartikulasikan tepat dan secara eksplisit mengenai dasar, metode-metode serta tujuan dialog yang hendak kita kerjakan.

Terlalu ideal, bahkan terkesan utopis, kalau kita ingin mewujudkan sebuah dialog tanpa mengetahui dari karakteristik dialog itu sendiri. Pada

---

<sup>17</sup>Dialog mungkin berakibat bahwa kedua belah pihak menjadi makin menyadari tradisi yang dianut masing-masing serta menyadari nilai yang terdapat dalam agama-agama lain. Seringkali bentuk-bentuk modern dari agama-agama satu agama dihubungkan dengan nasionalisme atau bentuk-bentuk modernisme tertentu. Dengan demikian tidaklah cukup bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui tradisi-tradisi klasik, partner dalam dialog harus mengetahui situasi yang benar dari negara tempat tinggal partner dialognya. Lebih lanjut baca : Olaf Schumann, *Dialog Antar Umat Beragama Dari Manakah Kita Bertolak?*, (Jakarta: Dewan Gereja-gereja Indonesia, 1982), h. 252

konteks relasi antar penganut agama, dialog merupakan percakapan antara dua pihak atau lebih yang mengandung unsur keterbukaan, saling belajar dan memahami orang lain secara mendalam.<sup>18</sup> Karakteristik dialog tersebut berupa, *pertama*; keterbukaan, mengandaikan bahwa percakapan antara dua pihak atau lebih membutuhkan kesediaan mendengar dari semua pihak dalam porsi yang adil dan setara. Transparansi dan kejujuran dalam dialog merupakan prasyarat dari sebuah komunikasi yang dialogis. Dialog bukan tempat untuk menyelundupkan berbagai “agenda yang tersembunyi” yang tidak diketahui dengan partner dialog. Perbedaan pendapat dalam dialog adalah hal yang wajar dan bahkan suatu yang dianggap semestinya. Namun perbedaan pendapat tidak boleh dianggap sebagai alasan untuk menghakimi dan memberikan *judgement* sepihak. Di dalam proses dialog tidak ada hakim yang akan menjatuhkan pilihan terakhir atau kemungkinan-kemungkinan yang ada. Setiap peserta dialog berdiri setara dan sejajar dalam memperbincangkan keyakinan mengenai kebenaran. Dalam dialog keyakinan dan kebenaran adalah sesuatu yang tak terpresentasikan.

*Kedua*; sekalipun dialog bermaksud untuk mencari pemahaman bersama yang lebih transparan dan *fair* terhadap perbedaan pendapat, namun tidak berarti bahwa dialog yang produktif bisa dijalankan tanpa sikap kritis. Bahkan sebaliknya, sebuah dialog akan memberikan manfaat yang maksimal apabila partner bisa mengajukan keberatan-keberatan kritisnya terhadap posisi-posisi masing-masing pihak. Sikap kritis ini sangat esensial dalam setiap pertemuan dialogis. Kritis terutama terhadap sikap eksklusif dan terhadap segala kecenderungan untuk menganggap *enteng* dan mendeskriditkan orang lain. Dalam hubungan ini maka sebuah dialog merupakan sebuah mata pedang bermata dua, sisi pertama ia mengarah kepada diri sendiri (sebagai sebuah otokritik), karena dalam banyak hal para peserta dialog masih sangat dibebani oleh prasangka serta upaya sadar atau tidak sadar untuk mendistorsikan orang lain. Dan sisi yang kedua terarah kepada suatu percakapan kritis yang sifatnya eksternal, yaitu untuk saling memberikan pertimbangan serta pendapat kepada orang lain berdasarkan keyakinannya sendiri.

*Ketiga*; adanya kesediaan saling mendengar dan mengemukakan pendapat secara simbang. Dalam suasana semacam ini partner dialog bisa

---

<sup>18</sup>Dewan Redaksi, *Dialog : Kritik dan Identitas Agama*, seri DIAN 1 Tahun 1, (Yogyakarta : Interfidei, 1993), h. xxii. Selanjutnya disebut : Dewan Redaksi, Dialog : Kritik...

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang khusus serta belajar dari partner yang lain bagaimana pertanyaan tersebut dijawab dan pergumulkan dalam suatu tradisi keagamaan tertentu. Para peserta dialog tidak lebih banyak belajar dari jawaban, namun mereka sering memperoleh banyak hal lain dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang sama terhadap pertanyaan yang berbeda agaknya lebih problematis daripada jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan berbeda. Dari pertanyaan inilah maka para peserta dialog lebih banyak bisa belajar dari partner dialognya. Dan juga dengan demikian, bisa lebih menghargai kesungguhan serta kejujuran mereka untuk bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>19</sup>

Adapun tujuan dialog setidaknya sedikitnya akan menyinggung dua hal, yaitu : *pertama*; menghidupkan kesadaran baru tentang keprihatinan pokok iman orang lain tanpa sikap untuk meremehkan dan apalagi mendistorsikan keyakinan-keyakinan mulia iman lain. Dalam hubungan ini bahkan suatu percakapan yang sungguh-sungguh dialogis bisa merupakan langkah untuk memperoleh “*mutual enrichment*” bagi setiap penghayatan iman yang berbeda-beda. Kita dibawa kepada suatu khasanah pengalaman keimanan yang benar-benar kaya dan yang terpelihara dalam suatu tradisi yang panjang dan pluralistik. *Kedua*; suatu percakapan yang dialogis mengarah kepada kerjasama untuk memecahkan persoalan kemanusiaan bersama di masyarakat yang realistik tak dapat dibantah dalam wujud kehidupan sosial. Keprihatinan agama-agama ini akan merupakan suatu kekuatan yang baru bagi kemanusiaan untuk menanggulangi eskalasi persoalan yang formatnya memang bersifat lintas agama. Kemampuan di zaman modern ini tidak memadai lagi, diperlukan satu bentuk baru dari persekutuan antara agama untuk menghadapinya.

Konstruksi rasa kebersamaan dan implikasi dari dialog antar agama ini, sangat menunjang terbentuknya sebuah *image* tentang titik temu agama. Untuk landasan itu faktor penting yang tak bisa diabaikan adalah adanya etika dialog yang harus dipanutani oleh peserta dialog agama-agama. Dalam Islam, misalnya, etika keberagaman, khususnya yang menyangkut hubungan antar umat beragama, adalah bersifat sangat terbuka dan dialogis. Panggilan untuk

---

<sup>19</sup>Kesediaan untuk mendengar dan menoleransi asumsi orang lain merupakan implikasi positif interpersi *frame* dan nilai absolutitas dan relativitas yang tidak dihadap-hadapkan secara dikotomis-antagonistik, namun harus dianyam sedemikian rupa sehingga tidak tampak mana yang absolut dan mana yang relatif, oleh karenanya era baru pemahaman pluralitas agama secara historis-empiris dapat dimungkinkan. Lebih lanjut baca : M. Amin Abdullah. *Dinamika Islam...*, h. 85.

mencari titik temu antar agama-agama adalah merupakan tipikal model yang disuratkan dalam al-Qur'an.

Menciptakan kondisi ideal untuk terciptanya titik temu antar umat beragama adalah merupakan kepentingan semua tidak dapat dipikul oleh umat Islam atau Protestan atau Katolik dan agama-agama lain secara sepihak. Dalam perspektif Islam, dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang pluralistik secara religius, sejak semula, memang telah dibangun di atas landasan normatif dan historis sekaligus.<sup>20</sup> Jika ada hambatan atau anomali-anomali di sana-sini, penyebab utamanya bukan karena inti ajaran Islam itu sendiri bersifat intoleran dan eksklusif, namun lebih banyak ditentukan dikondisikan oleh situasi historis-ekonomis-politis yang melingkari komunitas umat Islam di berbagai tempat. Kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, kekuasaan politik, hegemoni kekuasaan, jauh lebih mewarnai ketidakmesraan hubungan antar pemeluk agama dan bukannya oleh kandungan etika 'agama' itu sendiri.

Oleh karena itu sangat perlu membedakan antara dimensi 'ajaran' agama dan perilaku umat beragama. Perilaku umat beragama selain ditentukan oleh normativitas ajaran agamanya, juga sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosio-historis dan politis yang melingkarinya. Ajaran agama yang fundamental hanya bersifat pemberi "warning" terhadap adanya berbagai macam sekat historis-politis-ekonomis yang seringkali berlindung pada naungan payung emosional aliran teologis tertentu.

Dikembangkannya etika dialog antar umat agama, pada saat yang bertepatan untuk mengelaborasi dan sekaligus memberikan kerangka solusi dari problem kehidupan modern seperti :

*Pertama;* salah satu kegagalan kita sebagai anggota masyarakat beragama adalah kecenderungan umat membuka peluang agama dimanipulasi oleh pemimpin-pemimpin agama. Adalah tanggungjawab moral para elit agama untuk menjaga agama dari penyalahgunaan dan eksploitasi yang mempuruukkan kepada lorong berpikir parokialistik.

*Kedua;* lebih sering terjadi, teori-teori dan pemikiran yang sangat baik tentang konsepsionalisasi dialog hanya melangit dan tetap tidak efektif di tingkat praktis (*grass root*). Sebagai misal, bahwa Konsili Vatikan II memulai pertanyaannya tentang Islam dengan mengatakan bahwa "orang Kristen sudah

---

<sup>20</sup>M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atas Historisitas?* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1996), h. 75.

semestinya menaruh hormat terhadap Muslim”, gereja Katolik justru menyusun sebuah program ambisius yang bertentangan dengan sikap itu.

*Ketiga*; hampir sebagian besar dari komunitas penganut agama-agama, tidak pernah bersedia untuk mengkritik diri berkenaan dengan satu sama lain, namun lebih bersikap defensif dalam menghadapi konflik dan realitas yang tidak menyenangkan. Untuk mengakhiri keadaan yang sulit seperti ini, maka sangatlah masuk akal untuk membangun semacam komite atau kelompok representatif yang akan siap menjadi penengah dalam rangka meningkatkan sikap saling memahami. Boleh jadi ini bersifat utopis, namun adalah sangat krusial dalam situasi di mana komunitas agama-agama semakin ditantang oleh problem global yang sama.<sup>21</sup>

*Keempat*; proses dialog apapun mengandaikan suatu hubungan yang sederajat yang di dalamnya komunitas agama-agama bisa saling menerima dan menghormati satu sama lain dengan term-term yang disetujui.

Problem sosial bukan hanya ditanggung oleh pemerintah, namun lebih aktif dan peduli seharusnya datang dari keinginan dan rasa memiliki untuk sama-sama mencari penyelesaian dan menjamin masa depan agama dan bangsa yang lebih bersinar.

Dialog agama merupakan sebuah keniscayaan yang kontinuitasnya sering kita jumpai, sehingga perjumpaan dialog sekarang memang bukan pertemuan yang pertama-meninjau eksistensi tiga agama (Islam, Kristen dan Yahudi)- sebab sudah sejak zaman masa awal agama-agama ini berada. Ketika ada desakan untuk menjalin tali dan ikatan dialog hal itu lebih melihat kepada tantangan era global yang lebih memerlukan pemikiran kritis-inovatif dari masing-masing agama.<sup>22</sup> Melihat arti dialog dewasa ini sebagai usaha bersama mendasari etika global agama-agama, pemberian dasar atas pembincangan teologis menjadi sesuatu yang sangat penting, khususnya untuk memperlihatkan dan membicarakan bersama dasar-dasar apriori satu agama terhadap agama lain. Dan ini menjadi suatu hal yang tidak terelakan untuk dibicarakan ulang karena barangkali inilah khasnya cara berpikir teologi lama; mempunyai suatu pandangan apriori terhadap agama lain, baik dari satu agama yang belakangan kepada agama yang sebelumnya, maupun dari agama yang sebelumnya

---

<sup>21</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung : Mizan, 1997), h. 114. Selanjutnya disebut : Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*

<sup>22</sup>George B. Grose dan Benjamin J. Hubbard (ed.), *Tiga Agama Satu Tuhan Sebuah Dialog*, terj., (Bandung : Mizan, 1998), h. xix.

terhadap agama yang datang sesudahnya. Dalam soal tersebut, perdebatan bermutu yang mengeksplisitkan asumsi-asumsi teologis, bahkan prasangka-prasangka yang ada, dibicarakan secara rendah hati. Kita dapat menikmati perbincangan yang problematis tapi terbuka mengenai apriori- maksudnya pandangan-pandangan implisit suatu agama mengenai agama lain.

Paling tidak dewasa ini para ahli agama memetakan dalam tiga sikap dialog. *Pertama*; sikap yang eksklusif, dalam melihat agama lain selalu ada sebuah pemikiran bahwa orang atau penganut agama lain tidak akan diselamatkan kecuali kalau mengakui iman atau agama yang saya akui.<sup>23</sup> Agama-agama lain barangkali mempunyai banyak hal yang baik, namun agama-agama lain tidak menjadi mediasi keselamatan. Paradigma eksklusif ini tidak dapat diterima, karena bersikap negatif terhadap atau bahkan merendahkan agama-agama lain yang tidak saya peluk. Selain itu paradigma eksklusif tidak melihat realitas, bahwa umat beragama manapun juga adalah kenyataan manusiawi dan karena itu terbatas.

*Kedua*; sikap inklusif. Sikap ini menerima kemungkinan adanya pewahyuan, yang juga menjadi mediasi keselamatan bagi mereka yang memeluknya. Namun akhirnya keselamatan yang mereka terima juga melalui unsur yang menentukan dalam agama saya. Kalau paradigma atau sikap inklusivistik ini dikenakan dalam agama Kristen, misalnya, maka berarti bahwa orang-orang beragama lain juga akan diselamatkan, yakni melalui Yesus Kristus, juga kalau mereka tidak menyadari atau tidak mengakui hal itu.<sup>24</sup>

*Ketiga*; adalah sikap pluralis. Visi dari pluralis beranjak bahwa agama-agama lain merupakan jalan yang sama-sama untuk mencapai kebenaran secara

---

<sup>23</sup>Karl Josef Kuschel, *Abraham Sign of Hope for Jews, Christians and Muslims* (New York: Continuum Publishing Company, 1995), h. 193. Selanjutnya disebut : Karl Josef Kuschel, *Abraham Sign of Hope...*

<sup>24</sup>Dalam konteks dunia sekarang, orang hampir tidak dapat gagal untuk menemukan nilai-nilai yang positif dan benar di luar tradisi orang itu sendiri. Agama-agama tradisional harus menghadapi tantangan ini. 'Isolasi yang ketat' tidak mungkin lagi, maka kondisi yang paling masuk akal ialah dengan menyatakan pada saat yang sama bahwa hal itu meliputi semua saja yang ada yang berkaitan dengan kebenaran pada tahap-tahap yang berbeda di manapun. Sikap inklusivistik akan cenderung untuk menginterpretasikan kembali hal-hal dengan cara sedemikian sehingga hal-hal itu tidak saja cocok tetapi juga dapat diterima. Pada saat berhadapan dengan suatu kontradiksi yang nyata, misal suatu perbedaan yang perlu pun dapat dibuat antara tataran-tataran yang berbeda sehingga dimungkinkan untuk mengatasi kontradiksi tersebut. Lebih lanjut baca : A. Sudiarja (ed.), *Raimundo Panikkar Dialog Intra Religius* (Yogyakarta : Kanisius, 1994), h. 20. Bandingkan juga : William L. Rowe, *Philosophy of Religion An Introduction* (California : Wadsworth Publishing Company, 1993), h. 177.



berbeda, namun merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah atau setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran.<sup>25</sup>

Dengan beberapa sikap dialog ini seharusnya secara ideal akan mengokohkan agama masing-masing, serta semakin menggali pengertian yang signifikan sehingga dapat mewujudkan komunitas agama yang bisa berpikir untuk kebenaran yang pragmatis dan selalu bertopang di atas penghargaan kepada agama-agama lainnya.

## **B. Arah Baru yang Transformatif dari Formula Toleransi ke *Kooperasi***

Kitab-kitab suci dari agama-agama yang hadir di muka bumi yang ditujukan kepada manusia, telah mengamanatkan penganutnya untuk senantiasa berbuat sesuai dengan kerangka keagamaan yang transparan dan inklusif. Kalau dirujuk kitab suci tersebut, banyak yang secara eksplisit mengungkapkannya. Misalnya dalam Islam, di mana al-Qur'an merupakan pedoman penuh dengan pesan keagamaan yang mendorong agar para penganutnya bersikap terbuka pada penganut agama lain. Teks-teks al-Qur'an tersebut memperlihatkan keterbukaan yang lebih luas terhadap iman-iman monoteistik lainnya. Teks-teks yang ada dalam al-Qur'an ini menunjukkan bahwa keselamatan “terbuka bagi siapa saja yang dengan sadar merealisasikan keesaan Allah, pasrah kepada kehendak-Nya dan melalui hidup soleh, memberikan efek praktis terhadap spiritual ini.”<sup>26</sup> Selanjutnya bahwa teks-teks ini sebagaimana komentar Jhon Hick – tentang hubungan perjanjian, “pluralisme keagamaan menunjukkan

---

<sup>25</sup>J.B. Binawiratma membagi pradigma pluralis kepada dua poin, *pertama* pluralis indefen yaitu semua agama dengan cara masing-masing menempuh jalan keselamatan menuju Yang Mutlak, *the Ultimate*, menuju Allah. Demikianlah Yesus Kristus adalah jalan kesempatan bagi orang-orang Kristen, al-Qur'an bagi para pemeluk agama Islam, Budha bagi para pemeluk agama Budha, Krisna atau Rama bagi para pemeluk agama Hindu dan sebagainya. Paradigma ini dapat dikatakan merupakan suatu pengakuan yang bersifat *theosentris*, dalam arti bahwa bagaimanapun juga agama-agama itu melalui jalannya masing-masing, juga sedang menuju kepada Yang Mutlak, menuju Allah yang sama. *Kedua*, pluralis dialogal dimana paradigma ini mengakui realitas pluralisme iman dan agama. Paradigma ini jelas menolak paradigma eksklusifis dan dapat dikatakan berada diantara paradigma inklusifis dan pluralis, namun tidak indeferen. Saya meyakini bahwa agama dan iman saya sekarang adalah yang paling dapat saya pertanggungjawabkan dan karena itu saya anut dengan sepenuh hati. Lebih lanjut baca : Dewan Redaksi, *Dialog : Kritik...*, h. 15.

<sup>26</sup>William E. Phipps, *Muhammad and Jesus : A Comparisson of the Prophet and their Teahchings* terj. *Muhammad dan Isa Telaah Kritis atas Risalah dan Sosoknya* (Bandung : Mizan, 1998), h. 301.

bahwa mereka yang berada di jalan-jalan besar keselamatan lainnya tak kurang dari hamba-hamba pilihan Tuhan, meskipun dengan bidang kerja berbeda”.

Dalam konteks Kristiani, Isa menekankan tema utama yang secara inklusif terkandung dalam tradisi Yahudi. Ketika murid-muridnya meminta Isa untuk mencela seorang pengobat yang bukan dari kelompok mereka, Isa menjawab, “Janganlah kamu cegah dia; .... barang siapa tidak melawan kita, ia tidak dipihak kita”. Selama orang itu bersikap membantu pernah perhatian, Isa menganggap bahwa mereka harus diperlakukan dengan hormat.

Pada intinya semua agama besar menjalankan prinsip toleransi. Mereka membiarkan umat-umat agama lain, meski sering dalam kedudukan sebagai agama-agama yang hanya “diizinkan”. Langkah dari toleransi ke non-diskriminasi kelihatannya “logis” dan patut dipertimbangkan. Dalam masyarakat tradisional struktur sosial selalu ikut ditentukan oleh keagamaan yang dominan, maka agama-agama malah tidak pernah sama kedudukannya. Kiranya dapat dimengerti bahwa langkah dari toleransi ke non-diskriminasi itu membutuhkan waktu sampai dapat dipahami, diterima dan akhirnya dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat karena pada permulaan mesti bersaing dengan penghayatan tradisional bahwa lingkungan hidup religius dan politis merupakan kesatuan.<sup>27</sup>

Terma pluralisme semakin populer di kalangan pengkaji agama-agama dunia untuk mengungkapkan suatu pendekatan yang menghargai toleransi terhadap agama-agama lain dan komitmen kepada agamanya sendiri. Kaum pluralis berpegang pada suatu keyakinan seraya berdialog dengan pengikut keyakinan lain. Dialog bermakna melibatkan kejujuran, menghadapi perbedaan-perbedaan pokok dan pencarian bersama akan suatu kebenaran yang tak sepenuhnya dimiliki kelompok mana pun. Tujuan kaum pluralis bukan untuk sampai pada suatu agama super yang seragam, namun untuk memperbaiki dan meningkatkan keyakinan diri masing-masing partisipan dengan memahami komitmen pihak lain dan terkadang mengadaptasi nilai-nilai yang bermanfaat dan terbukti efektif di tempat lain.

Sebagai respon akan kesadaran pluralisme ini, maka Kristen juga memberikan sebuah pandangan agama yang ‘melunak’ dengan terbitnya keputusan dari Konsili Vatikan II yang mengakui bahwa agama yang berbeda-

---

<sup>27</sup>Franz Magnis Suseno, “Pluralisme Keagamaan Sebuah Tanggungjawab Bersama”, diambil dari kumpulan tulisan : Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.* (Jakarta : Paramadina, 1995), h. 468.

beda memiliki sinar-sinar dari “Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang”. Kemegahan Tuhan bertambah, bukannya berkurang, berkat keanekaragaman ini. Mengenai agama-agama non-Kristiani, Konsili Vatikan II juga memperhatikannya.

Ketika secara praksis di tinjau, ternyata ada relevansi yang positif dari pesan yang diberikan oleh kitab-kitab suci masing-masing agama tersebut. Sehingga relasi yang kultural dalam konteks keindonesiaan, kentara dengan jelas ketika datangnya agama-agama yang ada di dalamnya tidak sama sekali menafikan agama lainnya. Semisal, agama Hindu, yang merupakan agama ‘cikal’ di nusantara tidak terbukti adanya sikap intoleransi di dalamnya.<sup>28</sup> Pertentangan agama jarang dijumpai dan pertukaran agama terjadi dalam suasana damai dan dengan tidak menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Maka oleh karena itu, intoleransi beragama banyak tergantung pada pelaksanaan ajaran-ajaran suatu agama.

Bagi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi pembangunan dalam segala bidang, mewujudkan toleransi adalah tuntutan mendesak dengan banyak memberikan penjelasan akan ajaran-ajaran agama yang menekankan toleransi. Dengan begitu jiwa toleransi beragama dapat dipupuk di kalangan pemeluk masing-masing agama. Jiwa toleransi beragama rasanya dapat dipupuk melalui usaha-usaha berikut ini :

1. Mencoba melihat kebenaran yang ada dalam agama lain<sup>29</sup>
2. Memperkecil perbedaan yang ada diantara agama-agama
3. Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama
4. Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan
5. Memusatkan usaha pada pembinaan individu-individu dan masyarakat manusia yang menjadi tujuan beragama dari semua agama monoteis.
6. Mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa kepada toleransi beragama
7. Menjauhi praktik serang menyerang antar agama.

Dengan berbekal toleransi yang begitu membanggakan, dalam satusisi penganut agama-agama di Indonesia menemukan sebuah “kejemuan” bertoleransi, karena toleransi pada tataran realitasnya telah menimbulkan sikap

---

<sup>28</sup>Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution* (Bandung : Mizan, 1996), h. 275.

<sup>29</sup>Karl Josef Kuschel, *Abraham sign of Hope...*, h. 187.

apologetis.<sup>30</sup> Masing-masing ingin menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling rukun dan toleran. Apologi ini dilakukan secara tekstual (ajaran-ajaran tertulis) dan kontekstual (sejarah, sosiologi, antropologi) yang malah menambah ketegangan-ketegangan baru. Orang Islam akan mengatakan bahwa kata pertama yang diucapkan muslim adalah *assalamu'alaikum*. Karena itu, Islam adalah agama perdamaian. Orang Kristen-Katolik mengklaim bahwa agama Kristen adalah agama cinta. Orang Hindu akan menyatakan bahwa agamanya menekankan *dharma*. Orang Budha mengklaim bahwa agamanya bermaksud melepaskan orang dari penderitaan.

Melihat wacana tersebut agaknya kita mesti mereaktualisasikan makna toleransi yang lebih mengena dan fleksibel dengan perubahan sosial dan zaman. Hubungan antar umat beragama perlu mendapat nama baru, isi baru dan substansi baru. Selain menimbulkan sikap apologetis, juga toleransi hanya cocok untuk masyarakat agraris, namun tidak sesuai untuk masyarakat industrial. Toleransi itu mengarah ke dalam masyarakat beragama sendiri, berorientasi ke belakang ke zaman “normal” dan merujuk pada *status quo*. Yang diperlukan pada saat sekarang ini adalah konsep baru hubungan antar umat beragama yang bersifat keluar dan tidak asyik dengan diri sendiri saja, melihat ke depan dengan bersama-sama menghadapi masa depan kemanusiaan dan dinamis yang merujuk pada kerjasama.

Untuk keperluan ini umat beragama, yang sebenarnya berada dalam *front* yang sama, dapat membuat agenda bersama- yakni agenda nasional seperti pengentasan masalah pembangunan, keadilan, kemiskinan, keterbelakangan dan agenda global seperti tantangan modernitas, alienasi, spiritualisme<sup>31</sup> dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Dengan demikian, agama-agama merupakan kekayaan bersama bangsa dan kemanusiaan.

Dalam memformulasikan hubungan dalam bentuknya yang baru dan mengedepankan segenap aspek kehidupan yang bisa membawa para penganut hidup dalam ketenangan dan kedinamisan maka sebuah transformasi bentuk dan

---

<sup>30</sup>Andito (ed.), *Atas Nama Agama Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas” Konflik* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1998), h. 358.

<sup>31</sup>Spiritualisme atau spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia, maka spiritualitas baru bisa dikatakan sebagai dorongan bagi respons terhadap problem-problem masyarakat kontemporer. Spiritualitas baru berbeda dengan bentuk *isme-isme* yang lebih berupa ajaran formal. Lebih lanjut baca : Dewan Redaksi, *Spiritualitas Baru : Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta : Interfidei, 1994), h. 165.

substansi selayaknya dilakukan dalam toleransi, sehingga dengan ini akan mendorong lahirnya sebuah konsepsi baru yaitu kerjasama (*kooperasi*).

Pengertian yang hampir sama, yaitu bahwa toleransi juga harus menuju ke kemitraan, Menurut Uskup Gereja Ortodoks Syria dari India mengatakan bahwa tujuan kemitraan bukanlah membentuk satu agama dunia dengan memadukan agama-agama. Apabila ini yang ingin dicapai maka akan sia-sia.

Maka tujuan sebenarnya dari kemitraan adalah mencari suatu landasan bersama yang di atasnya semua budaya dunia dapat saling bertemu dalam suasana saling menghormati serta dapat hidup dalam kepelbagaian agama-agama secara global tanpa kehilangan identitas masing-masing.<sup>32</sup>

Begitu juga apa yang disuarakan oleh Anis Ahmad, seorang sarjana muslim dari Malaysia, ia mengatakan bahwa untuk menopang pluralisme agama, hendaknya pusat perhatian keagamaan dari agama-agama beralih dari apa yang selama ini disebut *religio-centric* (berpusat pada agama) dan *theo-centric* (berpusat pada Allah) menuju *enthic-centric* (berpusat pada akhlak/moral). Menurutnya bahwa hal ini akan mengukuhkan agama-agama (Islam) sebagai gerakan budaya yang memberikan tekanan pada etika. Dengan demikian, agama-agama secara bersama dapat menyumbangkan pandangan keagamaan, yang mengubah hidup berlandaskan egoisme kelompok menjadi sikap berdasarkan sikap kasih terhadap sesama, seperti melayani dan mengasihi diri sendiri. Dalam hal ini, tentu ada aliran besar dan ada pula aliran kecil atau tiang besar dan tiang kecil. Dalam kebersamaan ini yang besar harus dengan

---

<sup>32</sup>Dalam bahasa Inggris, pembahasan ini berarti *from dialogue to partnership*. Sebuah seminar pemuda Kristen di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 1980 membahas tema "*Partnership with People Other Faiths*" (Kemitraan bersama umat dengan Kepercayaan Lain). Hasil yang dirumuskan adalah : *Pertama*; tujuan utama kemitraan dengan penganut lain adalah untuk secara bersama-sama menciptakan sebuah komunitas yang didasarkan pada keadilan dan keprihatinan berlandaskan kasih terhadap sesama sehingga secara bersama pula berjuang untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi bagi semua orang. Diperlukan suatu komitmen bersama dalam bentuk aksi bersama untuk menangani berbagai permasalahan dan kepincangan dalam masyarakat. Dengan demikian, ia membawa harapan bagi mereka yang tidak berdaya dan peduli terhadap kebutuhan kemanusiaan. *Kedua*; tugas bersama orang-orang Kristen dalam kemitraan bersama penganut kepercayaan lain adalah secara bersama-sama berfungsi sebagai agen perubahan di tengah masyarakat yang kita layani bersama demi terciptanya suatu visi baru tentang suatu tata masyarakat baru yang sedang muncul. *Ketiga*; keterpaduan antara realitas ekonomi, politik dan budaya, baik secara lokal, nasional maupun internasional, sangat menentukan langgam hidup rakyat. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran bersama tentang keterpaduan kekuatan-kekuatan tersebut sehingga secara bersama pula dapat menemukan jalan keluar yang menandai dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Lebih lanjut baca : Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial Diskursus Teologi tentang Isu-isu Kontemporer* (Jakarta : CIDES, 1998), H. 41.

rela dan ikhlas memberikan kesempatan yang sama kepada yang kecil untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan bertanggungjawab. Dengan berbuat demikian, yang besar mempunyai wajah yang manusiawi dan tidak dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup si kecil, juga sebaliknya.

Menegaskan dalam kerjasama ini, adalah bentuk dialog karya sebagaimana yang ditawarkan oleh dunia Kristen, yaitu kerjasama yang lebih intens dengan para pengikut agama-agama lain. Sasaran yang hendak diraih jelas dan tegas, yakni pembangunan manusia dan peningkatan martabatnya. Bentuk dialog semacam itu kerap kali berlangsung dalam kerangka kerjasama organisasi-organisasi internasional, di mana orang-orang Kristen dan para pengikut agama-agama lain bersama-sama menghadapi masalah dunia. Sejak Konsili Vatikan II gereja secara kongkret dan resmi terlibat dalam dialog karya. Dua atau tiga sekretariat sekurang-kurangnya yang menangani masalah-masalah dunia, didirikan, sekretariat-sekretariat ini tidak menggeluti dialog agama-agama, namun demikian pelaksanaan kerjanya meminta kerjasama dengan para penganut agama-agama lain.<sup>33</sup> Pada tahun 1982 Paus Yohanes Paulus II mendirikan sebuah komisi tentang kebudayaan, yang bertugas mempromosikan dialog antar kebudayaan. Gereja mendesak umatnya, mulai dari tingkat kelompok yang paling kecil sampai keuskupan, untuk mengusahakan dialog semacam ini, sebuah dialog yang ditumpukan tidak pada agama melainkan pada kerjasama dalam karya-karya.

Bentuk kerjasama agama-agama ini adalah untuk menghadapi etika global. Sehingga diperlukan sebuah upaya dan jalinan bergendeng tangan bersama dalam menanggulangnya dampak negatif serta mengembangkannya dari hasil yang selama ini telah terasa arus positifnya. Tidak ada tata global baru tanpa etika global baru suatu tuntutan mendasar bahwa setiap orang harus diperlakukan secara baik. Oleh karena itu dalam prakteknya seharusnya mengacu kepada empat orientasi; *pertama*; komitmen terhadap budaya tanpa kekerasan dan budaya hormat terhadap kehidupan, *Kedua*; komitmen terhadap budaya solidaritas dari tata ekonomi yang adil. *Ketiga*; komitmen terhadap

---

<sup>33</sup>Dua sekretariat ini adalah *the Pontifical Commission for Justice and Peace* (1967) dan *Dewan Keputusan "Cor Unum"* (1971). Sekretariat yang pertama bertugas mempromosikan perdamaian internasional dan pengembangan umat manusia yang lebih manusiawi. Sementara *cor Unum* memberikan pelayanan kepada dunia, antara lain dengan memperhatikan para pengungsi korban perang, bencana kelaparan dan sebagainya. Lebih lanjut baca : Armada Riyanto, *Dialog Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), h. 112.

budaya toleransi dan kehidupan yang setia terhadap kebenaran. *Keempat*; komitmen terhadap budaya dengan kesamaan hak-hak dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan.

Orientasi dialog antar agama merupakan sebuah konsepsi kerjasama yang harus selalu digelindingkan bagi agama-agama yang ingin mengindahkan keagamaannya dalam mengatasi problema sosial, juga orientasi pada dasarnya masih diilhami oleh dialog karya atau kerja sama bila kita berbicara dalam konteks Kristiani.<sup>34</sup>

Peluang kesuksesan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan kerjasama agama-agama dalam mengatasi problem sosial lebih besar ketimbang bangsa-bangsa lainnya. Dengan komposisi demografis sekitar 87% penduduknya muslim, yang menurut ajaran agamanya memerintahkan untuk ikut mengentaskan masalah dan patologi sosial, maka umat Islam bisa diikatkan, seharusnya mempunyai posisi tawar yang cukup lumayan untuk memulai kerjasama dalam level praksis kemasyarakatan.

Tampaknya kalau bicara di atas kertas, maka tujuan tersebut tidak terlalu sulit untuk dicapai jika beberapa syarat dapat dipenuhi :

*Pertama*; iklim kondusif yang dapat mewujudkan kerjasama sungguh-sungguh antar berbagai agama dalam menangani problem sosial tersebut. Untuk tujuan tersebut, maka dialog antar multi agama secara intensif dilaksanakan.

*Kedua*; Setelah syarat ini terpenuhi, agama-agama beranjak ke tahap berikutnya untuk belajar dari pengalaman umat Kristen Amerika yang pernah berhasil menjadikan larangan terhadap minuman keras sebagai undang-undang.<sup>35</sup> Kegemilangan tersebut, yang hanya berlalu selama 10 tahun akibat

---

<sup>34</sup>Secara kongkrit bahwa dalam membangun kerukunan dan toleransi dapat digambarkan dalam empat macam kegiatan, *Pertama*; dialog kehidupan yaitu dialog antar umat beragama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling mengenal. Dialog ini terjadi dalam kehidupan bersama sehari-hari, di mana orang-orang dengan iman yang berbeda-beda mengalami situasi yang sama, suka dan duka, kecemasan dan pengharapan bersama. *Kedua*; dialog pengalaman religius, di sini umat yang beriman berbeda-beda pengalaman iman secara lebih mendalam. Pada dataran ini umat satu sama lain dapat saling memperkaya penafsiran dan penghayatan iman, saling mentransformasikan hidup berimannya. *Ketiga*; dialog teologis. Dalam dialog ini dapat dijalankan analisis mengenai situasi yang dialami bersama, dapat pula diadakan kajian teologis, baik pada taraf teologis ilmiah maupun pada taraf berbagi pengalaman yang lebih sederhana. *Keempat*; dialog aksi atau kerjasama, yaitu untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih adab, merdeka dan lebih manusiawi. Lebih lanjut baca : Mustoha (ed.), *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1997), h. 120. Selanjutnya disebut : Mustoha (ed.), *Bingkai Teologi...*

<sup>35</sup>Berangkat dari kesepakatan yang meninjau miras sebagai barang yang mempunyai efek negatif yang membayakan, beberapa gereja secara konsisten menempuh sikap tegas

gencarnya serangan pihak polisi, juga harus ditelaah bersama untuk mengantisipasi pengalaman pahit yang serupa.

*Ketiga*; pemenuhan dua syarat di atas harus dilanjutkan dengan pembentukan suatu badan yang dikelola bersama untuk merumuskan dan sekaligus mengimplementasikan langkah yang digariskan demi tercapainya tujuan tersebut secara optimal.

Dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat Indonesia begitu pluralistik, maka jelaslah bahwa sebuah kontribusi dari masing-masing agama akan menambah kerjasama untuk menguatkan agama-agama tersebut. Peluang ini memberikan gambaran bahwa agama-agama merupakan sosok yang harus menampilkan jati dirinya dalam merekonstruksi masyarakat yang inklusif, transparan dan selalu fleksibel terhadap perubahan sosial. Agenda kerjasama yang dijalin pertama-tama yaitu dengan mengidentifikasi teologi rasional dan menjustifikasi bahwa ada pengakuan terhadap eksistensi keimanan dan agama lain, di samping agama yang dipeluknya.<sup>36</sup>

Problem sosial aktual yang menggelayuti wilayah Indonesia adalah implementasi keadilan sosial yang belum merata, demokrasi dan kesetaraan di depan hukum. Inilah agenda penting yang harus dicanangkan solusinya dengan melalui kerjasama agama-agama, sehingga peran aktif dan kontribusinya bukan *lip service* dan hanya menjadi teologi melangit tanpa menyentuh problema sosial yang ada diantara pemeluk agama-agama di nusantara.

Beranjak dari realitas di atas maka masalah kerukunan dan dialog antar umat beragama bukanlah masalah terisolir, melainkan dengan masalah-masalah kehidupan bersama lainnya. Untuk menuju dan mengikuti ke dalam orientasi tersebut, setidaknya penganut agama-agama perlu mengupayakan langkah-langkah efektif, seperti, *pertama*; mengembangkan benih-benih yang baik di dalam diri manusia dan komunitasnya, memupuk yang sudah adil, yang sudah rukun, yang sudah menghargai nilai manusia. Benih itu terdapat di semua

---

terhadap miras. Sikap ini paralel dengan garis Islam, bagi mereka anjuran untuk menjauhi diri (berpantang) dari miras merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai etika Kristen. Gereja-gereja Metodis, Baptis, Quakers dan Presbiterian termasuk diantara kelompok yang paling keras dan tegas memerangi miras. Menyadari realitas itu, dan belajar dari pengalaman sejarah kesuksesan umat Kristiani di Amerika pada tahun 1920, agaknya bukan tanpa alasan kalau agama-agama di Indonesia optimis dan berbesar hati untuk mengulangi sejarah gemilang gereja di Amerika dengan melakukan larangan total terhadap miras di Indonesia. Lebih lanjut baca : Alwi Shihab, *Islam Inklusif...* h. 189.

<sup>36</sup>Yvonne Yazbeck Haddad dan Wadi Z. Haddad (ed.), *Christian-Muslim Encounters* (Florida : University Press of Florida, 1995), h. 295.



agama dan komunitas yang percaya. *Kedua*; mengatasi ketidakadilan, penindasan dan kekerasan yang membuat dosa semakin meresapi struktur-struktur kehidupan manusia.<sup>37</sup>

Rangkaian krisis manusia modern yang semakin menyesak dada dan secara tidak langsung membuat disharmonisasi kehidupan manusia, maka perlu adanya sebuah agenda dan keinginan yang ambisius untuk mengentaskannya. Sadar atau tidak, bahwa dengan krisis manusia modern tersebut akan berimbas juga kepada hambatan penggelindingan format kerukunan dan dialog agama-agama. Untuk memprogresifitaskan dinamika dialog maka kita harus juga menengok sebuah arah dari dialog yang menuju ke arah pro-eksistensi. Sasaran dialog bukan hanya sekedar ko-eksistensi secara damai, namun lebuah jauh dari itu yaitu dengan sasaran dialog yang lebih terlibat, programatis dengan melibatkan semua perbedaan otentik. Langkah ini pernah diayuni oleh Hans Kung- seorang ahli kajian dialog agama- di mana ia mengawali suatu eksperimen ilmiah di bidang dialog yang berorientasi ke pro-eksistensi.<sup>38</sup> Usaha-usaha ini bukan hanya pengumpulan unsur-unsur persamaan doktriner, tradisi, semangat atau lainnya, namun juga unsur-unsur yang meliputi perbedaan bahkan potensi untuk konflik. Oleh karena itu dituntut kepada penganut agama yang berbeda untuk mengenal agama lain tanpa prasangka, namun juga kesempatan untuk mengenal agamanya sendiri secara kritis lewat agama-agama lain.

Toleransi yang berko-eksistensi secara damai bukanlah tujuan akhir dari suatu dialog. Zaman pro-eksistensi harus diupayakan untuk melanjutkan era ko eksistensi. Secara substansial dialog mempunyai jangkauan yang lebih dalam bagi penghayatan keagamaan seseorang di tengah-tengah masyarakat dunia yang semakin terbukti dan berubah-ubah. Kini sudah tiba saatnya agama-agama dunia secara bersama-sama mengarahkan setiap gerakan dialog untuk menyongsong masa depan, khususnya ketika para penganut agama-agama dihadapkan pada milenium ketiga dengan segala kesempatan dan tantangan yang sudah bisa diantisipasi maupun belum.

Dialog tidak hanya meningkatkan rasa toleransi melainkan juga pengalaman transformatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Tuhan dialog tidak hanya berhenti pada ko-eksistensi, melainkan pro-eksistensi, tidak hanya membiarkan orang lain ada, namun ikut mengadakannya secara aktif. Dialog

---

<sup>37</sup>Mustoha (ed.), *Bingkai Teologi...*h. 110.

<sup>38</sup>Dewan Redaksi, *Dialog : Kritik...*, h. 75.

semacam ini memang lebih menuntut sikap terbuka daripada defensif, semangat untuk belajar satu sama lain daripada mentalitas “*self-sufficient*”, sikap rendah hati dan daripada perasaan dirinya selalu benar dan sikap-sikap arogan lainnya.

Kerukunan dalam konteks global, sudah tidak seharusnya disikapi dengan sebuah asumsi bahwa kerukunan bersifat statis-exhaustive, namun lebih merupakan wujud gerakan yang fleksibel-dinamis, yang melibatkan proses panjang yang bersifat historis melalui pergumulan dan pergulatan terus menerus dalam situasi yang kongkrit. Kerukunan yang bersifat konsepsional pada saat sekarang, lebih mempunyai nuansa dan impresi struktural-ideologis, yang padahal dengan kondisi tersebut perlu adanya batu pemecah untuk masuk ke level praktis historis. Fenomena itu muncul karena memang persentuhan dengan realitas yang kurang dilakukan oleh umat beragama pada umumnya, dan sebagian terjebak pada pendekatan ideologis, abstraktif yang bersifat tertutup yang masih mewarnai lingkungan komunitas umat beragama. Meski rukun dan damai, namun masih ada dosa psikologis, dengan perasaan bersalah jika bekerjasama dengan orang yang berlainan iman dan kepercayaan.

Respon yang ikut mencerahkan dan memberi rongga alternatif adalah sebagaimana yang digagas oleh M. Amin Abdullah- yang melihat realitas dialog dan kerukunan *vis a vis* arus modernitas dan industrialisasi, maka perlu dikaji ulang format dialog dan kerukunan yang bisa eksis sesuai dengan perubahan zaman. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat mendesak harus di tengok bahwa hubungan antar agama dalam konteks ini harus bersifat “keluar” (*outward looking*) tidak hanya asyik bergumul dan bergulat dengan persoalan diri sendiri (*inward looking*).<sup>39</sup> Masyarakat industrial lebih bersifat kompetitif, agresif dan berpandangan ke depan. Oleh karenanya diperlukan visi umat beragama yang mengarah “ke depan”, untuk menghadapi masa depan dan persoalan-persoalan kemanusiaan universal secara bersama-sama.

Untuk memperkuat basis tersebut maka sudah saatnya dipikirkan langkah bersama untuk meneruskan kerjasama yang bersifat kooperatif antar umat beragama dalam wilayah praksis sosial keagamaan. Menghadapi tantangan yang bersifat nasional, seperti keadilan, kemiskinan, konglomerasi, keterbelakangan, memperkuat disiplin nasional, kriminalitas, perampasan hak

---

<sup>39</sup>M. Amin Abdullah, “Anatomi Kerukunan Umat Beragama Tinjauan Historis Ideologis”, berasal dari makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Cendekiawan Antar Agama, tentang *Anatomi Kerukunan Umat Beragama*, yang berlangsung diYogyakarta tanggal 15 – 16 Januari 2000, h. 12.

asasi manusia, gerakan disintegrasi bangsa, juga tantangan global seperti nilai-nilai modernitas dan posmodernitas,<sup>40</sup> aliensi, spiritualisme, nilai-nilai kemanusiaan universal, maka tidak ada pilihan lain bagi umat beragama kecuali secara bersama-sama berada pada barisan yang sama. Sehingga pendekatan ideologis yang bersifat eksklusif harus ditinggalkan dan diubah menjadi pendekatan pragmatis-fungsional demi untuk terselesaikannya beban-beban sosial yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat beragama.

### **C. Menelisik Sikap Toleransi Siswa yang di Belajarkan di Sekolah**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena didukung oleh sejumlah fakta positif yaitu posisi geopolitik yang sangat strategis, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, kemajemukan sosial budaya, dan jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bangsa yang maju, adil, sejahtera, berdaulat, dan bermartabat. Namun demikian, untuk mewujudkan itu semua, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah nasional yang kompleks, yang tidak kunjung selesai hamper dalam kurun waktu 68 tahun setelah mengenyam kemerdekaannya. Misalnya aspek politik, di mana masalahnya mencakup kerancuan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, kelembagaan Negara yang tidak efektif, sistem kepartaian yang tidak mendukung, dan berkembangnya pragmatisme politik. Lalu aspek ekonomi, masalahnya meliputi paradigma ekonomi yang tidak konsisten, struktur ekonomi dualistis, kebijakan fiskal yang belum mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak, kebijakan perdagangan dan industri yang liberal dan utang yang relatif besar. Tak lupa dari aspek sosial budaya, masalah yang terjadi saat ini adalah memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi dan integrasi sosial, dan melemahnya mentalitas positif<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup>Inti alur posmodernitas adalah menantang segala hal yang berbau kemutlakan dan baku, menolak dan menghindari suatu sistematika uraian atau pemecahan persoalan yang sederhana dan skematis, serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai sumber. Lebih lanjut baca : M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 96. Bandingkan juga dengan : I Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1996), h. 17 Juga baca : Suyoto et. al. (ed.), *Postmodernisme dan masa Depan Peradaban* (Yogyakarta : Aditya Media, 1994), h. 10.

<sup>41</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa*. (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2009). h.11.

Dari sejumlah fakta positif atas modal besar yang dimiliki bangsa Indonesia, jumlah penduduk yang besar menjadi modal yang paling penting karena kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat bergantung pada faktor manusianya. Masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya juga dapat diselesaikan oleh potensi manusianya. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi untuk menjadi Indonesia yang lebih maju diperlukan revitalisasi dan penguatan karakter manusia yang kuat, salah satu aspek yang dapat dilakukan adalah melalui pranat pendidikan.

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun ruhani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya sekedar memancarkan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan manusia Indonesia secara berkelanjutan dan merata. Ini sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah “agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Melihat kondisi sekarang dan akan datang, ketersediaan manusia yang berkarakter merupakan kebutuhan yang amat vital. Ini dilakukan untuk mempersiapkan tantangan global dan daya saing bangsa. Memang tidak mudah untuk menghasilkan potensi manusia yang tertuang dalam UU Sisdiknas diatas. Persoalannya adalah hingga saat ini manusia Indonesia masih belum mencerminkan cita-cita pendidikan yang diharapkan. Misalnya untuk kasus-kasus aktual, masih banyak ditemukan siswa yang *menyontek* di kala sedang menghadapi ujian, bersikap malas, sikap vandalisme (tawuran) antar sesama siswa, melakukan pergaulan bebas, terlibat narkoba, dan lain-lain. Di sisi lain, ditemukan guru atau pendidik yang senantiasa memberikan contoh-contoh baik ke siswanya, namun sangat memprihatinkan dari sisi moralitasnya. Misalnya guru tidak jarang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sertifikasi dan dalam ujian nasional (UN). Kondisi ini terus terang sangat memilukan dan

mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak tahun 1945. Memang masalah ini tidak dapat digeneralisir, namun setidaknya ini fakta yang tidak boleh diabaikan karena kita tidak menginginkan anak bangsa kita kelak menjadi manusia yang tidak bermoral sebagaimana saat ini sering kita melihat tayangan televisi yang mempertontonkan berita-berita seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, korupsi, dan penculikan, yang dilakukan tidak hanya oleh orang-orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak usia belasan tahun.

Pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dapat dilihat ketiga perbedaan model lembaga pendidikan tersebut. Dikatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Memperhatikan ketiga jenis pendidikan di atas, ada kecenderungan bahwa pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal selama ini berjalan terpisah satu dengan yang lainnya. Ketiganya tidak saling mendukung untuk peningkatan pembentukan kepribadian peserta didik. Setiap lembaga pendidikan tersebut berjalan masing-masing sehingga yang terjadi sekarang adalah pembentukan pribadi peserta didik menjadi parsial, misalnya anak bersikap baik di rumah, namun ketika keluar rumah atau berada di sekolah ia melakukan perkelahian antarpelajar, memiliki 'ketertarikan' bergaul bebas atau melakukan perampokan. Sikap-sikap seperti ini merupakan bagian dari penyimpangan moralitas dan perilaku sosial pelajar.<sup>42</sup>

Oleh karena itu dalam rangka membangun dan melakukan penguatan peserta didik perlu mensinergiskan ketiga komponen lembaga pendidikan.

---

<sup>42</sup> Suyanto dan Djihad Hisyam. *Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III: Refleksi dan Reformasi*. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000). h. 194

Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah pendidik dan orang tua berkumpul bersama mencoba memahami gejala-gejala remaja fase negatif, yang meliputi keinginan untuk menyendiri, kurang kemauan untuk bekerja, mengalami kejenuhan, ada rasa kegelisahan, ada pertentangan sosial, ada kepekaan emosional, kurang percaya diri, mulai timbul minat pada lawan jenis, adanya perasaan malu yang berlebihan, dan kesukaan berkhayal.<sup>43</sup> Dengan mempelajari gejala-gejala negatif yang dimiliki anak remaja pada umumnya, orangtua dan pendidik akan dapat menyadari dan melakukan upaya perbaikan perlakuan sikap terhadap anak dalam proses pendidikan formal, non formal dan informal. Meski peran pendidik dan peserta didik telah begitu optimal dalam melaksanakan fungsi dan target pendidikan sebagaimana mestinya, namun dengan bergulirnya waktu dan pengaruh globalisasi ternyata banyak dampak negatif yang terjadi dikalangan pendidikan maupun dalam masyarakat secara luas.

Salah satu kasus yang mengerikan adalah tentang kekerasan primordial. Kerusuhan Mei 1998, selain klimaks krisis ekonomi yang menghantam Indonesia sejak Agustus 1997, juga merupakan akumulasi politik primordialisme. Itu terjadi karena pemerintah tidak menuntaskan akar kesenjangan sosial dan ekonomi (salah satunya adalah meningkatnya ketergantungan pada utang luar negeri), membiarkannya menjadi kecemburuan sosial. Jalan panjang masih ditempuh relasi sosial terkait sentimen keagamaan. Berulang kali terjadi tindak kekerasan/tawuran yang massif terhadap komunitas minoritas tertentu, tetapi belum terlihat tanda-tanda arus balik yang menguatkan ikatan kebangsaan. Komunitas tertentu rentan jadi target intimidasi dan kekerasan massa. Gelombang massa tanpa karakter kebangsaan cenderung menguat pada era reformasi, seiring melemahnya otoritarianisme negara dan menguatnya elemen sipil. Dalam insiden kekerasan horizontal yang melibatkan dua pihak, penegak hukum cenderung tak berdaya melindungi korban kekerasan. Setelah terjadi kerugian psikologis (ketakutan) dan fisik (penganiayaan) ataupun material (kerusakan gedung), pemerintah mengimbau pihak-pihak yang bertikai menahan diri.

Sealur dengan guncangan moralitas diatas, Ratna Megawangi menambahkan bahwa negara Indonesia terjangkit patologi kronis yang disebut

---

<sup>43</sup> Suyatno. Sumedi, Pudjo, dan Sugeng Riadi (Editor). *Pengembangan Profesionalisme Guru: 70 Tahun Abdul Malik Fadjar*. (Jakarta: UHAMKA Press, 2009.), h. 186.

krisis multidimensi yang berdampak pada menurunnya pamor moralitas bangsa yang dicirikan oleh membudayanya konflik dalam masyarakat, meningkatnya kriminalitas, merosotnya etos kerja dan lainnya. Tidak lupa bahwa budaya korupsi yang merupakan praktik pelanggaran moral (ketidakjujuran, tidak bertanggungjawab, rendahnya disiplin, rendahnya komitmen kepada nilai-nilai kebaikan) adalah penyebab utama negara Indonesia sulit bangkit dari krisis multidimensi.<sup>44</sup>

Keteguhan dan kekokohan sebuah bangsa sangat erat kaitannya dengan aspek moralnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Thomas Lickona bahwa ada sepuluh tanda zaman yang mencirikan sebuah kehancuran negara, yaitu : (1) Meningkatnya kekerasan dikalangan remaja; (2) Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk; (3) Pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan; (4) Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas; (5) Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; (6) Menurunnya etos kerja; (7) Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; (8) Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara; (9) Membudayanya ketidakjujuran; (10) Adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama.<sup>45</sup>

Mempersiapkan sebuah bangsa yang terdiri dari kelompok warganya yang heterogen, memerlukan sebuah prinsip-prinsip edukasi yang matang dan tercerahkan. Pada kondisi ini, siswa siswi sebuah sekolah merupakan aktor penting yang akan menentukan kondisi bangsa pada masa berikutnya. Tak ayal lagi bahwa pendidikan yang menanamkan tenggang rasa, saling menghargai dan menghormati, bekerjasama, bersikap terbuka dan dialogis, merupakan kebutuhan penting yang harus menjadi basis utama pengetahuan dan sikap siswa di sekolah dan lingkungannya. Satuan tingkat pendidikan SLTA merupakan salah satu fase yang satu sisi memberikan harapan dari para siswanya akan sebuah perubahan, namun lain sisi cukup menggariskan kekhawatiran dengan labilitas psikologinya yang sering dan acapkali terpengaruh lingkungan eksternal sekolah.

Salah satu upaya dalam menggali nilai kebersamaan adalah dengan mengintensifkan kajian elementer tentang beberapa mata pelajaran yang

---

<sup>44</sup> Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004) h.3.

<sup>45</sup> Thomas Lickona , *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1992.

memiliki tujuan untuk memperkaya khazanah kebangsaan dan kenegaraan. Dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan yang mempunyai tujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*Good Citizen*) dengan kriteria beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa belum memberi jaminan untuk terwujudnya masyarakat yang demokratis, dengan cara hidup yang multikultural.<sup>46</sup>

Pendidikan Kepramukaan yang diharapkan mampu membawa misi kesederhanaan, kesamaan, kegotongroyongan, tolong-menolong, kebersamaan dan kesatuan, sudah tidak populer lagi bagi generasi muda karena sudah terpinggirkan. Oleh karena tidak lagi diaktualisasikan dalam falsafah hidup ditengah-tengah realitas perubahan sosial yang kompleks sekaligus dalam tekanan budaya global yang cenderung materialistik dan hedonistik. Peranan Pendidikan agama diharapkan memberikan dasar untuk kesatuan masyarakat dalam pandangan hidup dan sistem nilai yang seragam, memberikan motivasi yang sama untuk kegiatan bersama dan memberikan norma dalam hidup bersama. Namun kenyataannya Pendidikan agama yang ada tidak memberikan nuansa multikultural tetapi malah sebaliknya masih menyudutkan hak hidup agama yang lain seakan-akan hanya agamanya sendiri yang berhak hidup dan benar. Semangat pendidikan agama yang sempit tentu berlawanan dengan pendidikan multikultural, dan hal ini akan memperlemah kesatuan dan persatuan bangsa.

Dengan melihat kelemahan dan pengalaman pendidikan multikultural masa lalu maka pendidikan tersebut harus direvisi, direvitalisasi, direaktualisasi secara kreatif sehingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya. Keluaran yang diharapkan dalam pendidikan multikultural ini adalah setiap peserta didik memiliki sikap dapat menerima, menghargai dan memandang agama lain sebagai agama yang baik dan benar serta memiliki jalan keselamatan. Dalam perspekti multikultural, setiap agama diharapkan terpanggil untuk membina hubungan solidaritas, dialog dan kerjasama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih berpengharapan.

Pendidikan multikultural yang ideal di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat sipil (*Civil Society*) banyak kendalanya. Salah satu kendala yang utama dalam mensosialisasikan nilai pendidikan multi kultural adalah kehidupan komunitas yang eksklusif dan memaksakan kehendak untuk

---

<sup>46</sup> Sigit Dwi Kusrahadi, *Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Masyarakat Majemuk*, makalah tidak diterbitkan, tahun 2006, h. 3.



kepentingan politis terhadap kelompok lintas SARA yang lain. Oleh karena itu pendidikan multikultural diharapkan menghasilkan peserta didik yang menghargai perbedaan dan mengusahakan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat yang ditekankan dalam bentuk pendidikan nilai.

Melihat kenyataan kehidupan berbangsa semakin tidak menentu, dan tidak ada jaminan akan kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu harus dicari terobosan-terobosan agar konflik-konflik berbau SARA bisa diatasi, diredam. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat harus dikelola dengan bijaksana sehingga menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa dan bukan sebaliknya. Sebagai mana telah dilakukan oleh pendiri bangsa ini, telah memberi keteladanan yang baik dalam berpikir, bertindak, agar berbagai macam perbedaan dijadikan kekayaan khasanah bangsa. Perbedaan SARA memang berpotensi menimbulkan konflik, namun disisi lain juga berpotensi menimbulkan kerukunan dan integrasi bangsa. Oleh karena itu pemerintah dan seluruh warga bangsa diharapkan mampu menumbuhkan dan menjalin persatuan mulai pendidikan multikultural, dirasa sangat penting dialog antar warga untuk saling memahami budaya orang lain dan mewujudkan kebersamaan.

Arah kebijaksanaan pendidikan multi kultural adalah untuk mewujudkan *Civil Society* (Masyarakat sipil) dengan parameter masyarakat yang demokratis dengan memberi partisipasi masyarakat lebih luas, dengan landasan kepastian hukum, nilai-nilai egalitarian, nilai-nilai keadilan, menghargai harkat kemanusiaan, menghormati perbedaan SARA dalam kesatuan bangsa. Menjunjung nilai-nilai religius dengan dilandasi pengakuan dan pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai di atas jika dijunjung tinggi dan diamalkan atau diactualisasikan dalam kehidupan sehari-hari akan mendukung pelaksanaan pendidikan multikultural.

Diberikannya pendidikan multikultural bagi generasi penerus merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaiannya mengantisipasi konflik di masa mendatang. Dengan pendidikan multikultural. keluaran yang diharapkan adalah generasi muda mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa khususnya konflik-konflik SARA, dan membangun secara berkesinambungan, konsisten berdasarkan cita-cita bangsa sehingga tujuan nasional dapat tercapai.

Proses pembelajaran tentang manusia Indonesia harus merupakan mata pelajaran wajib di seluruh tingkatan jenjang pendidikan. Guru, kurikulum,

sarana-prasarana, dan berbagai hal yang diperlukan untuk suatu proses pembelajaran yang mendukung multikulturalisme harus disediakan oleh negara. Karena negara adalah otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk membentuk manusia Indonesia yang bercirikan ke-Indonesiaan diperlukan adanya penyeragaman dalam beberapa mata pelajaran yang bersifat umum seperti Bahasa Indonesia, Sosia-Budaya Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan (Perbandingan) Agama. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang mutlak harus diberikan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Selain tentunya mata pelajaran olah raga dan kesenian. Selama ini proses pembelajaran lebih cenderung mengupayakan penyeragaman, dan kurang memperhatikan keragaman masyarakat bangsa Indonesia.<sup>47</sup>

Berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat, dimana model seperti ini akan lebih banyak menimbulkan friksi-friksi dalam masyarakat karena yang ditonjolkan justru ciri kedaerahan yang justru berbeda dengan daerah lainnya. Model ini juga akan banyak menimbulkan masalah ketika kita membicarakan standar kualitas. Walaupun disebutkan bahwa standar kualitas yang digunakan adalah standar nasional, tetapi dengan kemungkinan penyelenggaraan evaluasi sendiri dan penentuan kurikulum sendiri serta sarana dan prasaran pembelajaran sendiri dan kesejahteraan guru juga sendiri, maka penulis sangat khawatir bahwa pendidikan model ini justru akan semakin mempersulit terwujudnya integrasi nasional dan sekaligus akan mempersulit terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, dengan karakteristik Indonesia yang berbudaya Indonesia dan hidup dalam sistem sosial dan politik Indonesia. Ini tantangan bagi dunia pendidikan dimana pendidikan dihadapkan pada konteks desentralisasi dan integrasi nasional, yang menuntut pemikiran yang cermat dalam menentukan strategi pendidikan sebagai upaya untuk membangun karakter bangsa yang diwarnai dengan kemajemukan.

Dalam buku laporannya ke UNESCO, Jacques Delors, et. al., mengemukakan bahwa ada empat pilar pendidikan, yaitu :

1. Learning to know (belajar untuk mengetahui)
2. Learning to do (belajar untuk berbuat)

---

<sup>47</sup> Dadang Sudiadi, *Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat Yang Majemuk: Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia*, Makalah, tahun 2004, h. 5.

3. Learning to live together, learning to live with others (belajar untuk hidup bersama)
4. Learning to be ( belajar untuk menjadi seseorang)

Dalam *Pointers and Recommendations*, Delors et.al. mengemukakan bahwa *learning to know*, dengan memadukan pengetahuan umum yang cukup luas dengan kesempatan untuk mempelajari secara mendalam pada sejumlah kecil mata pelajaran. Pilar ini juga berarti juga *learning to learn* (belajar untuk belajar), sehingga memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan pendidikan yang disediakan sepanjang hayat.

*Learning to do*, untuk memperoleh bukan hanya suatu keterampilan kerja tetapi juga lebih luas sifatnya, kompetensi untuk berurusan dengan banyak situasi dan bekerja dalam tim. Ini juga belajar berbuat dalam konteks pengalaman kaum muda dalam berbagai kegiatan sosial dan pekerjaan yang mungkin bersifat informal, sebagai akibat konteks lokal atau nasional, atau bersifat formal melibatkan kursus-kursus, program bergantian antara belajar dan bekerja.

*Learning to live together, learning to live with others*, dengan jalan mengembangkan pengertian akan orang lain dan apresiasi atas interdependensi—melaksanakan proyek-proyek bersama dan belajar memenej konflik—dalam semangat menghormati nilai-nilai kemajemukan, saling memahami dan perdamaian.

*Learning to be*, sehingga dapat mengembangkan kepribadian lebih baik dan mampu bertindak mandiri, membuat pertimbangan dan rasa tanggung jawab pribadi yang semakin besar, ingatan, penalaran, rasa estetika, kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi.

Dari keempat pilar pendidikan di atas terlihat bahwa pilar *learning to live together, learning to live with others*, dalam konteks kemajemukan merupakan suatu pilar yang sangat penting. Pilar ini sekaligus juga menjadi pembenar pentingnya pendidikan multikultur yang berupaya untuk mengkondisikan supaya peserta didik mempunyai kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain dan sekaligus yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya serta orang lain. Sehingga bila proses pembelajaran di sekolah diarahkan tidak hanya pada *learning to know, learning to do* dan *learning to be*, tetapi juga diarahkan ke *learning to live together*, masalah kemajemukan akan dapat teratasi dengan

melakukan manajemen konflik dan dengan demikian akan juga diikuti oleh tumbuhnya kebudayaan nasional yang tidak melupakan kebudayaan daerah, tumbuhnya bahasa nasional dengan tidak melupakan bahasa daerah, tumbuhnya sistem politik nasional dengan tanpa mengabaikan sistem politik daerah, (pemerintahan daerah). Secara umum akan tumbuh dan berkembang Sistem Sosial Indonesia, yang berbeda dari Sistem Sosial Amerika, Sistem Sosial Jepang, Sistem Sosial negara-negara lainnya.

Dalam masyarakat luas, ternyata seiring derap langkah kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin terbuka, ternyata memberikan dampak kepada kondisi dan pengalaman keberagaman. Dengan pandangan dan visi yang kemungkinan besar tidak sama, tidak jarang akhirnya terjadi konflik baik intern atau antar agama. Disinyalir bahwa fenomena ini merupakan relasi sosial yang akan menaungi rentetan kejadian yang berbau kekerasan agama dan beda keyakinan.

Menurut Sulhan, et. al, berpendapat bahwa toleransi dan kesadaran pluralis akan menjamin keberlangsungan Indonesia, sebagai bangsa paling pluralis di dunia, sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau lebih, 400 kelompok etnis dan 500 bahasa dan dialek yang berbeda-beda menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kebudayaan yang sangat beragam. Keragaman bukan saja pada sosial, budaya, etnik, bahasa, tetapi juga keragaman dalam agama dan keyakinan. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, juga ditemui beragam kelompok-kelompok kecil penganut animisme dan dinamisme. Kemajemukan di atas harus dipahami sebagai kekayaan bangsa dan dipelihara dalam pengembangan dan pembangunan nasional. Mengingkari kebenaran akan kemajemukan, hanya akan mengantarkan pada pandangan sempit, eksklusif, intoleran, dan menggiring pada konflik sosial yang berkepanjangan.<sup>48</sup>

Secara etimologis toleransi yang dalam bahasa Arabnya *tasamuh* berarti membiarkan, lapang dada, lunak, berhati ringan, ada juga yang memberi arti toleransi itu dengan kesabaran hati atau membiarkan dalam arti menyabarkan diri selama tidak merusak bingkai bingkai keimanan. Pada pengertian yang lebih luas toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur

---

<sup>48</sup> Moh. Sulhan, dkk., "Akar Diskriminasi Minoritas dan Pluralisme Agama; Studi Kasus Kekerasan terhadap Jama'ah Ahmadiyah di Kuningan". *Jurnal Holistik*. Vol. 07. No. 01, Januari-Juni, 2006, h. 12

hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat harus terciptanya ketertiban dan pedoman dalam masyarakat.

Toleransi merupakan bentuk luar praktek keagamaan yang dilakukan oleh penganut-penganut keagamaan. Untuk menciptakan kondisi toleransi yang saling menghargai dan duduk berdampingan dalam perbedaan beragama, sejarah telah mencatat peristiwa-peristiwa yang bisa memunculkan agama dalam komunitasnya baik itu dalam hubungan yang tidak serasi (konflik) atau interaksi antar agama yang saling menemukan titik persamaan dalam hidup beragama.<sup>49</sup> Diantara agama-agama besar yang acap kali diwarnani oleh interaksi agama ini adalah Islam dan Kristen. Toleransi sebagai bentuk pengalaman keagamaan masing-masing agama yang diwujudkan dengan saling menghargai pada titik awal merupakan sebuah bentuk pendalaman terhadap ajaran yang melihat kepercayaan dan doktrin agama masing-masing. Karena dengan penghayatan agamanya sendiri dengan diisyaratkan oleh tujuan beragama yang melihat kepercayaan lain sebagai mitra dialog maka ia bisa mewujudkan rasa hormat dan bisa menerima perbedaan.

Dalam mewujudkan rasa untuk saling menerima dalam perbedaan itu maka dituntut tersedianya koridor dialog antar agama. Salah satu tujuan dialog adalah pemahaman yang sama sekali tidak bermaksud untuk mengalahkan salah satu agama dalam dialog dan bukan juga mencapai kesepakatan tentang bentuk agama universal.<sup>50</sup> Cita-citanya adalah komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman timbal balik antar budaya dunia yang berbeda-beda, membiarkan masing-masing agama bicara dan mengungkapkan pandangan mereka dalam bahasanya masing-masing. Mungkin ada orang yang mengharap mencapai persekutuan, tetapi ini semua sekali tidak berarti bahwa yang menjadi tujuan adalah keseragaman bentuk atau reduksi dari keseragaman manusia ke dalam agama, ideologi atau tradisi satu-satunya. Pluralisme berdiri antara pluralitas yang tidak saling berhubungan dan suatu kesatuan monolitik.

---

<sup>49</sup>J. Garang tentang, *Ambivalensi Agama : Antara Dominasi dan Toleransi*, tulisan ini dimuat dalam buku Pilihan Artikel Prisma 1975 – 1984 dengan judul *Agama dan Tantangan Zaman*, (LP3ES : Jakarta), 1985, h. 139-150.

<sup>50</sup>Raimundo Panikkar, *Dialog Intra Religius*, (Yogyakarta : Kanisius), 1994, h. 33

Dialog antar agama pada era pasca kenabian terus intensif dan selalu mengundang pemerhati agama-agama, terutama Islam dan Kristen. Pada kilasan historis bentuk dialog antara Islam dan Kristen terjadi pada masa pertama yang disebut dengan *Periode Patristik*. Islam pada waktu itu baru merupakan wahyu yang tersimpan dalam sebuah kitab, yang murni secara historis serta belum melewati suatu penyebaran lisan dengan penceritaan yang diperkuat oleh imajinasi populer, oleh kebudayaan yang berdekatan ataupun oleh penonjolan emosional. Hubungan antara periode Patristik dengan wahyu Islam bukanlah suatu kategori hubungan sejarah, yakni hubungan sebab akibat, akan tetapi hanya merupakan hubungan pada tingkat gagasan<sup>51</sup>. Bentuk kedua, dialog Islam-Kristen terjadi pada akhir abad pertengahan atau zaman *Skolastik*.

Dari abad ke-7 sampai abadm ke-9, Eropa Tengah sedang berada pada masa penyebaran kebudayaan Kristen-Roma, yang bergerak keutara dan juga Kristenisasi Anglo-Saxon dan Jerman. Pada periode yang sama kebudayaan Islam mulai berkembang dan mencapai puncaknya. Eropa abad pertengahan siap menerima dan kebudayaan Islam siap memberi. Dengan bentuk perjumpaan Islam-Kristen seperti sejarah mencatat adanya keharmonisan antara dua agama tersebut.

Dalam Islam, dialog keagamaan diawali dengan adanya konsep tentang titik persamaan (*Kalimatun Sawa*) agama-agama yang paling eksplisit. Konsep tersebut sering juga disebut sebagai *teologi inklusif* yang merupakan manifestasi monoteisme Islam yang inklusif (tauhid). Dalam menerjemahan toleransi inklusif ini perlu adanya manifestasi lain yang mampu menerangkan lebih jelas tidak memihak dan secara epistemologis teologi harus memasuki bidang-bidang yang mengatasi teologi. Selama ini teologi inklusif hanya terbuka untuk umat Islam saja – mungkin karena terma dan idiom yang sangat berbau Islam dan bisa menimbulkan bias – tidak bagi yang lain. Filsafat *Perennial* merupakan salah satu manifestasi dari teologi inklusif yang bisa diterima oleh agama lain, karena filsafat *Perennial* dengan perspektif transendentalnya bisa memberikan banyak pandangan.<sup>52</sup> Hanya dengan cara ini Islam bisa memberi sumbangan dalam proses dialog antar agama, di samping tentu saja perluasan pandangan *Perennial* Islam itu sendiri yang pada hakekatnya memang sudah bersifat *Perennial*.

---

<sup>51</sup>Hassan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi I*, (Jakarta : Pustaka Firdaus), 1994, h.

<sup>52</sup>Fritjof Schuoun, *Islam dan Filsafat, Perennial*, ter (Bandung : Mizan), 1995, h. 25.

Dalam menciptakan dialog yang lebih mendalam, Islam juga mengenal *esoterisme* dan *eksoterisme* agama.<sup>53</sup> Dalam fenomena keagamaan hidup adalah merupakan tingkatan-tingkatan. Demikian pula kesadaran kognitif dan tingkatan-tingkatannya. Dari segi metafisik hanya kepada Tuhan-lah terdapat titik temu berbagai agama, sedangkan di tingkat bawahnya agama-agama yang ada sekarang itu sangat berbeda. Dengan kenyataan fisik ini, agama-agama dari segi epistemologis dapat pula dikatakan bahwa perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain juga mengecil dan bersatu di tingkat tertinggi, sedangkan di tingkat bawahnya agama itu berpecah belah.

Untuk memberikan upaya dialog sebagai cara beragam yang bisa mengembangkan hubungan mesra antar agama mestinya ditempuh cara-cara dialog dapat dilaksanakan dengan pendekatan *Paradigma Pluralisme Diagonal*. Pendekatan dialogal mengakui pluralisme sekaligus menganggap dialog sebagai sesuatu yang penting, bahkan suatu keharusan. Dalam merinci pendekatan paradigma pluralisme diagonal, maka mesti dirunut juga paradigma lainnya. *Pertama*, paradigma eksklusifis. Dalam kerangka ini orang tidak akan diselamatkan kecuali kalau mengakui yang kita akui, kecuali memeluk apa yang kita peluk. Agama-agama lain barangkali mempunyai banyak hal yang baik, tetapi agama-agama lain tidak menjadi mediasi keselamatan. Paradigma eksklusifis ini tidak dapat diterima karena bersikap negatif terhadap atau bahkan merendahkan agama-agama lain. *Kedua*, paradigma inklusifis yang menerima kemungkinan adanya pewahyuan dalam agama-agama lain yang juga menjadi mediasi bagi yang memeluknya. Namun akhirnya keselamatan yang diterima pemeluk agama lain juga melalui unsur dalam agama kita. *Ketiga*, paradigma pluralis indeferen yang mengakui semua dapat menempuh cara masing-masing jalan keselamatan<sup>54</sup>. Paradigma ini merupakan suatu pengakuan yang theosentris. Paradigma ini tampak sangat terbuka, namun sekaligus tidak cukup serius terhadap agama. *Keempat*, paradigma pluralis Diagonal. Paradigma ini mengakui kenyataan pluralisme iman dan agama serta menolak paradigma eksklusifis, juga dapat dikatakan paradigma ini berdiri diantara inklusifis dan pluralis indeferen.

---

<sup>53</sup>*Esoteris* : hal-hal yang hanya boleh diketahui dan dilakukan beberapa orang saja dari suatu kelompok penganut paham tertentu. *Eksoteris* : hal-hal yang boleh diketahui dan dilakukan oleh semua anggota kelompok penganut suatu paham tertentu. Fritjof Schuon *Mencari Titik Temu Agama-agama*, terj, (Jakarta : Obor), 1987, h. 25.

<sup>54</sup>J. Banawiratma dalam Dialog Kritik dan Identitas Agama, *Op. Cit*, h. 16.

Kiranya dialog merupakan agenda bersama yang harus direalisasikan oleh pemeluk agama, khususnya Islam dan Kristen<sup>55</sup>. Ini merupakan sebuah dialog agenda masa depan yang dengan sendirinya merupakan penghayatan keagamaan yang kuat dan dinamis.

Toleransi dan pluralisme agama, meskipun nilai baru sebagai produk modernitas, namun menurut Lewis (1997:34) bagi agama-agama merupakan kebajikan. Sebaliknya intoleransi adalah kejahatan. Toleransi akan menjadi daya perekat dalam membangun integrasi yang harmonis, bertitik tolak pada keseimbangan, dan pandangan positif atas orang lain dan perbedaan.

Berkaitan dengan gagasan pluralisme, uraian John Hick yang kemudian sebagaimana dikutip oleh Kosim Abdullah (2006: 25) bahwa pluralisme tidak monolitik artinya terdapat pluralitas dalam pemikiran pluralisme agama. Kemudian pluralisme meniscayakan keragaman dan diversity, bukan persamaan. Namun perbedaan itu bukan berarti saling dibenturkan melainkan dimaknai sebagai desain Ilahi dan kebijakan sosial sehingga memunculkan sikap inklusif dan apresiatif.

Inti agama, sebagaimana disebut Toshihiko Izutsu (1994:1) adalah kepercayaan atau keyakinan. Meskipun kemudian diakui Izutsu, bahwa kepercayaan pada hakekatnya adalah fenomena eksistensi personal. Dalam pengertian ini, kepercayaan sebagaimana digambarkan oleh konsep teologi sekalipun, dengan cara yang sangat khusus, adalah sifat nyata dari kepercayaan sebagaimana keadaan yang sesungguhnya, yaitu sesuatu yang secara aktual hidup dan dialami dalam sejarah seseorang. Agama adalah sikap apa yang nampak (positif atau negatif) pada seseorang. Dengan kata lain, respon dan sikap pemeluk agama terhadap penganut agama lain yang berbeda dalam konteks seperti ini, agama muncul sebagai realitas sosial, sebagaimana diistilahkan oleh Peter L. Berger (1991).

---

<sup>55</sup>Yvone Yazbeck Haddad dan Wadi Z. Haddad, *Christian – Muslim Encounters*, (Florida : University of Florida), 1995, h. 26.



## EPILOG

Setelah membahas tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang juga dilihat berbagai implikasinya, maka sebagai masyarakat religius yang sama-sama mementingkan harmonisasi dan keutuhan bangsa, penganut agama-agama di Indonesia harus mempunyai komitmen untuk menentukan arah integral dan menjaga kebersamaan yang mengakomodasi berbagai keinginan dan kehendak secara luar dari masyarakat Indonesia.

Konsep kerukunan antar umat beragama yang muncul di tengah-tengah komunitas agama-agama Indonesia yang mempunyai karakter pluralistik, dapat diamati kemunculannya melalui dua faktor, internal dan eksternal. Kerukunan antar umat beragama yang berasal dari faktor internal yaitu kerukunan yang tumbuh dari dalam berdasarkan kehendak, kebutuhan dan niat baik dari komunitas-komunitas agama. Kerukunan agama yang bersifat kultural adalah bentuk kerukunan yang merepresentasikan sebuah dinamika dari pola pikir dan kemauan penganut agama-agama. Kerukunan antar umat beragama yang berasal dari faktor eksternal yaitu kerukunan yang datangnya dari pihak-pihak yang berkepentingan, apakah itu bersifat sosio-politis, sosio-ekonomis atau karena aspek intelektual. Sehingga kerukunan antar umat beragama bersifat struktural dan intelektual akan mendeskripsikan bentuk kerukunan yang diinternalisasikan dari “pihak luar” ke dalam pengakuan penganut-penganut agama.

Masyarakat Indonesia dalam menyongsong arus perubahan sosial memerlukan bentuk kerukunan alternatif yang harus sesuai dengan perubahan sosial tersebut. Oleh karena itu kerukunan antar umat beragama dalam merespons arus perubahan sosial dimaksudkan untuk mengadakan evolusi positif yang semakin mengajak peran aktif para penganut agama-agama di Indonesia. Bentuk kongkritnya adalah memformulasikan kerukunan yang berasal dari toleransi yang selama ini sudah lama terjaga, harus diubah menjadi bentuk kerukunan yang mengedepankan kerjasama (kooperasi). Hubungan yang “kooperatif”, yang dimaksudkan untuk bersama-sama merespons isu kontemporer seperti krisis HAM, postmodernisme, *law enforcement*, perubahan ekologis dan lainnya.

Kerukunan antar umat beragama yang ada dan hidup selama ini harus bisa mengakomodasi kepentingan, kemauan dan kebutuhan penganut agama-agama yang ada di Indonesia, sehingga kerukunan kultural akan sangat baik

untuk dikembangkan sehingga masih memerlukan upaya yang cukup berharga untuk meneruskan menjaganya.

Dalam memberikan penguatan dan berkontribusi terhadap isu kontemporer maka toleransi yang merupakan salah satu karakteristik kerukunan, harus senantiasa bisa berbicara dalam dataran praksis-sosial sehingga bisa menerjemahkan peran kerukunan dalam menyelesaikan patologi sosial. Penelitian tentang kerukunan agama di Indonesia sangat berpotensi untuk berkembang, oleh karena itu harus dikembangkan sebuah penelitian yang lebih komprehensif dan kontinyu.

## BIBLIOGRAFI

- Anonimous. *Al Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1988.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta :
- Pustaka Pelajar, 1999.
- *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Bandung : Mizan, 2000.
- “Anatomi Kerukunan Umat Beragama Tinjauan Historis-Ideologis” makalah pada seminar Musyawarah Nasional Cendekiawan Antar Agama, (Yogyakarta, 1996)
- “Doktrin Agama Belum Menjamin Kerukunan Antar Umat Beragama”, dilansir dalam Harian Republika tanggal 19 Mei 2000.
- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (ed). *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Ali, A. Mukti. *Dialog Antar Agama*. Yogyakarta : Yayasan Nida, 1970.
- *Ilmu Perbandingan Agama*. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1990.
- *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1991.
- Andito (ed). *Atas Nama Agama; Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas” Konflik*. Jakarta : Pustaka Hidayah, 1988
- Arshinta. “Laporan untuk Studi Bersama tentang Dialog Sebagai Instrumen Pencegah Konflik SARA Daerah Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta” diambil dari Studi Bersama Tentang “Dialog Sebagai Instrumen Pencegah Konflik SARA Perspektif Relasi Historis dan Normatif, Sosisio-Politik-Ekonomi, Sosio-Budaya dan Agama”, diselenggarakan oleh Interfidei, tanggal 1-5 Desember 1998
- Baker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Falsafat*. Yogyakarta : Kanisius, 1990
- Bakker, YWM. *Umat Katolik Berdialog Dengan Umat Beragama Lain*. Yogyakarta : Penerbitan Yayasan Kanisius, 1976
- Berkhof, H. dan I.H. Enklaar. *Sejarah Gereja*. Jakarta : Badan Penerbit Kristen, 1956.

- Berton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta : Paramadina, 1999.
- Bikhu Jotidhammo. “Kerukunan Umat Beragama Tinjauan Historis Ideologis agama Budha”, dalam antologi makalah dari Seminar Nasional Cendekiawan Antar Agama, yang mengambil tema “Anatomi Kerukunan Umat Beragama”, yang di selenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama, Yogyakarta, tanggal 16 Januari 1996.
- Bleeker, C.H. *Pertemuan Agama-agama Dunia*, terj. Bares Siregar. Bandung : Penerbitan Virkink Van Hoeve, tt.
- Cannon, Dale. *Six Ways of Being Religious A Framework for Comparative Studies of Religion*, USA : Wadsworth Publishing Company, 1996
- C. Martin, Richard (ed.). *Approaches to Islam in Religious Studies*. Tucson : The University of Arizona Press, 1985
- Coward, Harold. *Pluralisme Tantangan bagi Agama-agama*, terj. Kanisius. Yogyakarta : Kanisius, 1989
- Darsono, Encon. *Agama dan Kerukunan Penganutnya*. Bandung : al-Ma’arif, 1980
- Daya, Burhanuddin. “Dialog Antar Agama”, makalah yang disampaikan dalam Stadium General Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1996
- Djam’annuri, et.al.(ed.). *Agama dan Masyarakat 70 Tahun A. Mukti Ali*. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993
- Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of The Religious Life*. New York : Macmillan Company, 1915
- Elliade, Mircea (ed.). *The Encyclopedia of Religion*, Vol. IV. New York : Macmillan Publisher, 1995.
- Essack, Farid. *Qur’an, Liberation and Pluralism an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Againts Oppression*. Finland : WSOY, 1997.
- Haddad, Yvonne Tazbeck dan Wadi Z. Haddad (ed.). *Christian-Muslim Encounters*. Florida : University of Florida, 1995
- Go, O. carm Peit. *Keutamaan Teologal dan Keutamaan Religi*. Malang : STFT Widya Sasana, 1982
- Grose, George B dan Benjamin J. Hubbart (ed.). *Tiga Agama Satu Tuhan Sebuah Dialog*, terj. Santri Indra Astuti. Bandung : Mizan, 1998

- H. Carps, Walter. *Religious Studies The Making of a Discipline*, Minneapolis : Fortress Press, 1995
- Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta : Paramadina, 1998.
- dan Muhammad W. Nafis. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Parennial*. Jakarta : Paramadina, 1995
- dan Ahmad Gaus AF (ed.). *Passing Over Melintas Batas Agama*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Koentowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Bentang, 1997
- Ketut Nehen, I. “Kerukunan Umat Beragama di daerah Bali”, dalam antologi makalah dari Seminar Nasional Cendekiawan Antar agama, yang mengambil tema “Anatomi Kerukunan Umat Beragama”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama, Yogyakarta, tanggal 16 Januari 1996
- Kuschel, Karl Josef. *Abraham Sign of Hope for Jews, Christians and Muslims*. New York : Continuum Publishing Company, 1995
- Kusrahmadi, Sigit Dwi, *Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Masyarakat Majemuk*, makalah tidak diterbitkan, tahun 2006.
- L. Haines Byron dan Frank L. Cooley (ed.). *Christians and Muslims Together an Exploration by Presbyterians*. Pennsylvania: The Geneva Press Phidelpia, 1987
- Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1992.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan,, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta : Paramadina 1992.
- *Pikiran-pikiran Nurcholish ‘Muda’; Islam dan Keindonesiaan* Bandung : Mizan, 1996
- “Dorongan dan Hambatan Kultural Bagi Kerukunan Beragama di Indonesia”, makalah pada seminar Musyawarah Nasional Cendekiawan Antar Agama Yogyakarta, 1996
- Megawangi, Ratna, *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004)
- Mubarok, Achmad. *Perbandingan Agama Islam dan Kristen; Studi Tentang Sakramen Gereja*. Bandung : Pustaka, 1985

- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Murjaka, M. Yuwana. “Kemungkinan dan Batas-batas dalam Dialog Antar Umat Beragama”. dalam Seri Pastoral, No. 97, Yogyakarta, 1983.
- Mustoha, et.al. (penyt.). *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup umat Beragama di Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1997
- *The Theological Frame of Harmoninuous Life Communities in Indonesia*. Jakarta : Departement of Religious Affairs of Indonesia, 1997
- Muzani, Saiful (ed.). *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*. Bandung : Mizan, 1996
- Nafis, Muhammad Wahyuni (ed.). *Kontektualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*. Jakarta ; Paramadina, 1995
- Nasution, Jend. Abdul Haris. *Kerukunan Beragama ; Ceramah dan Tanya Jawab di Universitas Nomensen*. Medan : t.p., 1977
- Notosusanto, Nugroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer Suatu Pengalaman*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1978
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi*, terj. Machun Husein. Jakarta : Rajawali Press, 1997
- Nuh, Nuhrosin M. *Profil Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*, seri 3. Jakarta : Departemen Agama RI, 1997/1998
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*. New York: Oxford University press,
- Phipps, Willian E. *Muhammad dan Isa Telaah Kritis atas Risalah dan Sosoknya*, terj. Ilyas Hasan, Bandung : Mizan, 1998
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa*. (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2009).
- Poerwowidagdo, Judo. “Indonesia : Living Together in a Majority Muslim Population”. Inggris : Concillum, 1994 no. 3
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta : Paramadia, 1996
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok al-Qur’an*. terj. Anas Mahyudin Bandung : Pustaka, 1996
- *Islam*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung : Pustaka , 1984
- Riyanto, Armanda CM. *Dialog Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik*. Yogyakarta : Kanisius, 1995
- Robertson, Roland (ed.). *Sociology of Religion*, terj. Achmad Fedyani dan Saiffudin. Jakarta : Rajawali Press, 1988

- Rowe, William L. *Philosophy of Religion An Introduction*. California : Wadsworth Publishing Company, 1993
- Sarapung, Elga, et.al. *Pengalaman Kesaksian dan Refleksi Kehidupan Mahasiswa di Yogyakarta; Hasil Penelitian Tentang Hubungan Antaretnis dan Antariman di Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta*. Yogyakarta : Interfidei, 1999
- Schumann, Olaf. *Dialog Antar Umat Beragama; Dimanakah Kita Berada Kini?* Jakarta : LPS Dewan Gereja-gereja di Indonesia, 1982
- *Dialog Antar Umat Beragama; Dari Manakah Kita Bertolak?.* Jakarta : LPS Dewan Gereja-gereja di Indonesia, 1982
- *Keluar dari Benteng Pertahanan*. Jakarta : Gramedia, 1996
- Schuon, Frithjof (Muhammad Isa Nuruddin). *Islam dan Filsafat Parennial*, terj. Rahmani Astuti. Bandung : Mizan, 1993
- *Mencari Titik Temu Agama-agama*. terj. Saifroedin Bahar. Jakarta : Yayasan Obor, 1996.
- Sihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung : Mizan, 1997.
- *Membendung Arus ; Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, terj. Ihsan Ali-Fauzi Bandung : Mizan, 1998
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1992
- *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan, 1997.
- Sho'ub, Hasan. *Islam dan Revolusi Pemikiran; Dialog Kreatif dan Kemanusiaan*, terj. Surabaya: Risalah Gusti, 1997
- Silsilah Editorial Board (ed.). *Inter-religious Dialogue : A Paradox?.* Philippines: Silsilah Publications, 1991
- Steenbrink, Karel. "Muslim-Christian Relations in the Pancasila State of Indonesia", USA : *The Muslim World*, Vol. LXXXVIII, No. 3-4 (July-October 1998)
- Sudiarja, A. (ed.). *Raimundo Panikkar Dialog Intra Religious*, terj. Yogyakarta: Dwi Helly Purnomo dan P. Puspobinatmo. Kanisius, 1994
- Sudjangi (peny.). *Kajian Agama dan Masyarakat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama III; 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1993

- *Pembinaan Kerukunan Antar Hidup Umat Beragama 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1996
- *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1996
- *Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat beragama di Indonesia, seri I*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1997/1998
- *Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia, seri 2*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1997/1998
- *Profil Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, seri 2*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1995/1996
- Sugiharto, I. Bambang. *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius, 1996
- Sudiadi, Dadang, *Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat Yang Majemuk: Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia*, Makalah, tahun 2004.
- Sulhan, Moh., dkk., “Akar Diskriminasi Minoritas dan Pluralisme Agama; Studi Kasus Kekerasan terhadap Jama’ah Ahmadiyah di Kuningan”. *Jurnal Holistik*. Vol. 07. No. 01, Januari-Juni, 2006.
- Sumartana et. al (ed). *Dialog : Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Interfidei, 1993
- *Spiritualitas Baru : Agama dan Aspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Interfidei, 1994.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. *Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III: Refleksi dan Reformasi*. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000)
- Suyatno, Sumedi, Pudjo, dan Sugeng Riadi (Editor). *Pengembangan Profesionalisme Guru: 70 Tahun Abdul Malik Fadjar*. (Jakarta: UHAMKA Press, 2009.)
- Suyoto (ed.). *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*. Yogyakarta: Aditya Media, 1994
- Swidler, Leonard. “The Dialogue Dicalogue, Ground Rules for Interreligious, Interideological Dialogue” dalam *Journal Ecumenical Studies*, 20 ; 1, Winter 1983. September 1984, Revision.
- Taher, Tarmidzi. *Aspiring for the Middle Path Religious Harmony in Indonesia*. Jakarta : CENSIS, 1997
- Tanja, Victor I. *Pluralisme Agama dan Problema Sosial Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer*. Jakarta : CIDES, 1998.



- Tim. *Sewindu Institut Agama Islam Negeri al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Sunan Kalidjaga Jogdjakarta 1960-1968*, Yogyakarta : Sunan Kalidjaga, 1968
- Tabroni dan Syamsul Arifin. *Islam, Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*. Yogyakarta SIPRESS, 1994
- Van Peursen, CA. *Susunan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gramedia, 1985
- W. Said, Edward. *Orientalism*. New York : Pantheon, 1978





## RIWAYAT PENULIS

Iwan, M. Ag, adalah sosok penulis yang dilahirkan disebuah tempat yang cukup sejuk dibawah kaki gunung Ciremai, tepatnya di Kampung Malaraman, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hampir semua penduduk di tempat ini mengais rijki melalui bercocok tanam sayuran dan palawija tumpangsari. Penulis berasal dari keluarga petani yang ketika libur sekolah dan madrasah ikut membantu orang tua ke ladang (bubulak) dan kebun. Masa kecil penulis yang hampir sama dengan teman sebayanya dihabiskan ditempat ini. Setelah menamatkan pendidikan dasar di tempat asalnya (SD Cisantana 2 dan MTsN Cigugur), pada tahun 1989 penulis melanjutkan pengembaraan ilmunya ke wilayah Ciamis, belajar di Pondok Pesantren Darussalam. Disamping sebagai santri, penulis tercatat sebagai siswa Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Darussalam angkatan ke-3. Pada tahun 1992 sampai 1997 meneruskan pengunduhan ilmunya ke Kota Surakarta (Solo), berkuliah di IAIN Walisongo Semarang di Fakultas Ushuluddin. Setelah itu penulis meneruskan studinya ke jenjang Magister di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengkhatakannya pada tahun 2000. Setelah lama rehat, pada tahun 2009 penulis memulai perkuliahan pada jenjang Strata Tiga di UPI Bandung Program Studi Pendidikan Umum/Nilai, mengambil konsentrasi Filsafat Pendidikan.

Beristerikan seorang wanita Solo yang bernama Marfu'ah Jamil, S. Ag. yang dinikahnya pada tahun 2000, dan sampai saat ini penulis sudah dikaruniai dua putra dan satu putri (Reyazul Jinan Haikal, Ramza Azhari Firdaus, Radhwa Queena Huwaida). Penulis mengkhidmatkan pekerjaanya diawali dengan menjadi Asisten Dosen pada Mata Kuliah Pemikiran Modern dalam Islam mulai tahun 1997-1999. Kemudian mulai tahun itu juga (1999) diterima sebagai Pendidik/Dosen di STAIN Cirebon, Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Ketika STAIN Cirebon berubah status menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penulis masih berstatus Pendidik/Dosen sebagaimana sebelumnya. Pernah diamanahi sebagai Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Cirebon mulai tahun 2003-2010. Pernah mengurus dan membesarkan *Jurnal Holistik* dan pada saat ini tertugaskan sebagai awak *Jurnal Al-Tarbawi Al-Haditsah* yang diterbitkan oleh Jurusan PAI.

Beberapa karya ilmiah yang terlahir dari tangan penulis diantaranya ; *Menambatkan Kemajuan Pesantren Masa Depan Melalui Kepemimpinan Kiai yang Modernis dan Inovatif* (Jurnal Al-Tarbiyah, Vol. XXVII, nomor 2, Juli 2014), *Menelaah Teori Kritis Jürgen Habermas* (Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi Edueksos, Vol. III, Nomor 2, Juli-Desember 2014), *Mencermati dan Mengurai Benang Kusut Masalah Pendidikan di Indonesia* (Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi Edueksos, Vol. II, Nomor 1, Januari-Juni 2013), *Reposisi Pendidikan Nilai dalam Memperteguh Pendidikan Karakter Bangsa* (Jurnal Al-Tarbiyah, Vol. XXVI, nomor 1, Januari 2013), *Internalisasi Nilai-nilai Toleransi dalam Upaya Membina Kerukunan Umat Beragama di Sekolah* (Prosiding; Refleksi Pembangunan Karakter Bangsa, 'Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Analisis Kebijakan, Agama, Nilai, 4P, dan Praktik pada Satuan Pendidikan', penerbit Program Studi PU, SPs UPI Bandung, 2013), *Arus Baru Orientasi Pendidikan Global; Telaah Terhadap Pemikiran Filsafat Pendidikan John Dewey* (Jurnal Al-Tarbiyah, Vol. XXV Juli 2012), *Menyiangi Akar Rumput; Mencermati dan Mencari Solusi Masalah Pendidikan di Indonesia* (Jurnal Empirika; Media untuk Memperluas Horizon Pendidikan, Vol. 2 No. 1 Juli 2012), *Membedah Filsafat Pendidikan Esensialisme* (Jurnal Empirika; Media untuk Memperluas Horizon Pendidikan, Vol. 1 No. 1 Juli 2011), *Analisis Persepsi Dan Potensi Masyarakat Terhadap Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Wilayah Cirebon* (hasil penelitian tahun 2008), *Pemetaan Demografis Daerah Binaan PT. Indocement* (hasil penelitian tahun 2008), *Pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan participation action research* (Editor pada buku pendamping KKM tahun 2008), *Islamisasi Ilmu Pengetahuan; Studi Kritis atas Pemikiran Ziaudin Sardar dan Ismail Razi al-Faruki* (hasil penelitian tahun 2005), *Simpan Pinjam Pola Syariah* (hasil penelitian tahun 2002)